



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;

- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3 Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- 5 Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga yang ada pada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Lombok Tengah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan untuk periode anggaran 2022.

BAB II

KAIDAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, diimplementasikan dalam periode satu tahunan memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan.

Pasal 3

RKPD berisi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang telah dikompilasi dengan hasil-hasil usulan pembangunan dari masyarakat melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa hingga Kabupaten.

Pasal 4

RKPD merupakan Dokumen Indikator Kinerja SKPD yang terukur dan terbagi dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai Fungsi.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) RKPD disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.

(2) Sistematika penyusunan RKPD:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tema Pembangunan Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.3 Kerangka Kebijakan Strategis Daerah

4.4 Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB IV

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD dengan mengacu pada Kebijakan Umum APBD dan target capaian kinerja.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut dari RKPD menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
Pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP

Diundangkan di Praya,
pada tanggal

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

H.M. NAZILI, S.IP

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus menjadi satu kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi serta potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hirarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas : perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja SKPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik berasal dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam mekanismenya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 merujuk pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2011–2031 Kabupaten Lombok Tengah yang telah memasuki tahun ketiga dalam pelaksanaannya. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2022 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada. Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPD 2022 berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang

berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Perumusan RKPD merupakan proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun Rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan.

Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara kabupaten dengan provinsi dan nasional. Demikian juga dengan dimasukkannya indikator kinerja utama pada SKPD yang kesemuanya itu berkaitan erat dengan penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah. Rancangan RKPD dan selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir RKPD di dalam Musrenbang RKPD. Lebih lanjut RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022.

1.1.1 Proses Penyusunan RKPD

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyiapan Rancangan Awal RKPD

- a. Menyiapkan bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal RKPD yang bersumber dari :
 - Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
 - Capaian kinerja tahun lalu dan tahun berjalan dari hasil monitoring dan evaluasi;
 - Prakiraan anggaran tahun rencana dari APBD tahun berjalan.
- b. Merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan serta rencana kerja setiap prioritas untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang direncanakan;

- c. Merumuskan indikasi program/kegiatan;
- d. Pra Musrenbang Kabupaten untuk sinkronisasi usulan wilayah dan SKPD

2. Penyusunan Rancangan RKPD

- a. Menerima secara resmi naskah rancangan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD;
- b. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja SKPD terhadap tugas dan fungsi SKPD;
- c. Mengintegrasikan rancangan Renja SKPD ke dalam rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
- d. Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
- e. Melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
- f. Musrenbang untuk menyempurnakan rancangan RKPD.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

- a. Menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang;
- b. Penyusunan rancangan akhir RKPD dengan memperhatikan naskah RKP Nasional dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Menyusun naskah rancangan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.

4. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD

- a. Kepala Daerah menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dari Kepala Bappeda;
- b. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD;

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum diselenggarakannya penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara, Penyusunan, engendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;

1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai sebuah dokumen arahan, RKPD tidak berdiri sendiri namun merupakan dokumen yang memiliki keterpaduan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Hubungan antara RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ketiga RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. RKPD Tahun 2022 merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022, dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2022.
3. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

4. Penyusunan RKPД memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Lombok Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPД

Sistematika dokumen RKPД Kabupaten Lombok Tengah ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. **Latar Belakang**, memuat pengertian ringkas tentang RKPД, proses penyusunan RKPД, kedudukan RKPД tahun 2022 dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. **Dasar Hukum Penyusunan**, menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPД yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPД, baik yang berskala nasional maupun daerah.
- 1.3. **Hubungan Antar Dokumen**, menggambarkan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD, Renstra SKPD, RKPД dan Renja SKPD.
- 1.4. **Maksud dan Tujuan**, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPД Tahun 2022 dan hubungannya dengan dokumen RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 1.5. **Sistematika RKPД**, mengemukakan sistematika RKPД terkait dengan peraturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. **Kondisi Umum Kondisi Daerah**, mengemukakan tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2.2. **Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPД Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**, menguraikan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPД tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- 2.3. **Permasalahan Pembangunan Daerah**, mengemukakan permasalahan yang termuat dalam RPJMD dengan kondisi aktual Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil musrenbang Desa/ Kelurahan, Kecamatan,

Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten. Dalam rangka sinergitas, sinkronisasi, dan integritas, juga menguraikan keterkaitan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan skala provinsi dan nasional.

Bab III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. **Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**, memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumbangan sektoral, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi lainnya serta tantangan perekonomian daerah tahun 2022.
- 3.2. **Arah Kebijakan Keuangan Daerah**, menjelaskan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

- 4.1. **Tujuan dan Sasaran Pembangunan**, memuat penjelasan tentang hubungan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 tahun yang diambil dari dokumen RPJMD.
- 4.2. **Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022**, menjelaskan tentang prioritas pembangunan tahun 2022 yang dikaitkan dengan prioritas nasional dan provinsi dan pengalokasian pagu indikatif berdasarkan prioritas pembangunan.

Bab V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Bab VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan catatan-catatan untuk lebih bersungguh sungguh dalam melaksanakan seluruh agenda pembangunan tahun 2022.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022, dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD tahun 2022 dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD;
- c. Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- d. Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dibandingkan 10 kabupaten dan kota lainnya di NTB, Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua di Pulau Lombok setelah Kabupaten Lombok Timur. Menurut data BPS Lombok Tengah (2021), luas wilayah kabupaten Lombok Tengah adalah 1.208,39 km² (120.839 ha) atau hampir seperempat luas daratan pulau Lombok secara umum.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Tengah
Sumber: Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, 2020

Secara administratif, wilayah Kabupaten Lombok Tengah berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah Selatan terbentang Samudra Hindia, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Lombok Timur.

1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara absolut lokasi wilayah kabupaten Lombok Tengah adalah dari 116°05' Bujur Timur sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' Lintang selatan sampai 8°57' Lintang Selatan. Dari lokasi absolut tersebut, dapat diketahui Kabupaten Lombok Tengah berada di tengah-tengah Pulau Lombok. Keberadaan Bandara Internasional Lombok (Lombok International Airport) menjadikan Lombok Tengah sebagai gerbang Provinsi Nusa

Tenggara Barat melalui jalur udara. Disamping itu, keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Awang yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia menjadikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk lalu lintas komoditas perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kondisi geografis Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya terbagi menjadi tiga. Bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Pringgarata dan sebagian Kecamatan Jonggat dan sebagian termasuk areal Taman Nasional Gunung Rinjani. Curah hujan pada wilayah ini relatif tinggi dan merupakan wilayah tangkapan air yang menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain kawasan hutan, wilayah ini merupakan wilayah potensial pengembangan hortikultura dan wisata alam pegunungan dengan air terjun dan pemandangan yang indah serta udara yang sejuk.

Bagian tengah merupakan wilayah dataran rendah yang didominasi oleh hamparan lahan persawahan dengan potensi komoditas pertanian padi dan palawija meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat. Bagian selatan merupakan daerah perbukitan kapur yang berbatasan dengan Samudera Hindia, meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Wilayah ini memiliki potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang laut yang cukup fantastik, dan merupakan kawasan strategis pengembangan wisata bahari.

1.1.3 Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Lombok Tengah di setiap kecamatan tidak merata dengan ketinggian dan kemiringan lereng yang variatif. Kondisi tersebut mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh tanah dan kedalaman air tanah serta mempengaruhi besar erosi. Secara umum letak ketinggian Kabupaten Lombok Tengah adalah seperti yang disajikan pada tabel 2.1 dan kelas kemiringan lahan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah menurut ketinggian (Ha) di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Ketinggian (dpl)				Jumlah (Ha)
		0-100	100- 500	500-1000	1000+	
1	Praya Barat	5.421	5.715	4.296	1.841	17.273
2	Praya Barat Daya	3.614	3.810	2.864	1.226	11.514
3	Pujut	9.643	6.325	5.305	2.082	23.355
4	Praya Timur	7.679	825	-	-	8.504
5	Janapria	5.064	1.100	293	-	6.457
6	Ko pa n g	763	2.919	1.049	621	5.352
7	Praya	3.971	1.273	124	-	5.368
8	Praya Tengah	5.435	1.743	172	-	7.350
9	Jonggat	6.826	94	235	-	7.155
10	Pringgarata	2.118	1.460	1.700	-	5.278

No	Kecamatan	Ketinggian (dpl)				Jumlah (Ha)
		0-100	100- 500	500-1000	1000+	
11	Batukliang	215	2.480	1.717	1.195	5.607
12	Batukliang Utara	673	7.797	5.399	3.757	17.626
	Jumlah	51.422	35.541	23.154	10.722	120.839

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021

Tabel 2. 2 Luas Wilayah menurut Kemiringan (Ha) di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Kelas kemiringan (%)				Jumlah (Ha)
		0 – 2	2 – 15	15 – 40	> 40	
1	Praya Barat	7.274	9.587	412	0	17.273
2	Praya Barat Daya	4.915	6.478	121	0	11.514
3	Pujut	9.733	13.622	0	0	23.355
4	Praya Timur	3.436	5.068	0	0	8.504
5	Janapria	0	6.457	0	0	6.457
6	Kopang	0	4.760	592	0	5.352
7	Praya	719	4.649	0	0	5.368
8	Praya Tengah	1.004	6.346	0	0	7.350
9	Jonggat	3.388	3.767	0	0	7.155
10	Pringgarata	673	4.575	30	0	5.278
11	Batukliang	0	2.623	1.379	1.605	5.607
12	Batukliang Utara	0	8.247	4.336	5.043	17.626
	Jumlah	31.142	76.179	6.870	6.648	120.839

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021

Seperti gambaran data yang disajikan pada tabel di atas, kemiringan lereng Kabupaten Lombok Tengah dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe yaitu:

- 1) Kemiringan lereng 0 – 2%, merupakan daerah datar, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi sebagian kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (kecuali Kecamatan Janapria, Kopang, Batukliang dan Batukliang Utara) dengan luas daerah ± 31.142 Ha atau 25,77% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Pujut yaitu seluas 9.733 Ha atau 31,25% dari luas daerah dengan kemiringan 0 – 2%.
- 2) Kemiringan lereng 2 - 15%, merupakan daerah landai sampai agak miring, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luas daerah ± 76.179 Ha atau 63,04% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Pujut yaitu seluas 13.522 Ha atau 17,88% dari luas daerah dengan kemiringan 2 - 15%.
- 3) Kemiringan lereng 15 - 40%, merupakan daerah agak miring sampai miring, penyebarannya meliputi sebagian kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (kecuali Kecamatan Pujut, Praya Timur, Janapria, Praya, Praya Tengah dan Jonggat) dengan luas daerah ± 6.870 Ha atau 5,69% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Batukliang Utara yaitu seluas 4.336 Ha atau 63,11% dari luas daerah dengan kemiringan 15 - 40%.

Kemiringan lereng >40% merupakan daerah sangat miring sampai curam, penyebarannya meliputi Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara dengan luas daerah \pm 6.648 Ha atau 5,50% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Batukliang Utara yaitu seluas 5.043 Ha atau 75,86% dari luas daerah dengan kemiringan > 40%.

1.1.4 Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Lombok Tengah tidak terlepas dari kondisi geologi regional Pulau Lombok yang termasuk ke dalam Busur Bergunung Api Nusa Tenggara yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda dalam gunung api sebelah barat. Kondisi ini mengakibatkan secara umum Kabupaten Lombok Tengah rentan terhadap bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Khusus di bagian selatan juga rentan terhadap bencana tsunami.

Berdasarkan sejarah pembentukan geologi Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasiran dan endapan lahar dengan materi tersusun dari material lepas berukuran pasir hingga bongkah. Hal ini mengakibatkan kondisi tanah di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh jenis Komplek Mediteran Coklat, Gromosol Kelabu, Regosol Coklat dan Litosol yang pada kondisi tertentu labil dan berpotensi mengalami pergerakan tanah.

1.1.5 Hidrologi

Kabupaten Lombok Tengah berada dalam wilayah SSWS (Sub Satuan Wilayah Sungai) atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan. Sebagian besar sungai terutama yang terletak di bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah hanya berair pada musim hujan saja. Adapun air permukaan lain yang dimanfaatkan masyarakat adalah bendungan atau waduk serta embung yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Keberadaan dua bendungan besar yaitu Bendungan Batujai dan Bendungan Pengga memiliki peran penting bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah secara umum. Selain berfungsi sebagai penampungan air, kedua bendungan ini dimanfaatkan juga oleh masyarakat sebagai sentra budidaya perikanan air tawar dan sebagai obyek wisata. Sedangkan sebaran air tanah di Kabupaten Lombok Tengah dapat ditemukan hampir di setiap wilayah namun sumber mata air terdapat di bagian utara.

Kemampuan Lombok Tengah untuk memenuhi kebutuhan air dapat dilihat dari analisis neraca air. Penentuan status daya dukung lingkungan berbasis neraca air ini dihitung berdasarkan selisih antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA). Menurut Rustiadi, *et.al.* (2010), jika $SA > DA$, daya dukung air dinyatakan belum terlampaui (surplus) dan sebaliknya jika $SA < DA$, daya dukung air dinyatakan terlampaui (defisit). Selain itu perhitungan juga didasarkan pada nilai rasio SA dan DA. Jika rasio $SA/DA > 2$,

maka daya dukung lingkungan aman (*sustain*), jika $SA/DA = 1-2$, daya dukung lingkungan aman bersyarat (*conditional sustain*), dan jika $SA/DA < 1$, daya dukung lingkungan dianggap terlampaui (*overshoot*).

Tabel 2. 3
Analisis Kebutuhan Air Kabupaten Lombok Tengah dan Daya Dukung Air (DDA) Tahun Proyeksi 2040

No	Kecamatan	Potensi Sumberdaya Air (SA) (m ³ /th)	Kebutuhan Air (DA) (m ³ /th)		DDA	
			2019	2040	2019	2040
1	Praya Barat	6.207.725	120.546.469	149.307.200	0,05	0,04
2	Praya Barat Daya	4.804.949	88.753.428	111.883.200	0,05	0,04
3	Praya Tengah	8.675.903	104.097.947	148.148.800	0,08	0,06
4	Praya Timur	11.899.554	107.772.370	128.323.200	0.11	0,09
5	Pringgarrata	6.139.138	112.093.717	157.665.600	0,05	0,04
6	Pujut	32.885.615	167.793.064	215.614.400	0.20	0.15
7	Batukliang	7.231.664	122.236.305	156.491.200	0,06	0,05
8	Batukliang Utara	22.130.233	83.296.783	118.424.000	0.27	0.19
9	Janapria	9.067.439	122.216.940	113.595.200	0,07	0,08
10	Jonggat	9.362.597	152.873.127	194.555.200	0,06	0,05
11	Kopang	8.271.854	128.881.937	156.072.000	0,06	0,05
12	Praya	7.210.942	180.891.861	250.384.000	0,04	0,03
Jumlah		133.887.613	1.491.455.968	1.900.466.040	0,09	0,07

Sumber : Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2019

Berdasarkan hasil analisis, total kebutuhan air (DA) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 1.491.455.968 m³/tahun dengan potensi Sumber Daya Air (SA) sebesar 133.887.613 m³/tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah mengalami defisit terhadap daya dukung air. Adapun untuk proyeksi selama 20 tahun kedepan, dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2040 sebesar 1.187.790 jiwa dan kebutuhan air per kapita adalah 1.600 m³/tahun, angka kebutuhan air Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2040 diperkirakan sebesar 1.900.466.040 m³/tahun. Jika potensi sumber daya air di Kabupaten Lombok Tengah tetap yakni sebesar 133.887.613 m³/tahun, maka untuk 20 tahun kedepan Daya Dukung Air (DDA) di Kabupaten Lombok Tengah tetap mengalami defisit dan akan mengalami penurunan sebesar 0,02 jika dibandingkan kondisi tahun 2019.

1.1.6 Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim D dan E yaitu hujan tropis dengan musim kemarau kering. Musim hujan mulai sekitar Bulan November sampai dengan Bulan April/Mei dengan curah hujan rata-rata tertinggi di tahun 2020 adalah pada bulan Maret dan terendah pada Bulan Juli/Agustus.

Tabel 2. 4 Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

No	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan
1	Januari	16	174
2	Februari	19	156
3	Maret	16	319
4	April	14	124
5	Mei	11	210
6	Juni	3	14
7	Juli	3	4
8	Agustus	4	5
9	September	4	12
10	Oktober	8	79
11	November	14	282
12	Desember	22	274

Sumber : Lombok Tengah dalam Angka 2021

Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim tropis dengan musim kemarau yang kering. Musim hujan yang cukup tinggi di sepanjang tahun. Pada tahun 2020, jumlah hari hujan per bulan di Kabupaten Lombok Tengah berkisar antara 3 hingga 22 hari dengan curah hujan berkisar antara 4 mm hingga 319 mm. Di tahun tersebut, bulan yang memiliki hari hujan terbanyak adalah bulan Februari sedangkan bulan yang memiliki jumlah hari hujan paling sedikit adalah bulan Juni - Juli.

Dilihat menurut kecamatan (tidak termasuk Kecamatan Praya Barat Daya) wilayah yang memiliki hari hujan terbanyak yakni kecamatan Praya dan sebaliknya kecamatan Kopang dan Janapria merupakan kecamatan dengan jumlah hari hujan paling sedikit.

1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Tengah secara umum dibagi menjadi dua yaitu tanah sawah dan tanah bukan sawah (tanah kering) yang terdiri dari pekarangan rumah (permukiman), tegal/kebun, tambak, kolam/empang, tanah sementara tidak diusahakan, hutan lebat, hutan belukar, tanah perkebunan dan tanah lainnya. Adapun perbandingan penggunaan lahan antara tanah sawah dan tanah kering adalah 45%:55%. Berdasarkan perkembangannya, luas wilayah budidaya yang dimanfaatkan di Lombok Tengah selalu dinamis. Luas wilayah budidaya yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian, permukiman dan sektor-sektor yang menghasilkan produksi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 5 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2020 di Kabupaten Lombok Tengah

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wil Produktif	72.929,00	77.289	79.968	77.424	

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	102.650,55	102.650,55	100.990,27	100.990,27	
3	Rasio [(1)/(2)]	0,710	0,753	0,813	0,767	

Sumber: Dinas Pertanian Lombok Tengah dan Analisis Data Citra Landsat 2018 (Data diolah, 2020)

Dari tabel di atas diperoleh gambaran rata-rata penggunaan wilayah produktif dalam 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami perubahan meskipun tidak terlalu signifikan dengan ratio luas wilayah budidaya rata-rata 0,788 dari luas wilayah produktif secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan yang selama ini masih bertumpu pada pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan sektor-sektor lainnya yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam belum mempengaruhi kapasitas keruangan yang tersedia atau dapat dikatakan bahwa proyeksi penyediaan lahan untuk aktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masih memadai.

Tabel 2. 6 Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2019

No	Jenis Lahan	2016	2017	2018	2019
1	Sawah (Ha)	54.353	54.355	49.253	50.282
2	Tegal/kebun (Ha)	22.336	22.257	24.319	11.664
3	Ladang/huma (Ha)	371	321	1.062	11.243
4	Lahan sementara tidak diusahakan (Ha)	70	70	70	0
	Total	77130	77003	74704	73189

Sumber: Kementerian Pertanian (2020)

Jika dilihat berdasarkan peruntukannya untuk lahan pertanian, luas wilayah produktif di Lombok Tengah masih didominasi oleh sawah. Berdasarkan tabel di atas, penggunaan lahan untuk sawah masih paling dominan meskipun cenderung mengalami penurunan sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir. Selama kurun waktu 2017 hingga 2019 setidaknya terjadi alih fungsi lahan sawah ke non sawah seluas 47 Ha atau rata-rata 23,5 Ha per tahun dengan laju penyusutan sebesar 0,022% per tahun. Alih fungsi lahan sawah tersebut paling besar terjadi di Kecamatan Praya sebesar 19 Ha, selanjutnya Praya Tengah 18 Ha dan Praya Barat Daya 9 Ha.

Penyusutan luas sawah ini menunjukkan adanya perubahan preferensi masyarakat dalam memanfaatkan lahan mereka dari sektor pertanian ke non pertanian. Dinamika ini perlu disikapi oleh semua pihak mengingat berdasarkan hasil sinkronisasi dan integrasi penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Lombok Tengah ke dalam revisi RTRW Provinsi NTB tanggal 12 November 2019, deliniasi kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B di Kabupaten Lombok Tengah seluas 52.957,17 Ha dengan sebaran per kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Sebaran KP2B Per Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Luas KP2B (Ha)
1	Praya	2.710,290
2	Praya Tengah	4.528,085
3	Praya Barat	6.339,228
4	Praya Barat Daya	6.022,105
5	Pujut	7.357,057
6	Praya Timur	6.246,423
7	Janapria	5.511,473
8	Kopang	2.683,631
9	Batukliang	2.348,052
10	Batukliang Utara	2.024,187
11	Pringgarata	2.415,016
12	Jonggat	4.717,623
	Total	52.957,170

Sumber: Bappeda Kab Lombok Tengah, 2020

1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang rawan terhadap kejadian bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Terdapat 12 (dua belas) potensi bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Lombok Tengah yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang ekstrem dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, dan bencana lainnya. Semua potensi tersebut setidaknya pernah terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dan mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari, sehingga diperlukan pencegahan atau mitigasi bencana.

Tabel 2. 8 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Lombok Tengah

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Resiko
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Gempa bumi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
5	Cuaca ekstrim	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
8	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Letusan Gunungapi Rinjani	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang
10	Kebakaran hutan dan lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber : BPBD Kab. Lombok Tengah, 2017

Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021 diketahui dari 10 jenis bahaya di Kabupaten Lombok Tengah, 6 jenis bahaya tergolong memiliki tingkat bahaya yang tinggi, 3 jenis bahaya pada tingkatan bahaya sedang dan 1 jenis bahaya dengan tingkat rendah. Dari hasil pengkajian tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dihasilkan tingkat risiko setiap bencana sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 yang menunjukkan Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat resiko bencana yang tinggi untuk pada 9 jenis bencana dari 10 jenis bencana yang ada.

a. Bencana Letusan Gunung Rinjani

Secara keseluruhan bahaya letusan Gunungapi Rinjani memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Lombok Tengah dengan total 3.882 Ha yang berada pada kelas rendah. Kelas bahaya rendah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terpapar bahaya letusan Gunungapi Rinjani yaitu Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang dan Pringgarata.

b. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Potensi bahaya tanah longsor mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luasan mencapai 26.814 hektar dan tergolong kelas tinggi. Kecamatan yang memiliki kawasan rawan longsor terluas adalah Pujut, Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya.

c. Kawasan Rawan Tsunami

Berdasarkan peta geologi Indonesia wilayah Lombok terletak sangat dekat dengan zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia (selatan) dan Lempeng Eurasia (utara). Kondisi tersebut menyebabkan pesisir selatan Lombok Tengah sepanjang 97 km rawan dilanda tsunami meliputi Pantai Awang, Bumbang, Gerupuk, Kawasan Pantai Putri Mandalika (Pantai Aan, Sunut, Seger, Serenting dan Kuta), Are Guling, Mawun, Tampah, Rowok dan Semeti, Selong Blanak, Mawi, Tomang-Omang, Serangan, Torok Aik Belik, Pengantap Timur (Kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya).

d. Kawasan Rawan Kekeringan

Dari data historis, kekeringan di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Tengah sangat berkaitan dengan fenomena ENSO (*El-Nino Southern Oscillation*). Sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam daerah rawan bencana kekeringan. Data Lombok Tengah Dalam Angka menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yang rawan terhadap bencana kekeringan yaitu Kecamatan Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur, Praya Tengah, Janapria, Jonggat, Kopang, Batukliang, Praya, dan Kecamatan Praya Barat.

e. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lombok Tengah berada di beberapa lokasi yaitu wilayah perkotaan Praya, Dusun Peras Desa Kidang Kecamatan Praya Timur dan Dusun Pasung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut. Kedua dusun ini terletak di dekat bantaran sungai dari DAS Renggung dan dekat dengan muara sungai.

f. Gempa Bumi

Propinsi NTB terletak di jalur gunung api dunia (*ring of fire*) yang merupakan pertemuan 3 lempeng besar (India Australia, Euroasia dan Pasifik) yang menimbulkan potensi gempa bumi. Disamping itu di sebelah utara pulau Lombok terdapat patahan Flores yang merupakan salah satu patahan yang aktif. Kejadian gempa bumi mulai tanggal 29 Juli s/d Agustus 2018 telah terjadi sekitar 814 kali gempa yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal 27.039 unit, jaringan jalan 7.045 meter, 52 unit fasilitas kesehatan, 1.093 unit bangunan fasilitas pendidikan, 47 unit bangunan fasilitas peribadatan dan kerusakan fasilitas-fasilitas umum lainnya dengan nilai kerusakan diperkirakan sebesar Rp.934,002,280,000,- dengan nilai kerugian sebesar Rp.177,741,523,639,- dan total kerugian dan kerusakan Rp.1,111,743,803,639,-.

g. Kawasan Rawan Kebakaran

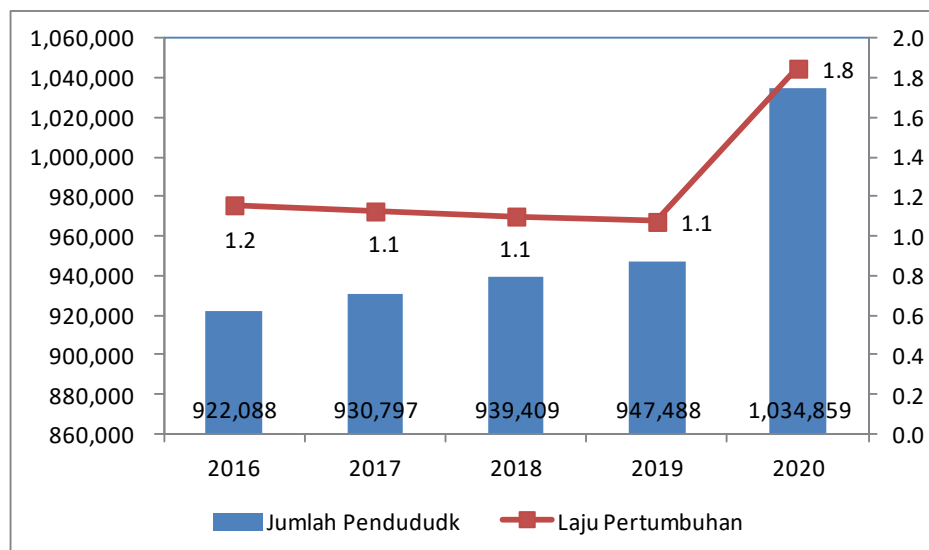
Kawasan rawan kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah berada pada kawasan permukiman terutama kawasan permukiman padat penduduk dan kawasan-kawasan pusat perekonomian.

1.1.9 Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 berjumlah 1.034.859 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tiap tahun dalam kurun waktu 2010-2020 sebesar 1,8%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren meningkat. Di tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,2% dan naik di tahun 2020 menjadi 1,8%. Adanya lonjakan peningkatan pada jumlah penduduk ini secara statistik disebabkan karena adanya perapihan data kependudukan setelah Sensus Penduduk 2020 oleh BPS. Pada Gambar 2.2 disajikan grafik yang menggambarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah 2016-2020.

Berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Lombok Tengah rentang waktu tahun 2016-2020 masih didominasi oleh kelompok usia 15-64 tahun. Fenomena ini dapat diilustrasikan melalui gambar piramida penduduk Lombok Tengah yang termasuk piramida stasioner seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3. Besarnya jumlah populasi penduduk usia

produktif ini merupakan bonus demografi yang diprediksi akan terus diterima hingga tahun 2030.



Gambar 2. 2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Sumber : BPS Lombok Tengah, 2020 (data diolah)

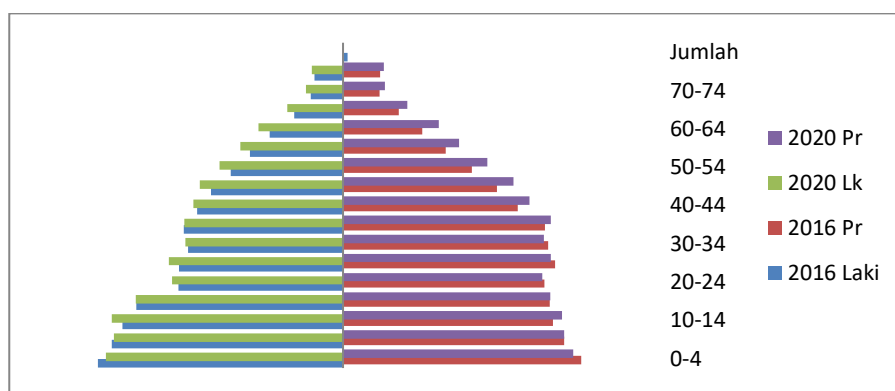
Sebagai konsekuensi adanya bonus demografi tersebut, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kelompok usia kerja memiliki proporsi terbesar sebesar 65,53 persen dengan kecenderungan besaran yang tidak berubah jika dibandingkan dengan proporsi tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Lombok Tengah karena memiliki potensi sumberdaya manusia yang cukup sehingga kebutuhan akan tenaga kerja dapat terpenuhi. Namun disisi yang lain pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja justru menimbulkan dampak meningkatnya angka pengangguran.

Tabel 2. 9 Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kelompok Usia

Usia	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	95.258	94,454	93,653	92,828	88.77
05-09	89.196	89,525	89,597	89,371	103.514
01-10	84.834	85,626	86,659	87,713	84.471
15-19	81.488	81,434	81,311	81,317	80.196
20-24	72.072	72,403	72,698	72,871	85.181
25-29	74.159	74,464	74,788	75,076	87.172
30-34	70.916	70,781	70,636	70,563	88.155
35-39	71.183	71,628	71,998	72,255	82.617
40-44	63.24	64,116	64,908	65,557	79.346
45-49	56.397	57,910	59,386	60,708	66.555
50-54	47.509	48,756	50,075	51,431	58.147
55-59	38.624	39,765	40,827	41,901	43.337
60-64	30.041	31,452	32,935	34,330	35.021
65-69	20.605	21,197	21,878	22,690	22.945
70-74	13.578	14,018	14,518	15,056	15.724
75+	12.988	13,268	13,542	13,821	13.708
Jumlah	922.088	930,797	939,409	947,488	1.034.859
Dependency Ratio (%)	52.25	51.92	51.62	51.35	46,64

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2021

Nilai rasio ketergantungan atau *dependency ratio* Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari semula 52,25% di tahun 2016 menjadi 46,64% di tahun 2020. Rasio ketergantungan ini mengisyaratkan setiap 100 orang penduduk usia tidak produktif bekerja ditanggung oleh 46,64 orang di tahun 2020. Berikut disajikan penduduk Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan kelompok usia pada kurun waktu 2016-2020.



Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 dan 2020

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2020 (diolah)

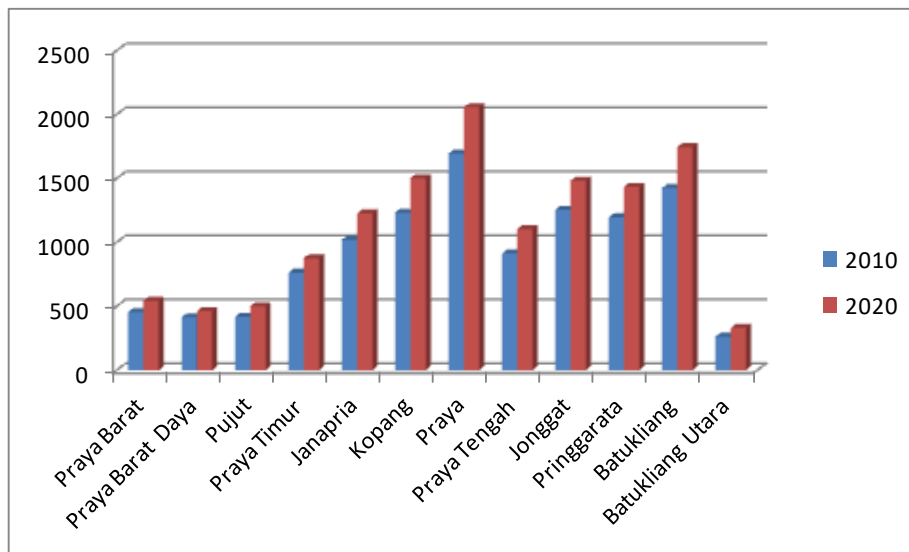
Sex ratio menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Lombok Tengah didominasi perempuan dengan sex ratio pada tahun 2020 sebesar 90 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 90 penduduk laki-laki. Sex ratio ini juga berimplikasi pada angka tingkat partisipasi angkatan kerja dimana perempuan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Persebaran penduduk jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, maka persebaran penduduk di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut diindikasikan dengan meningkatnya jumlah kepadatan penduduk setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2020 tingkat kepadatan penduduk sebesar 791 jiwa/km² dengan tingkat kepadatan tertinggi di Kecamatan Praya. Dengan semakin tingginya kepadatan penduduk maka penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah daerah harus semakin ditingkatkan melalui antara lain instrumen penataan ruang dan wilayah sehingga kedepannya mampu mewujudkan tingkat kepadatan penduduk yang proporsional. Berikut disajikan perkembangan sex ratio dan kepadatan penduduk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020.

Tabel 2. 10 Perkembangan Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk

Tahun	Jumlah		Total	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Km ²)
	Laki-Laki	Perempuan			
2016	436.155	485.933	922.088	89,76	763
2017	440.292	490.505	930.797	89,76	770
2018	444,480	494,929	939.409	89,8	777
2019	448,270	499,218	947,488	90	791
2020	514.355	520.504	1.034.859	98,8	856

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2020



Gambar 2. 4 Keperawatan Penduduk Per Kecamatan 2010 dan 2019
Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2020

1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk mendapatkan gambaran kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya yang digunakan dalam aktivitas ekonomi adalah dengan melihat Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi di suatu daerah dalam satu tahun tertentu sehingga nilai ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta, masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 dimana menurut data tahun 2019, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp.17,88 Triliun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.12,40 Triliun. Nilai PDRB turun kembali di tahun 2020 dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 16,67 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 11,57 Triliun.

Tabel 2. 11
Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	14.423.751,17	9,89	10.854.980,04	5,65
2017	15.789.214,15	9,40	11.551.693,67	6,43
2018	16.702.136,71	5,93	11.916.532,02	3,16

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2019*	17.853.805,79	6,98	12.400.273,33	4,07
2020**	16.670.395,40		11.571.990,69	- 6,68

Keterangan: *)Data Sementara, **) Data Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021

Jika dilihat dari pertumbuhan pertahunnya, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2016-2019 mengalami fluktuasi dengan laju pertumbuhan terendah pada tahun 2020 dan 2018. Rendahnya pertumbuhan PDRB di tahun 2018 adalah dampak gempa bumi yang melanda pulau Lombok pada medio Juli hingga Agustus 2018. Adapun di tahun 2020, pertumbuhan PDRB berada pada posisi minus 6,68 sebagai capaian terendah dalam beberapa dekade terakhir sebagai akibat resesi ekonomi yang melanda dunia sejak berlangsungnya pandemi global Covid-19 di sepanjang tahun 2020.

Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah masih didominasi sektor primer yakni sektor pertanian dengan kontribusi pada tahun 2019 sebesar 24,80% (ADHB) dan 25,16% (ADHK). Kontribusi sektor ini turun jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 25,96%. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas panen akibat alih fungsi lahan sawah serta perubahan cuaca pada beberapa tahun terakhir yang menyebabkan curah hujan menurun sehingga berpengaruh signifikan terhadap hasil pertanian.

Sektor kedua yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sektor transportasi dan pengangkutan sebesar 17,33% (ADHB) dan 14,96% (ADHK). Sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya berkisar antara 0,05% - 12,19%. Berikut adalah kontribusi masing-masing sektor dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. 12
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020

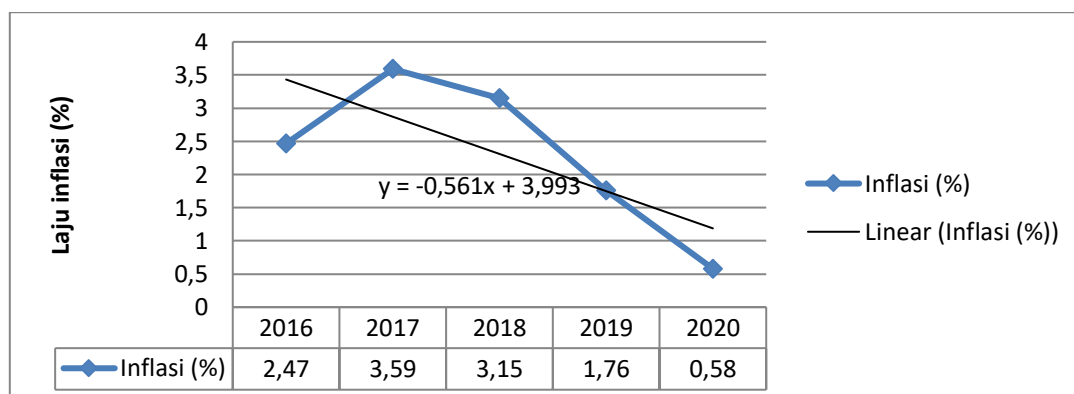
No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	25,96	25,97	25,75	25,16	26,8
2	Pertambangan dan Penggalian	4,34	4,37	4,48	4,86	5,31
3	Industri Pengolahan	5,73	5,63	5,54	5,51	5,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,07	0,08	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12
6	Konstruksi	12,71	12,8	13,09	14,45	16
7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,95	11,09	11,37	11,61	11,75
8	Transportasi dan Pengangkutan	17,25	17,19	16,5	14,97	8,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,07	1,08	1,07	1,05	0,89

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
10	Informasi dan Komunikasi	1,80	1.82	1.86	1.86	2.25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,00	2.1	2.17	2.12	2.59
12	Real Estate	3,44	3.45	3.51	3.54	3.85
13	Jasa Perusahaan	0,15	0.14	0.15	0.15	0.15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	5.05	4.93	4.9	5.41
15	Jasa Pendidikan	4,38	4.35	4.46	4.59	4.98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,49	2.48	2.59	2.65	2.84
17	Jasa Lainnya	2,29	2.29	2.34	2.38	2.4
	Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Lombok Tengah, 2021

1.2.1.2 Laju Inflasi

Besaran laju inflasi Kabupaten Lombok Tengah menggunakan besaran laju inflasi Kota Mataram karena perhitungan laju inflasi oleh BPS di Nusa Tenggara Barat hanya dilakukan di dua kota yaitu Mataram dan Bima. Berdasarkan pendekatan tersebut, laju inflasi di Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu tahun 2016-2020 diketahui mengalami fluktuasi sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah. Grafik tersebut menunjukkan penurunan laju inflasi dengan nilai persamaan $Y = -0,561x + 3,993$. Secara aktual nilai inflasi pada tahun 2016 sebesar 2,47%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,58%.



Gambar 2. 5 Laju Inflasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2020

Sumber : BPS NTB, 2021

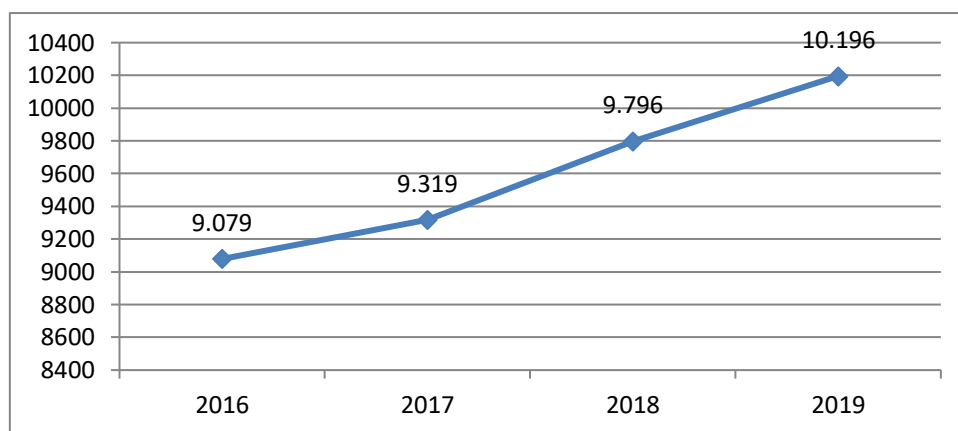
Fluktuasi angka laju inflasi daerah ini telah disikapi oleh pemerintah daerah dengan upaya pengendalian agar inflasi yang terjadi tetap berada dalam batas aman . Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan OPD terkait, pemerintah daerah menerapkan kebijakan 4K yaitu menjaga [K]etersediaan pasokan, menjamin [K]elancaran distribusi komoditas, menjalin [K]omunikasi yang efektif, dan menjamin [K]eterjangkauan harga di tingkat konsumen salah satunya dengan pelaksanaan operasi pasar.

1.2.1.3 Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar

wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Daya beli juga menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi penduduk.

Berdasarkan kajian BPS (2019), daya beli masyarakat Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019. Pada tahun 2016, daya beli masyarakat berkisar pada angka Rp. 9,07 Juta sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp. 10,19 juta. Peningkatan daya beli masyarakat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Berikut ditampilkan perkembangan daya beli masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019.



Gambar 2. 6 Perkembangan Daya Beli Masyarakat Pertahun Selama Kurun Waktu 2016-2019 (Ribu Rupiah)

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2019

1.2.1.4 Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan positif pada kurun waktu 2016-2020 dari Rp.11.771.000 pada tahun 2016 menjadi Rp 12.112.000 pada tahun 2020. Adapun perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 13 PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB Perkapita (Juta Rp)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010
2016	15,915	11,771
2017	17,440	12,415
2018	17,779	12.685
2019*)	18,843	13.088
2020**)	17.448	12.112

Keterangan: *)Data Sementara, **) Data Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021

1.2.1.5 Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan pada kurun waktu 2016-2020 baik secara absolut maupun relatif. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase	P1 (Kedalaman)	P2 (Keparahan)
2016	145.370	15,80	2,74	0,64
2017	142.412	15,31	2,81	0,75
2018	130.000	13,87	2,31	0,54
2019	128.820	13,63	1,56	0,23
2020	128.100	13,44	1,42	0,26

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021

Penurunan jumlah penduduk miskin Lombok Tengah sebesar 2,36% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Indikator kemiskinan lainnya juga menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masing-masing menurun rata-rata sebesar -0,33 per tahun dan rata-rata -0,095 per tahun dalam kurun waktu terakhir. Data ini menunjukkan kinerja program-program pengentasan kemiskinan membuahkan hasil yang positif. Meskipun masih banyak peluang untuk memaksimalkan penurunan jumlah penduduk miskin, Kedalaman dan Keparahan.

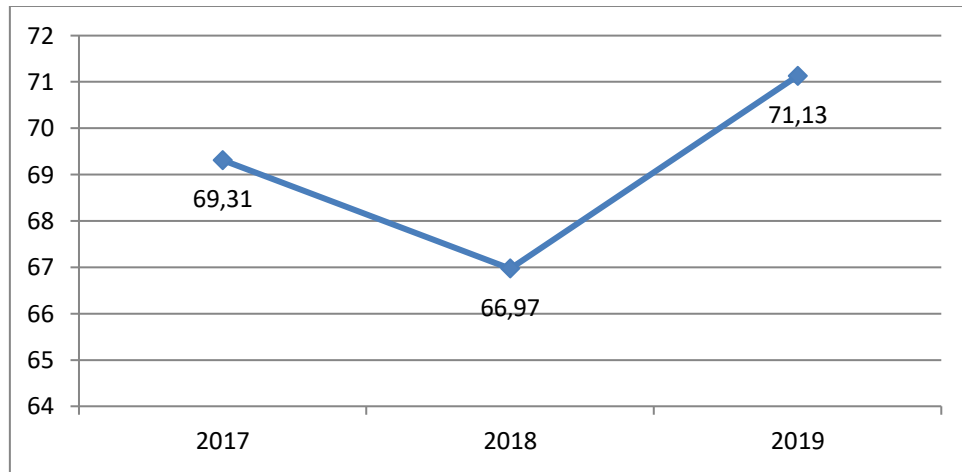
Tabel 2. 15 Garis Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp.)
2016	357.337
2017	369.645
2018	386.676
2019	404.633
2020	421.439

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2020

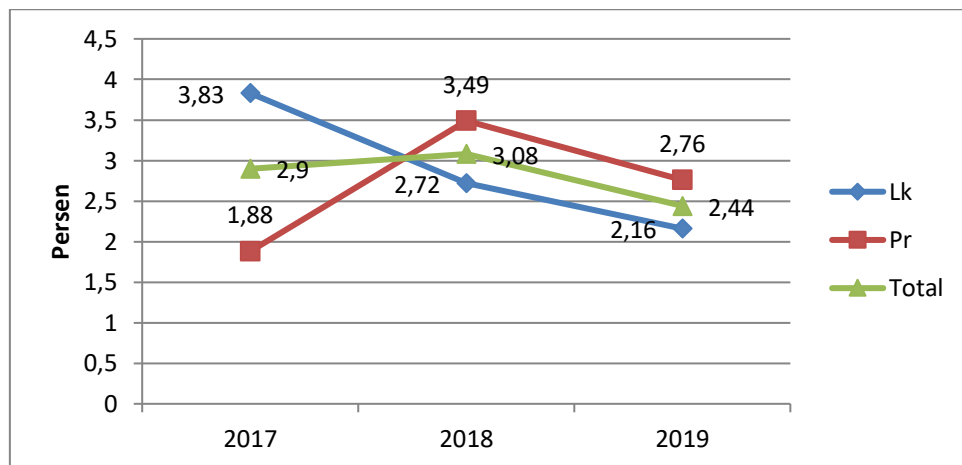
1.2.1.6 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran

Partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang menggambarkan besaran persentase penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi baik bekerja maupun mencari kerja atau mempersiapkan usaha. Jika melihat perkembangannya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Lombok Tengah dari tahun 2017 ke tahun 2019 berfluktuatif. TPAK terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 66,97 % yang dapat dirinci nilai TPAK perempuan 57,38% sedangkan TPAK laki-laki 78,30%.



Gambar 2. 7 Perkembangan TPAK di Kabupaten Lombok Tengah
 Sumber: Lombok Tengah Dalam Data, Tahun 2020

Jika dibandingkan data pengangguran tiap tahunnya, angka pengangguran laki-laki di tahun 2017 cenderung lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran perempuan. Ini berarti perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi memiliki kecenderungan untuk terserap di lapangan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi berbalik di tahun 2018 dan 2019 yang menunjukkan tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dari angka pengangguran laki-laki. Perkembangan tingkat pengangguran menurut jenis kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2. 8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2019
 Sumber: Inkesra Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

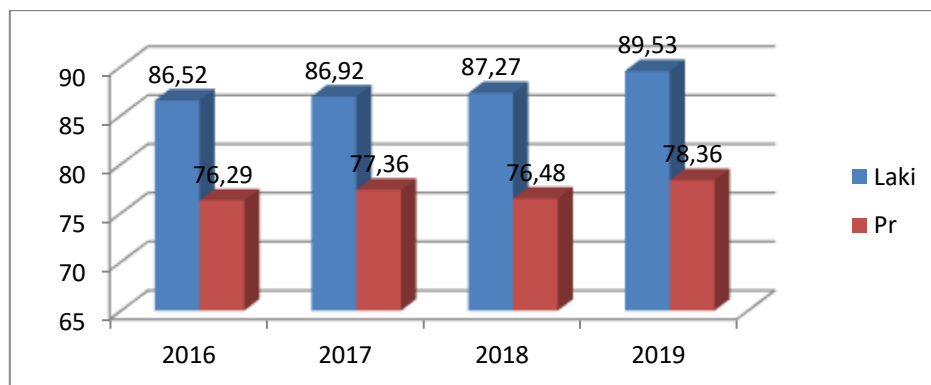
1.2.2.1 Pendidikan

(a) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk 15 tahun keatas menunjukkan keadaan yang meningkat dari tahun 2016-2019. Nilai AMH dapat dilihat berdasarkan klasifikasi jenis kelamin di Kabupaten Lombok Tengah. Persentase jumlah penduduk laki-laki yang melek huruf terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019. Kondisi di tahun 2019, penduduk

laki-laki yang melek huruf sebanyak 87,27 persen. Pencapaian penduduk laki-laki ini lebih tinggi dari penduduk perempuan dengan selisih mencapai 10,79 persen.

Angka melek huruf perempuan yang lebih rendah ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi kelompok perempuan dalam pendidikan. Capaian ini menunjukkan pula kecenderungan penduduk perempuan masih terkukung dalam budaya patriarki di lingkungannya. Budaya patriarki yang kuat menyebabkan perempuan tersubordinasi dalam pembagian kerja yang tidak proporsional. Hingga saat ini perempuan masih dituntut untuk lebih mengutamakan urusan domestik rumah tangga sehingga setiap kesempatan untuk pengembangan diri seperti mengikuti pelatihan keaksaraan fungsional tidak dianggap penting. Selain faktor kultural, rendahnya melek huruf perempuan secara pragmatis juga disebabkan oleh alasan ekonomi yang menyebabkan perempuan lebih banyak memilih institusi pernikahan sebagai pelarian dari tuntutan ekonomi keluarga yang menghimpit serta mengabaikan kesempatan lain untuk meningkatkan kualitas pribadi melalui pendidikan.



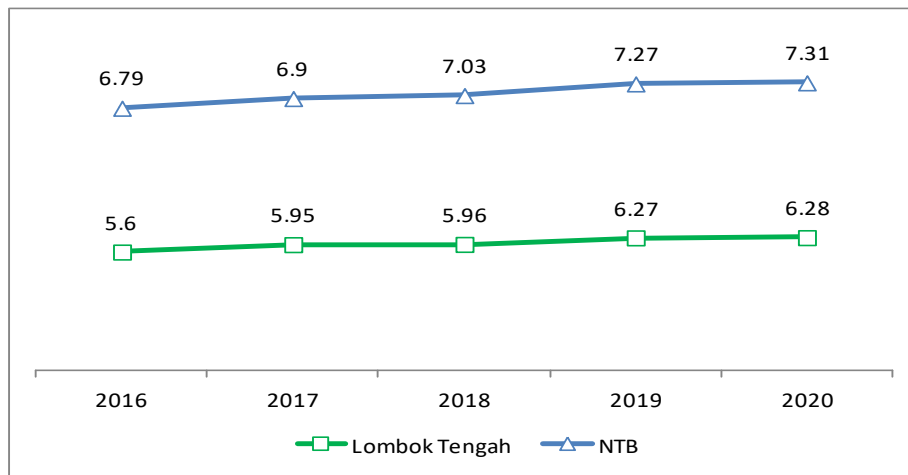
Gambar 2. 9 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2016-2019

Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2019

Adanya ketimpangan angka melek huruf penduduk laki-laki dan perempuan ini menjadi tantangan tersendiri untuk pembangunan daerah Lombok Tengah ke depan. Oleh karena itu maka akses kelompok perempuan terhadap pendidikan masih perlu ditingkatkan. Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas tahun 2016-2019 dapat dilihat sebagaimana gambar grafik di atas.

(b) Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator penting dalam pendidikan lainnya yakni rata-rata lama sekolah. Selama periode 2016-2020, rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Tengah mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah naik dari 5,52 tahun pada tahun 2014 menjadi 6,28 tahun pada tahun 2020. Meskipun rata-rata lama sekolah Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat, nilai rata-rata lama sekolah di Lombok Tengah masih tetap berada di bawah capaian Provinsi NTB.

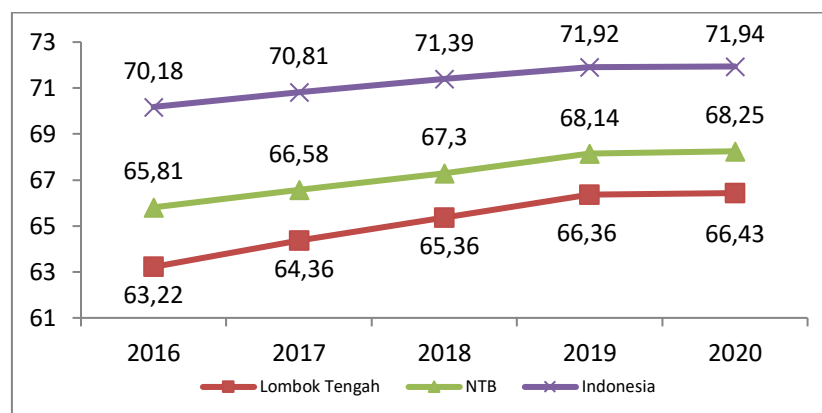


Gambar 2. 10 Rata-rata Lama sekolah Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Lombok Tengah, 2021

1.2.2.2 IPM

Secara umum pembangunan manusia di Lombok Tengah selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, IPM Lombok Tengah tercatat sebesar 63,22 dan terus meningkat hingga mencapai 66,43 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk Lombok Tengah semakin membaik.



Gambar 2. 11 IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

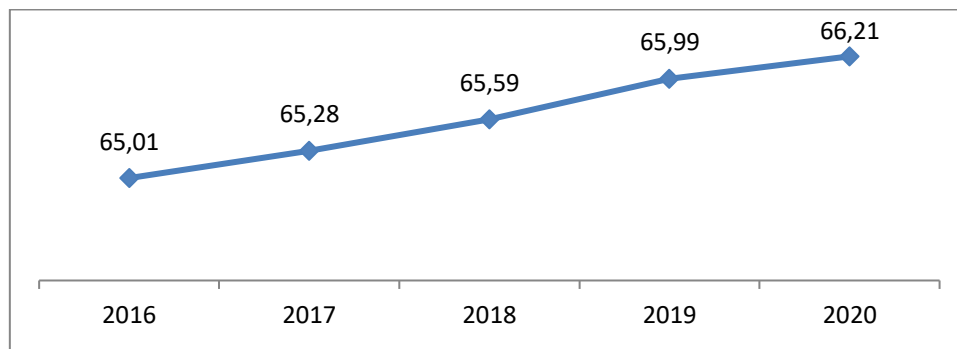
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2021

1.2.2.3 Kesehatan

(a) Angka Harapan Hidup

Dalam kurun waktu 2016-2020, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup Lombok Tengah mencapai 65,01 tahun yang berarti anak yang lahir di Lombok Tengah berpeluang untuk hidup hingga berusia 65,01 tahun. Angka harapan hidup tersebut terus meningkat hingga mencapai 65,28 pada tahun 2017. Peningkatan terendah terlihat pada periode 2016 – 2017 dimana angka harapan hidup hanya bertambah 0,17

poin. Pada tahun 2020 angka harapan hidup tercatat 66,21 tahun. Angka ini meningkat sebesar 0,22 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019.



Gambar 2. 12 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, Tahun 2021

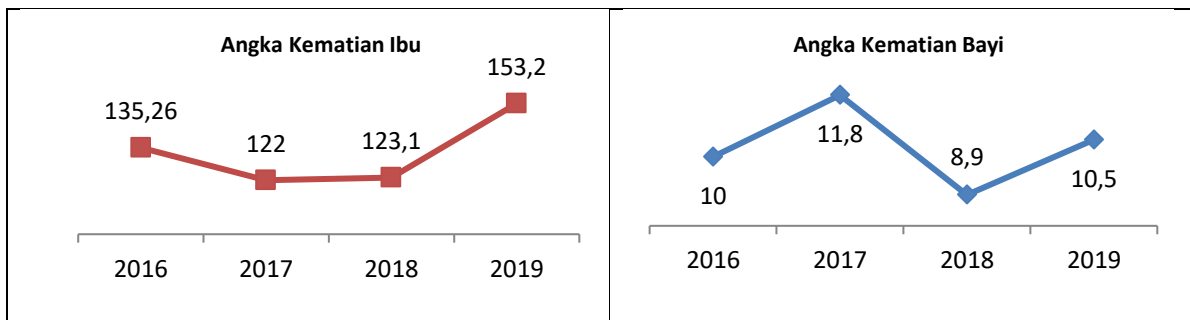
Angka harapan hidup ini sangat berkaitan dengan angka kematian bayi, dikarenakan penghitungannya menggunakan pendekatan tidak langsung melalui metode *trusset* dengan model *West*, dimana salah satu indikator kunci adalah angka anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Dengan demikian untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat ini harus diupayakan dengan cara menekan angka kematian bayi.

(b) Angka Kematian Ibu dan Bayi

Salah satu pembentuk angka harapan hidup adalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Angka kematian ibu merupakan perbandingan antara jumlah kematian ibu sampai dengan 42 hari sejak melahirkan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup dikali 100.000, sedangkan angka kematian bayi merupakan perbandingan antara jumlah kematian bayi dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup dikali 1.000.

Sepanjang tahun 2016-2019, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Lombok Tengah mengalami fluktuasi. Angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan 153,2 kasus dari 100.000 kelahiran hidup di tahun tersebut. Angka ini diperoleh dari jumlah kasus kematian ibu melahirkan sebanyak 30 kasus dan 19.577 kelahiran hidup. Angka kematian bayi juga menunjukkan tren meningkat di tahun 2019. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka kematian bayi di tahun 2019 naik 1,6 poin sehingga angka kematian bayi di tahun 2019 sebesar 10,5 per 1.000 kelahiran hidup.

Rendahnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan ibu dan bayi menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh sehingga hal ini perlu menjadi perhatian (prioritas) dalam perencanaan program kegiatan kesehatan khususnya dalam rangka penurunan AKI dan AKB. Perkembangan kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 2. 13 Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Lombok Tengah
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2019

1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Lombok Tengah tetap menjadi penekanan oleh pemerintah sebab merupakan sektor pendukung untuk fokus-fokus pembangunan utama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 16 Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Lombok Tengah

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atraksi budaya yang memadukan keanekaragaman	5	5	10	12	10
2	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	16	16	16	16	16
3	Sanggar seni yang aktif	11	14	21	27	21

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, 2020

Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Lombok Tengah telah mengembangkan pembinaan terhadap kesenian/budaya daerah yang meliputi atraksi budaya, pelestarian situs dan cagar budaya serta sanggar seni yang aktif. Atraksi budaya dan sanggar seni yang aktif mengalami peningkatan kuantitas yang ditunjukkan dengan tumbuhnya sanggar-sanggar seni. Sedangkan untuk benda situs dan kawasan cagar budaya mengalami peningkatan kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan terus menerus secara bertahap.

Pada fokus pembangunan bidang keolahragaan Pemerintah Daerah telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1). Pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten melalui kegiatan olimpiade olahraga dan seni nasional (O2SN); (2). Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten. (3). Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; (4). Pembinaan dan pengembangan organisasi olahragatingkat kabupaten. Untuk pelaksanaan point 2, 3 dan 4 melalui program kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Tengah.

1.3 Aspek Pelayanan Umum

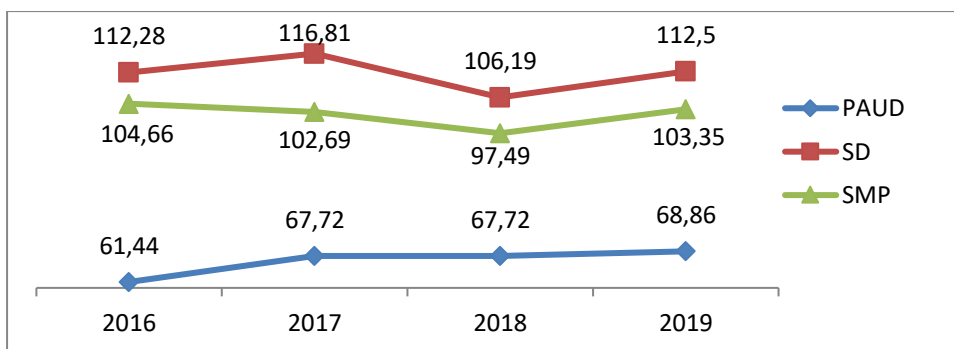
1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1.3.1.1 Pendidikan

Hasil penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro. Secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan jumlah siswa putus sekolah.

(a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar menunjukkan tren fluktuatif selama kurun waktu 2016-2019. APK PAUD mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019 yaitu dari 61,44% hingga 68,86%. Sedangkan APK SD/MI/MTs dari tahun 2016-2019 lebih bergerak fluktuatif karena mengalami penurunan di tahun 2018 dan bergerak naik lagi di tahun 2019.

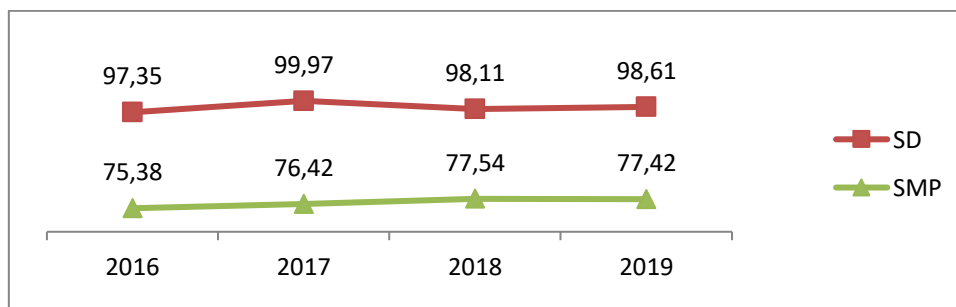


Gambar 2. 14 APK PAUD dan Pendidikan Dasar Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah, 2020

(b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2016-2019. APM SMP/MTs mengalami peningkatan paling tinggi yaitu 76,42 pada tahun 2017 menjadi 77,54 pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan pencapaian provinsi NTB, APM SMP/MTs di Lombok Tengah masih rendah. APM SMP/MTs Provinsi NTB di tahun 2019 sebesar 83,92 sehingga APM SMP/Mts Lombok Tengah berada 6,5 poin lebih rendah di bawah Provinsi NTB.



Gambar 2. 15 APM Pendidikan Dasar Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

(c) Jumlah Siswa Putus Sekolah

Jumlah siswa putus sekolah SD meningkat dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak 9 orang dan kembali turun tahun 2019 dengan jumlah 109 orang siswa. Jumlah siswa putus sekolah SMP menunjukkan tren meningkat tajam dari 68 siswa di tahun 2017 menjadi 327 siswa di tahun 2019. Jumlah siswa SMP putus sekolah dengan demikian meningkat hingga 4 kali lipat hanya dalam waktu 3 tahun terakhir. Berikut disajikan perkembangan angka putus sekolah tahun 2016-2019.

Tabel 2. 17
Jumlah Siswa Putus Sekolah Tahun 2016-2019

Jenjang	2016	2017	2018	2019
SD	n/a	126	135	109
SMP	n/a	68	313	327

Sumber: Neraca Pendidikan Kab. Lombok Tengah Tahun 2019

Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Lombok Tengah patut diduga berkaitan dengan beberapa hal. Dari sisi ekonomi, persoalan kemiskinan masih menjadi penghalang anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya. Kultur kebiasaan pada masyarakat miskin menyebabkan mereka meninggalkan sekolah untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, tingginya kasus pernikahan anak juga menyumbang tingginya angka putus sekolah. Penanganan angka putus sekolah ini membutuhkan kebijakan yang bersifat multidimensi dan harus bebas dari bias sektoral.

Tingginya angka putus sekolah tidak berkaitan dengan ketersediaan sarana pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah ataupun swasta dikarenakan ketersediaan sarana pendidikan di Lombok Tengah sudah cukup baik dan hanya perlu meningkatkan kualitas pelayanan saja. Pada tahun 2019 terdapat 1.732 unit sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMA/SMK yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Provinsi untuk menampung 180.934 orang siswa.

Tabel 2. 18
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2019

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Guru : Murid
1	PAUD	829	40.07	2.976	1:13
2	SD	605	90.367	5.475	1:17
3	SLTP	177	24.661	2.45	1:10
4	SMU	55	14.101	1.069	1:13
5	SMK	62	11.444	927	1:12
6	SLB	4	291	55	1:05
	2019	1.732	180.934	12.952	
	2018	1.965	180.452	10.896	
	2017	1.66	172.279	12.958	
	2016	1.176	154.359	11.988	

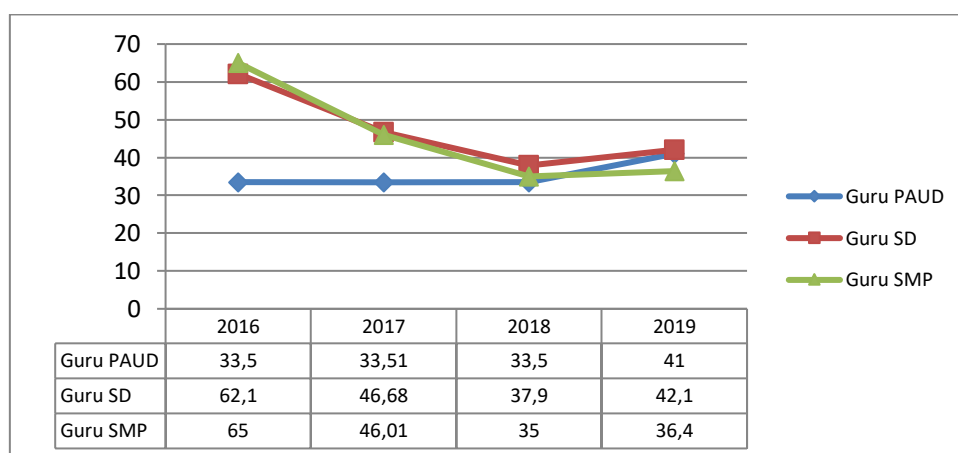
Sumber: Lombok Tengah Dalam Angka, 2020

Nilai rasio guru murid digunakan untuk melihat kapasitas guru berdasarkan jumlah murid yang tersedia. Berdasarkan standar Permendikbud 23 Tahun 2013, untuk satu guru SD mengampu tidak lebih dari 32 murid dan satu guru di tingkat SMP diharapkan dapat mengampu tidak lebih dari 36 murid. Adapun berdasarkan Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, satu guru mengampu tidak lebih dari 15 murid PAUD yang berusia 4-6 tahun. Di jenjang SMA dan SMK, standar yang berlaku satu orang guru memiliki beban tidak lebih dari 20 murid. Dengan melihat standar yang berlaku, dapat disimpulkan rasio guru murid di Lombok Tengah telah memenuhi standar kelayakan.

Namun jika melihat distribusi guru PNS di lembaga-lembaga sekolah yang ada, perlu dilakukan pemerataan guru PNS baik di lembaga SD maupun SMP. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah 2019, indeks pemerataan guru kelas SD sebesar 0,24 sedangkan indeks pemerataan guru mata pelajaran SD sebesar 0,46. Pada tingkat SMP, indeks pemerataan guru mata pelajaran yang di-UN-kan sebesar 0,38 sementara pemerataan guru mata pelajaran yang tidak di-UN-kan memiliki indeks sebesar 0,57. Nilai indeks pemerataan guru yang lebih besar dari 0 menunjukkan distribusi guru PNS belum merata.

(d) Sertifikasi Guru

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah adalah dengan melihat kualitas pendidikannya. Kualitas pendidik dapat diukur salah satunya dengan pendekatan sertifikasi guru. Sertifikasi guru secara umum bertujuan meningkatkan kualitas guru sebagai pendidik dalam segala aspek atas bidang profesinya dalam kependidikan.



Gambar 2. 16 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah, 2020

Persentase guru yang telah mendapatkan sertifikasi guru untuk jenjang PAUD terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019 dari semula 33,5 persen di tahun 2016 menjadi 41 persen di tahun 2019. Adapun jumlah guru yang tersertifikasi untuk jenjang SD dan SMP mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2018 namun kembali meningkat di

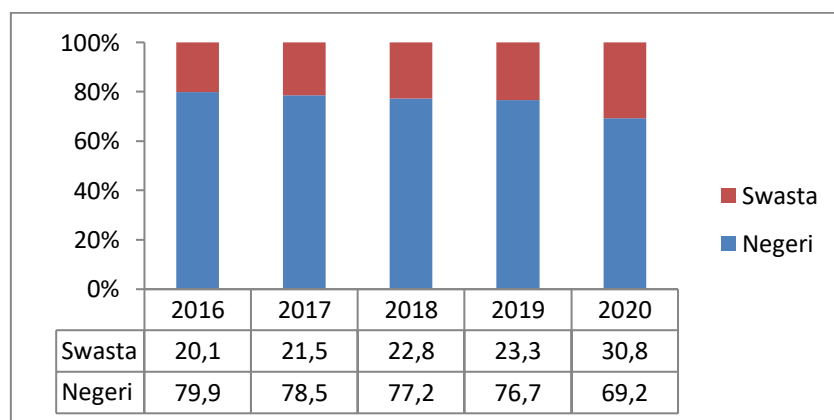
tahun 2019. Di tahun 2019, persentase guru SD yang tersertifikasi adalah 42,1 persen sedangkan guru SMP yang bersertifikat sebanyak 42,1 persen.

Masih rendahnya persentase guru bersertifikat di jenjang TK, SD dan SMP menunjukkan masih tingginya jumlah guru yang belum memperoleh sertifikasi guru dalam mengemban tugas mulia. Untuk menjamin kualitas pendidikan yang semakin baik, jumlah dan sebaran guru bersertifikasi ini harus ditingkatkan untuk pengembangan profesi pendidik dan kependidikan di Kabupaten Lombok Tengah.

(e) Kualifikasi Lembaga Pendidikan

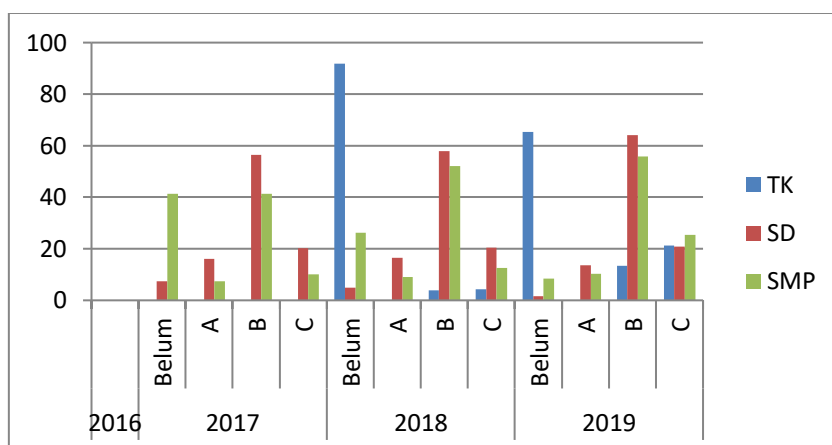
Sampai dengan tahun 2020 terdapat 1.162 unit sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut 1.004 unit sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah untuk jenjang TK, SD dan SMP baik negeri maupun swasta.

Jumlah lembaga pendidikan berupa sekolah swasta di Lombok Tengah terus mengalami peningkatan bahkan melampaui peningkatan yang dialami sekolah negeri. Di tahun 2016, dari 870 lembaga mulai TK hingga SMA/SMK sebanyak 79,9 persen merupakan sekolah negeri sisanya 20,1 persen adalah swasta. Kondisi ini menunjukkan peningkatan di tahun 2020 dimana dari 1.162 lembaga yang ada sebanyak 69,2 persen adalah sekolah negeri dan 30,8 persen adalah swasta. Semakin besarnya kontribusi yang disumbangkan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan menunjukkan makin tingginya animo masyarakat untuk ikut terlibat dalam upaya pembangunan SDM di kabupaten ini. Pihak swasta yang banyak terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Lombok Tengah mencakup beberapa lembaga yayasan baik berupa yayasan keagamaan, sosial ataupun kemanusiaan.



Gambar 2. 17 Persentase Jumlah Sekolah Berdasarkan Status di Kabupaten Lombok Tengah 2016 – 2020

Sumber : dapokemdikbud.go.id, 2020, diolah



Gambar 2. 18 Persentase Sekolah Berdasarkan Akreditasi di Kabupaten Lombok Tengah 2017-2019

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, 2019

Sampai dengan tahun 2019, masih terdapat 65,4 persen TK/PAUD yang belum terakreditasi dan belum ada yang memperoleh predikat akreditasi A di tahun 2019. Pada jenjang SD, baru 13,6 persen yang sudah terakreditasi A dan sebagian besar masih pada level akreditasi B. Hanya 1,5 persen lembaga pendidikan SD di Kabupaten Lombok Tengah yang belum terakreditasi.

Jumlah lembaga SMP yang terakreditasi di Lombok Tengah lebih sedikit dari capaian akreditasi pada jenjang SD. Masih terdapat 8,5 persen SMP yang belum terakreditasi sampai tahun 2019. Hanya 10,2 persen SMP yang memperoleh akreditasi A dan lebih didominasi oleh SMP terakreditasi B dan C dengan jumlah mencapai 55,9 persen dan 25,4 persen. Jika melihat tren yang terjadi dari tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang cukup baik dalam capaian akreditasi sekolah di kabupaten Lombok Tengah.

1.3.1.2 Kesehatan

(a) Rasio Posyandu per 100 Balita

Posyandu adalah wadah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita pada khususnya. Peran posyandu sangat penting dalam upaya pemantauan tumbuh kembang balita. Dengan adanya pemantauan perkembangan bayi dan balita ini diharapkan mampu mengidentifikasi adanya gangguan pertumbuhan sejak dini bagi anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. 19 Rasio Posyandu Per 100 Balita Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019

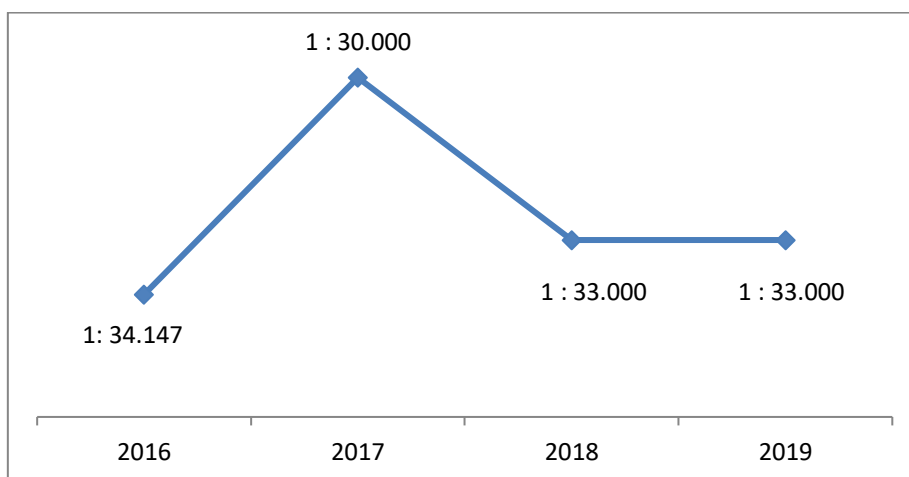
No	Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio Posyandu per 100 balita
1	2016	1.624	61.324	2,65
2	2017	1.653	56.507	2,93
3	2018	1.682	57.271	2,94
4	2019	1.686	59.271	2,84

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2021

Standar rasio posyandu menurut Kementerian Kesehatan adalah 1 posyandu untuk 50 balita atau dengan persamaan lain minimal ada 2 posyandu untuk 100 balita. Dengan melihat tren rasio posyandu per 100 balita di Kabupaten Lombok Tengah, dapat diketahui di tahun 2016 terdapat 1,65 unit posyandu untuk menangani 100 balita dan sampai tahun 2019 tercatat 2,84 posyandu yang menangani 100 balita. Rasio ini menunjukkan jumlah posyandu di Lombok Tengah sudah memenuhi standar rasio sebagaimana dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan.

(b) Rasio Puskesmas

Sampai dengan tahun 2019, jumlah puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat hingga menjadi 28 unit. Rasio puskesmas terhadap penduduk sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah. Perkembangan rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sampai dengan tahun 2019 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 2. 19 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 2019

Rasio ketersediaan puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2020 menurut aturan dari Kementerian Kesehatan masih belum memadai. Idealnya, rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah adalah 1:30.000. Saat ini Kabupaten Lombok Tengah memiliki 28 Puskesmas, jumlah ini diharapkan dapat meningkat menjadi 35 puskesmas untuk dapat memenuhi rasio ideal. Peningkatan jumlah puskesmas diharapkan akan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Keberadaan Puskesmas selain memiliki fungsi kuratif juga berperan dalam menjalankan fungsi preventif. Peningkatan jumlah puskesmas diharapkan akan dapat berimplikasi pada optimalisasi implementasi fungsi

puskesmas tersebut, apalagi saat ini tren atau kecenderungan perkembangan penyakit yang terjadi di kalangan masyarakat adalah penyakit tidak menular.

Disamping intervensi terhadap puskesmas, peningkatan kualitas layanan RSUD menjadi hal penting sebagai wujud dukungan pelayanan kesehatan di tingkat rujukan. Layanan Puskesmas dan RSUD bersifat saling melengkapi sehingga keberadaan puskesmas yang ada harus pula ditopang oleh peningkatan layanan tingkat rujukan di rumah sakit. Tuntutan ini menjadi penting mengingat sejumlah fasilitas kesehatan telah mengalami peningkatan di tahun 2019 baik berupa puskesmas pembantu, polindes dan posyandu. Berikut disajikan perkembangan jumlah sarana kesehatan tahun 2016-2019.

Tabel 2. 20
Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2016-2020

Kecamatan	Puskesmas*	Puskesmas Pembantu	Polindes*	Posyandu**
1. Praya Barat	3	7	8	126
2. Praya Barat Daya	2	8	9	128
3. P u j u t	3	12	15	204
4. Praya Timur	2	8	8	174
5. Janapria	2	7	11	143
6. K o p a n g	3	7	8	135
7. P r a y a	2	6	15	149
8. Praya Tengah	2	7	12	117
9. Jonggat	3	9	12	148
10. Pringgarata	2	4	10	124
11. Batukliang	2	6	8	147
12. Batukliang Utara	2	5	7	91
Jumlah 2020	28	86	123	1.686
2019	28	89	123	1.686
2018	28	95	123	1.668
2017	28	95	124	1.586
2016	28	97	124	1.624

Sumber: *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, 2019

** BPS Lombok Tengah, 2021

Unsur penunjang fasilitas kesehatan lainnya yang tidak kalah penting adalah tenaga kesehatan. Pada tahun 2019 jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 44 orang tenaga medis/dokter, 511 orang tenaga perawat dan 313 orang tenaga kebidanan.

Tabel 2. 21 Jumlah Tenaga Medis Yang Tersebar di Puskesmas Tahun 2016-2020

Tahun	Tenaga Medis/Dokter	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan
2016	44	491	272
2017	44	491	271
2018	132	830	431
2019	132	830	431
2020	44	511	313

Sumber: Lombok Tengah Dalam Data, 2020

(c) Puskesmas PONED

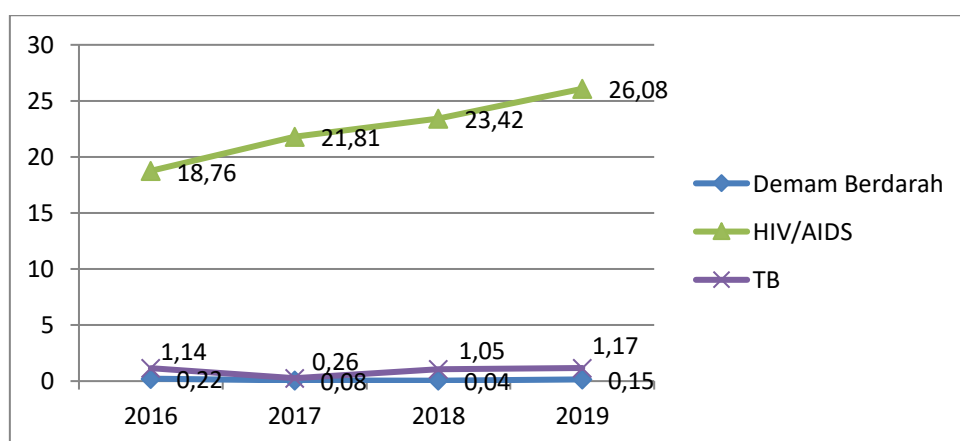
Kesehatan ibu melahirkan dan bayi adalah salah satu isu besar dalam dunia kesehatan. Salah satu strategi penanggulangan resiko pada ibu dan bayi adalah dengan menggalakkan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar). Puskesmas PONED adalah puskesmas yang memiliki fasilitas atau kemampuan untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar serta termasuk dalam Puskesmas yang harus siap 24 jam.

Dari tahun 2016 hingga 2019, dari 28 jumlah puskesmas terdapat 11 puskesmas berstatus PONED di Kabupaten Lombok Tengah. Tidak ada perubahan status PONED pada 11 puskesmas tersebut dari tahun ke tahun yaitu Puskesmas Praya, Puskesmas Pringgarata, Puskesmas Mujur, Puskesmas Janapria, Puskesmas Sengkol, Puskesmas Ubung, Puskesmas Kopang, Puskesmas Mantang, Puskesmas Teratak, Puskesmas Penujak dan Puskesmas Puyung.

(d) Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular

Penemuan kasus TB yang dihitung menurut CDR (*Case Detection Rate*) yang ditargetkan sebesar 70%. Prevalensi TB meningkat dari 1,14 persen di tahun 2016 menjadi 1,17 persen di tahun 2019. Di tahun 2017 dan 2018 prevalensi TB sempat turun hingga mencapai angka 0,26 persen di tahun 2017. Prevalensi HIV/AIDS menunjukkan tren meningkat dari tahun 2016 hingga 2019. Di tahun 2016 angka prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 18,76 persen dan meningkat dari tahun ke tahun hingga di tahun 2019 mencapai angka 26,08 persen.

Untuk penyakit menular lainnya seperti malaria, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 API (*Annual Parasite Incidens*) kurang dari 1 per mil. Hal tersebut berarti bahwa hanya boleh ada 1 kasus setiap seribu penduduk serta tidak ada laporan kematian karena malaria.

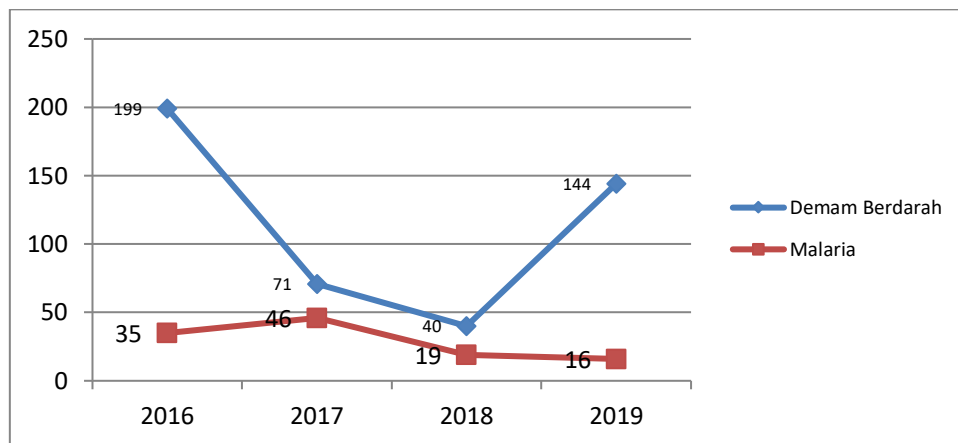


Gambar 2. 20 Prevalensi Penyakit Menular 2016-2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 2020

Kasus demam berdarah dengue (DBD) yang terjadi sepanjang tahun 2016 hingga 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2016 kejadian DBD sebanyak 199 kasus dan menurun

pada tahun 2017 menjadi 71 kasus. Angka ini meningkat tajam di tahun 2019 menjadi 144 kasus. Dibandingkan DBD, penyakit malaria memiliki kecenderungan menurun di tahun 2019 dari 35 kasus sebelumnya di tahun 2016 menjadi 16 kasus di tahun 2019.



Gambar 2. 21 Jumlah Kasus Demam Berdarah dan Malaria Tahun 2016-2019

Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2019

Selain dari jumlah kasus beberapa jenis penyakit menular, kesehatan masyarakat dapat dilihat juga dari penemuan kasus penyakit tidak menular yang dilaporkan di Kabupaten Lombok Tengah. Di tahun 2019, jenis penyakit tidak menular dengan angka prevalensi terbesar adalah hipertensi (10,79%), Diabetes Militus (4,17%), dan kesehatan indera (2,88%). Perhatian kepada jumlah kasus penyakit tidak menular diharapkan mempertajam arah pembangunan daerah untuk menyetatkan masyarakat secara paripurna karena jumlah kematian akibat penyakit tidak menular di dunia mencapai 70% jika dibandingkan kasus kematian akibat penyakit menular.

Tabel 2. 22 Prevalensi Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Lombok Tengah

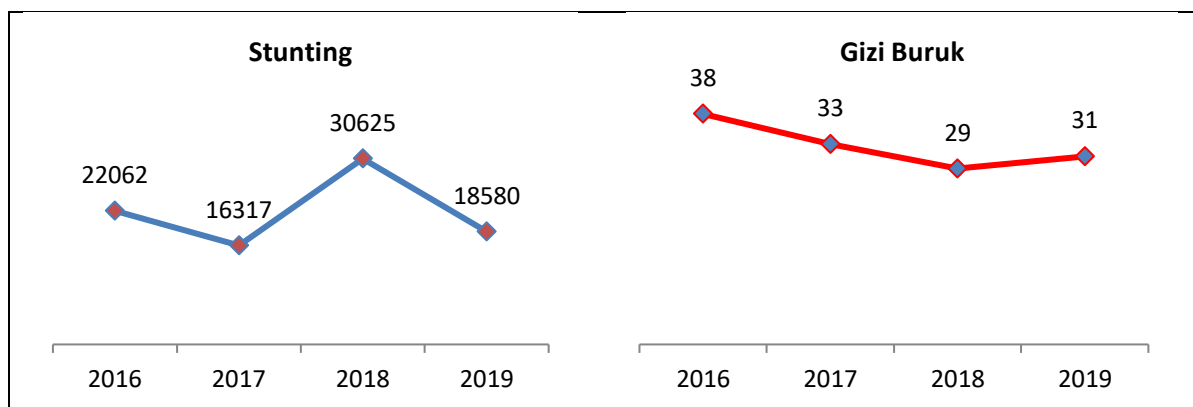
Jenis Penyakit	2016	2017	2018	2019
Hipertensi	0.61	0.88	6.2	10.79
Jantung Koroner	0	0.02	0.04	0.11
Gagal jantung	0	0	0.15	0.14
DM	0.21	0.57	2.54	4.17
Obesitas	0.02	0.13	0.25	0.65
Penyakit tiroid	0	0	0.05	0.05
Stroke	0	0	0.27	0.23
Asma Bronchiale	0.26	0.47	1.72	2.74
SLE	0	0	0.01	0.05
Thalaasemia	0	0	0.06	0.01
PPOK	0	0	0.07	0.28
Osteoporosis	0	0	1.16	2.24
Ginjal kronik	0	0	0.07	0.23
Tumor Payudara	0	0	0.02	0.08

Jenis Penyakit	2016	2017	2018	2019
Retinoblastoma	0	0	0	0
Leukemia	0	0	0.01	0
Kanker serviks	0	0	0	0.04
Cedera kibat kecelakaan lalin	0.11	0.26	1.4	1.87
Cedera akibat KDRT	0	0	0.04	0.09
Cedera akibat lain	0.01	0.03	0.38	0.85
Gangguan jiwa berat	0	0	2.14	2.62
Kesehatan indera (jml kasus katarak)	0	0	3.1	2.88

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2020

(e) Stunting dan Gizi Buruk

Stunting adalah masalah kesehatan yang sangat mengancam ketangguhan generasi masa depan. Stunting dimaknai sebagai permasalahan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama, umumnya hal ini karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun.



Gambar 2. 22 Jumlah Kasus Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2020

Persentase balita yang menderita stunting di NTB mencapai 33%. Angka ini berarti satu dari tiga balita di NTB bertubuh pendek di bawah rata-rata usianya karena kekurangan gizi kronis. Persentase balita stunting di NTB ini melebihi angka prevalensi nasional yaitu 30,8%. Sebagai salah satu kabupaten di NTB, Lombok Tengah menyumbang jumlah kasus stunting yang cukup tinggi karena pada tahun 2018 sebanyak 30.625 balita Kabupaten Lombok Tengah diidentifikasi mengalami stunting. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan kasus stunting di Kabupaten Lombok Tengah dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun angka ini turun di tahun 2019 menjadi 18.580 anak, besarnya jumlah stunting ini merupakan tantangan besar bagi penyelenggaraan upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah di masa mendatang.

Selain itu, Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2019 belum bisa terbebas dari gizi buruk. Kasus gizi buruk di Kabupaten Lombok Tengah sempat mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2018 namun meningkat kembali di tahun 2019. Sampai dengan tahun 2019 jumlah kasus gizi buruk mencapai 31 kasus. Kejadian gizi buruk ini diakibatkan oleh rendahnya nutrisi dari asupan makanan yang diterima anak dan disebabkan oleh masalah yang cukup kompleks seperti masalah ekonomi, kesehatan mental, gangguan organ pencernaan, kurang aktifitas fisik dan juga masalah sanitasi dan kebersihan air yang buruk.

1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator antara lain panjang jalan mantap, irigasi, rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga bersanitasi dan tata ruang.

(a) Panjang Jalan Mantap

Jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2016 sepanjang 477,31 Km atau 64,55% dari total panjang jalan kabupaten. Di tahun 2017 terjadi peningkatan jalan mantap menjadi 535,85 Km atau 72,5%. Terjadi penambahan panjang jalan kabupaten di tahun 2018 sepanjang 70,44 km dari beberapa ruas jalan desa sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Bupati Lombok Tengah Nomer 208 tahun 2017. Dengan adanya tambahan panjang jalan ini maka total panjang jalan kabupaten menjadi 809,88 Km sehingga persentase jalan mantap di tahun tersebut turun menjadi 67,68% seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 23 Perkembangan Jalan Mantap Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jalan Mantap	Jalan Tidak Mantap	Panjang jalan Kabupaten		
	Km	%	Km	%	Km
2016	477,31	64,55	262,13	35,45	739,44
2017	535,85	72,5	203,59	27,5	739,44
2018	571,94	70,62	237,94	29,38	809,88
2019	548,09	67,68	261,79	32,32	809,88
2020	526,66	65,03	283,21	34,97	809,88

Sumber: Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2020

Tantangan bidang kebinamargaan adalah mempertahankan umur teknis jalan agar tetap dalam kondisi mantap dan memenuhi target kondisi mantap 100 persen untuk lima tahun kedepan. Dengan demikian harus dilakukan peningkatan jalan setiap tahunnya minimal sepanjang 647,9 Km disamping tetap melakukan rehabilitasi jalan minimal sepanjang 50 Km setiap tahunnya.



Gambar 2. 23 Peta Jaringan Jalan Kab. Lombok Tengah
 Sumber : Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2020

Untuk memenuhi kondisi jalan yang mantap 100% maka perlu pemeliharaan sepanjang 90,91 Km terdiri dari jalan aspal hotmix kondisi sedang 73,07 km dan jalan aspal lapen kondisi sedang 17,84 km yang jika tidak dilakukan pemeliharaan maka akan menjadi kondisi rusak berat. Adapun kondisi jalan yang belum mantap dan perlu ditingkatkan adalah sepanjang 261,79 Km dengan kriteria rusak berat aspal hotmix 90,75 Km, aspal lapen 59,54 Km, jalan kerikil 59,84 Km dan jalan tanah 51,66 Km.

(b) Irigasi

Salah satu capaian kinerja bidang Sumber Daya Air adalah persentase panjang jaringan saluran irigasi induk dan sekunder dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan saluran irigasi induk dalam kondisi baik adalah panjang saluran irigasi Induk dalam kondisi baik dibagi dengan saluran irigasi induk jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal tersebut mengindikasikan kualitas saluran irigasi Induk dari keseluruhan panjang saluran irigasi Induk. Secara umum panjang jaringan saluran irigasi Induk dalam kondisi baik di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 proporsi panjang saluran irigasi Induk dengan kondisi baik sebesar 71,1 persen dari total panjang saluran irigasi Induk keseluruhan, kemudian mengalami peningkatan menjadi 89,38 persen di tahun 2019, namun terjadi penurunan 85,68 persen di tahun 2020.

Indikator kedua di bidang Sumber Daya Air ini adalah cakupan luas layanan daerah irigasi sebesar 49.517 Ha dan dapat dipertahankan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 namun terjadi kenaikan cakupan luas areal 3.440,17 Ha sehingga menjadi 52.957,17 Ha sesuai luas penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Lombok Tengah oleh pihak Provinsi.

Kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten pada tahun 2016 dalam kondisi baik sepanjang 93.502,25 meter (73,44%) sedangkan kondisi rusak sepanjang 33.810,75 meter (26,56%). Kondisi tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2020, yaitu yang baik menjadi 94.250,27 meter (74,03%) dan yang rusak sepanjang 33.026,73 meter (25,77%).

Tabel 2. 24 Luas Areal Irigasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

No	Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)		Panjang Saluran (meter)		
		Potensial	Irigasi	Induk	Sekunder	Total
1	>3.000 Ha kewenangan Pusat	24.828	24.495	60.601	191.065	251.666
2	1.000 – 3.000 Ha kewenangan Propinsi	13.933	12.911	30.654	108.724	139.378
3	<1.000 Ha kewenangan Kabupaten	14.196,17	12.403,35	37.720	89.593	127.313
	Total	52.957,17	49.809,81	128.975	389.382	518.357

Sumber: Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2019

Indikator ketiga adalah penyediaan debit air irigasi yang tersedia sebesar 23.108 liter/detik. Capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2019 namun ditahun 2020 turun 10% menjadi 20.797,2 liter/detik yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pasokan air (SA) yang secara hidrologis terus berkurang sementara beban areal yang ditangani semakin bertambah.

Tabel 2. 25 Perkembangan Capaian Indikator Layanan di Bidang Irigasi Kabupaten 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Panjang Saluran irigasi Induk dan sekunder dalam kondisi baik (%)	71,1	85,15	87,78	89,38	85,68
Luas Layanan Daerah Irigasi Kabupaten (Ha)	49.517	50.806	49.517	49.517	49.517
Debit air irigasi yang tersedia (lt/det.)	23.108	23.153	23.108	21.995	20.797

Sumber : Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2020

Tabel di atas menunjukkan di akhir tahun terjadi penurunan kinerja sistem irigasi. Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan meskipun

masih tetap di atas ambang minimal 80 persen. Untuk mengukur kinerja bidang irigasi digunakan Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). IKSI adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Ada 6 aspek yang diukur dalam Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) antara lain Prasarana Fisik (45%), Produktifitas (15%), Sarana Penunjang (15%), Organisasi Personalia (15%), Dokumentasi (5%), dan P3A (10%) sehingga total indikator menjadi 100%. Data IKSI Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 26 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kab. Lombok Tengah

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Standar Kinerja Sistem Irigasi	60	60	60	60	60	60
2	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	61,5	61,5	66,3	69,0	63,0	56,1

Sumber : Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2020

Penentuan persentase tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menetapkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebagai berikut: 80-100 : kinerja sangat baik; 70-79 : kinerja baik; 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian; <55 : kinerja jelek dan perlu perhatian. Penggunaan nilai indikator 60 persen berdasarkan kemampuan pemda dan pusat dalam penyediaan APBD maupun APBN.

(c) Sanitasi dan Air Bersih

Salah satu capaian kinerja bidang air minum adalah persentase cakupan layanan air minum. Persentase cakupan layanan air minum adalah persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang dimaksud adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % secara rata-rata oleh masyarakat sehingga setiap orang dapat memenuhi kebutuhan air bersih minimal 60 liter atau 0,06 m³ setiap harinya. Kondisi cakupan layanan air minum dari tahun 2016 sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 27 Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Target Layanan Air Minum	67,5	74,5	76	78	80
2	Cakupan Layanan Air Minum	67,5	74,6	76	77,28	77,28

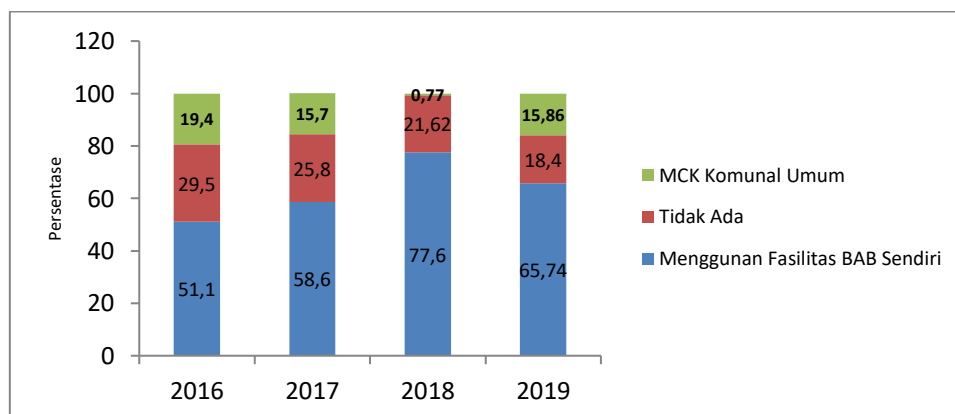
Sumber : Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat tren pencapaian layanan air minum sudah mencapai target sampai dengan tahun 2018 dan turun di tahun 2019 dan 2020 karena kegiatan pendukung dari APBN dan DAK tidak terealisasi di tahun tersebut dan pertumbuhan penduduk juga menambah beban layanan secara keseluruhan.

Setelah pemenuhan target MDGs di tahun 2019 berakhir, target tersebut dituangkan kembali dalam SDGs meskipun mengalami perubahan redaksi indikator menjadi cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan. Istilah aman ini adalah indikator pemenuhan terhadap air minum untuk kebutuhan sehari-hari tersedia setiap saat atau aman.

Indikator cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan adalah dengan membagi jumlah penduduk atau KK yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman dengan penduduk atau kk secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persen (%). Di tahun 2017, akses air minum terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang terlayani oleh sumber air minum dari PDAM baru mencapai 37,28 persen dengan total penduduk 912.879 jiwa dan jumlah penduduk terlayani hanya 340.312 jiwa.

Selain air bersih, ketersediaan fasilitas buang air besar (BAB) merupakan salah satu syarat penting yang dapat menjamin kesehatan lingkungan masyarakat sampai level rumah tangga. Tidak adanya fasilitas buang air besar terutama milik sendiri akan menyebabkan ketidaknyamanan, karena kebutuhan akan fasilitas ini datangnya tak terduga. Untuk bisa memiliki fasilitas BAB sendiri di rumah memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh sebab itu selain penting bagi kesehatan, fasilitas BAB juga menjadi indikasi kesejahteraan rumah tangga.



Gambar 2. 24 Persentase Jumlah KK Berdasarkan Jenis Fasilitas BAB di Kabupaten Lombok Tengah

Sumber : Inskesra Kab. Lombok Tengah, 2019

Kesadaran penduduk akan pentingnya keberadaan fasilitas BAB sepertinya sudah semakin meningkat. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri. Pada tahun 2019, sebesar 65,74 persen rumah tangga di Kabupaten Lombok Tengah sudah memiliki fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri/bersama. Meskipun demikian, masih terdapat 18,4 persen rumah tangga yang tidak menggunakan/tidak punya fasilitas BAB. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena kebersihan lingkungan sangat menentukan tingkat kesehatan masyarakat.

Capaian penanganan sanitasi di Kabupaten Lombok Tengah dapat diukur pula dari peningkatan jumlah desa ODF. Desa/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) adalah Desa/kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban. Untuk tahun 2020, jumlah desa ODF adalah 81 desa yang tersebar di seluruh Kecamatan, hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan perubahan perilaku dan pola hidup bersih yang sehat di tengah masyarakat.

(d) Tata Ruang

Perencanaan spasial wilayah terdiri dari rencana umum berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan rencana rinci berupa Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). RTRW Kabupaten Lombok Tengah sebagai rencana umum tata ruang telah ditetapkan pada tahun 2011 sebagai pijakan umum pembangunan spasial di kabupaten. Sebagai tindak lanjut operasionalnya diamanatkan untuk menyusun rencana rinci berupa kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten. Tahun 2015 Pemerintah Lombok Tengah telah menetapkan sejumlah dokumen rencana tata ruang antara lain RTRW yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 tahun 2011; RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2006; Rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Praya dan Rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Kopang. Selain itu telah disusun pula RTBL Kawasan Strategis Perkotaan Praya berdasarkan Perbup Nomor 80 Tahun 2015 dan RTBL Kawasan Strategis Kuta melalui Perbup Nomor 81 Tahun 2015.

Berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Tengah No.7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu : (i) Kawasan Kuta dsk; (ii) Kawasan Selong Belanak dsk; (iii) Kawasan Sade dsk; (iv) Kawasan Perkotaan Praya; dan (v) Kawasan Agropolitan Aik Meneng; (vi) Kawasan Minapolitan Gerupuk dan Awang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 386 Tahun 2019, BWP Kawasan sekitar KEK Mandalika seluas 3.778,83 Ha yang berada di Kecamatan Pujut, meliputi :

1. Desa Kuta dengan luas 1604,08 hektar;
2. Desa Prabu dengan luas 576,84 hektar;
3. Desa Mertak dengan luas 529,37 hektar;
4. Desa Sengkol dengan luas 170,94 hektar;
5. Desa Rambitan dengan luas 419,80 hektar; dan
6. Desa Sukadana dengan luas 306,94 hektar.

Hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang, baik RTR Kawasan Strategis maupun RDTR, yang menjadi acuan pembangunan di Kawasan Sekitar KEK Mandalika. Sampai dengan tahun 2020, Perda RDTR tersebut masih dalam proses penyusunan. Keberadaan Perda ini sangat diperlukan dalam rangka mendukung KEK Mandalika untuk mendorong masuknya investasi di sekitar Kawasan KEK Mandalika.

1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Jumlah kerusakan rumah pada saat terjadi bencana gempa bumi pada tahun 2018 sebesar 24.218 unit dengan kriteria rusak berat 4.483, rusak ringan 3.096 unit dan rusak ringan sebesar 16.639 unit. Adapun Rehab rumah yang sudah dikerjakan sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 berjumlah 23.384 unit.

Tabel 2. 28 Jumlah Rumah yang Direhabilitasi Akibat Bencana

No	Kecamatan	Kriteria Kerusakan			Jumlah Kerusakan	Data 634 yang belum dikerjakan			Jumlah kerusakan	Sebaran yang sudah dikerjakan			Jumlah Kerusakan
		RB	RS	RR		RB	RS	RR		RB	RS	RR	
1	Batukliang	2002	1072	4705	7779	44	28	137	209	1958	1044	4568	7570
2	Batukliang Utara	1481	623	2737	4841	26	32	154	212	1455	591	2583	4629
3	Janapria	36	55	1545	1636	3	1	19	23	33	54	1526	1613
4	Jonggat	53	93	1329	1475	1	2	34	37	52	91	1295	1438
5	Kopang	269	375	1865	2509	4	6	33	43	265	369	1832	2466
6	Praya	23	64	299	386			4	4	23	64	295	382
7	Praya Barat	14	5	42	61				0	14	5	42	61
8	Praya Barat Daya	1	2	11	14				0	1	2	11	14
9	Praya Tengah	13	30	187	230				0	13	30	187	230
10	Praya Timur	12	6	76	94			1	1	12	6	75	93
11	Pringgarrata	549	717	3625	4891	8	14	82	104	541	703	3543	4787
12	Pujut	30	54	218	302		1		1	30	53	218	301
	Total kerusakan	4483	3096	16639	24218	86	84	464	634	4397	3012	16175	23584

Sumber: BPBD Kab. Lombok Tengah, 2020

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dari inventarisasi yang dilakukan Dinas Perkim pada tahun 2019 sebesar 32.280 unit. Pada Tahun 2019, penanganan RTLH yang dilakukan sebesar 1.739 unit yang bersumber dari dana APBD, DAK perumahan, BPS Strategi dan Reguler serta Aspirasi. Untuk Tahun 2020, penanganan RTLH ditargetkan sebesar 1.574 unit sehingga sisa RTLH yang belum tertangani adalah 28.967 unit.

Tabel 2. 29 Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lombok Tengah

Uraian	Jumlah RTLH (unit)
Data RTLH tahun 2019	32.280
RTLH yang ditangani tahun 2019	1.739
RTLH yang ditangani tahun 2020	1.574
Sisa belum tertangani	28.967

Sumber: Dinas Perkim Kab. Lombok Tengah, 2020

Penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah berdasar atas tujuh aspek yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Permukiman. Tujuh aspek tersebut adalah kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Pada tahun 2020, pengurangan kawasan kumuh sebanyak 6,31 Ha sehingga total pengurangan kawasan kumuh sampai tahun 2020 sebanyak 58,16 Ha. Dengan demikian luas kawasan kumuh yang belum tertangani sebanyak 51.84 Ha.

Tabel 2. 30 Luas Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	110	60,14	69,43	58,15	51.84

Sumber : Evaluasi RPJMD 2016-2021 Tahun 2020

Dalam perkembangan penanganan kawasan kumuh, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan inventarisasi ulang kawasan kumuh dengan melakukan pendataan lebih luas dengan tujuan agar semua kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah dapat tertangani. Berdasarkan hasil pendataan tersebut dihasilkan delienasi kawasan kumuh seluas 815,37 ha di tahun 2020 dan ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah dengan SK Nomer 384.a Tahun 2020, sebagaimana peta dibawah ini.



Gambar 2. 25 Peta Kawasan Kumuh Lombok Tengah berdasarkan SK No.384.a Tahun 2020

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah, 2020

1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat selama tahun 2016-2019 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Berdasarkan data

capaian RPJMD 2016-2021, persentase penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah selalu berada di angka 100%. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah sudah melakukan upaya terbaik dalam mewujudkan trantib dan linmas yang kondusif.

Dari aspek keamanan, jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2016 sebanyak 1.024 kasus, pada tahun 2017 turun menjadi 987 kasus, pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 1.085 kasus dan turun lagi di tahun 2019 menjadi 439 kasus. Jenis kejahatan yang dilaporkan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) selalu menjadi jenis kejahatan terbanyak di tiap tahunnya.

Tabel 2. 31 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

Jenis Kejahatan Dilaporkan	2016	2017	2018	2019
Pembunuhan	3	2	2	1
Penganiayaan Berat	2	0	3	0
Penganiayaan Ringan	148	154	199	75
KDRT	54	39	57	17
Perkosaan	6	2	4	2
Penculikan	0	0	0	0
Pencurian dengan Kekerasan	126	150	171	29
Pencuian Biasa	7	34	0	20
Curanmor	297	261	257	100
Pencurian dengan Pemberatan	172	150	14	81
Pengerusakan Barang	17	19	0	5
Pembakaran dengan sengaja	1	0	0	1
Narkotika	11	65	144	21
Penipuan	52	19	20	15
Penggelapan	2	12	0	6
Korupsi	1	3	1	0
Kejahatan thd Ketertiban Umum	0	0	0	0

Sumber : BPS NTB (2019)

Bencana merupakan ancaman paling nyata bagi eksistensi kehidupan manusia sehingga sebagai daerah yang masuk sebagai wilayah beresiko bencana, Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi sebagai upaya mengurangi dampak bencana yang dihadapi masyarakat. Jenis bencana yang terjadi dari tahun 2016-2019 menunjukkan fluktuasi angka sebagaimana ditunjukkan pada tabel.

Tabel 2. 32 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019

Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019
1. Bencana Alam	28	71	46	18
a. Banjir	2	22	6	3
b. Puting Beliung	21	33	23	7
c. Tanah Longsor	5	6	2	0

d.Gempa Bumi	0	1	7	0
e.Kekeringan	0	9	8	8
2. Bencana Non Alam	19	27	15	26
a.Kebakaran	19	27	15	26
b.Kegagalan Teknolog/Kontruksi	0	0	0	0
3. Bencana Sosial	0	0	0	0
a.Kerusuhan Sosial/Politik	0	0	0	0
b.Konflik Sosial	0	0	0	0
Total	47	98	61	44

Sumber : BPS Lombok Tengah, 2020; BPBD Kab. Lombok Tengah, 2020

1.3.1.6 Sosial

Menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urgensi pelaksanaan urusan sosial bagi pemerintah daerah ini adalah sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan dasar penanggulangan masalah sosial bagi seluruh masyarakat di wilayah kabupaten. Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai indikator pelaksanaan pelayanan sosial tersebut dapat dilihat pada tabel yang disajikan di bawah ini yaitu terkait dengan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dan program daerah sendiri.

Program pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka perlindungan sosial diantaranya adalah program keluarga harapan (PKH), program beras miskin, jaminan kesehatan dan beasiswa bagi masyarakat miskin. Selain itu ada juga program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Program ini memberikan dampak pada peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung pencapaian target pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Program daerah yang dilaksanakan mengacu pada target-target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dilihat capaian kinerjanya dalam tabel dibawah ini. Indikatornya terkait dengan PMKS yang memperoleh Bantuan sosial terkait pemenuhan kebutuhan dasar, PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Layanan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia, Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan penyandang cacat yang dilatih. Program-program pokok tersebut bersama pendukungnya memiliki dampak langsung untuk mengatasi persoalan dibidang sosial.

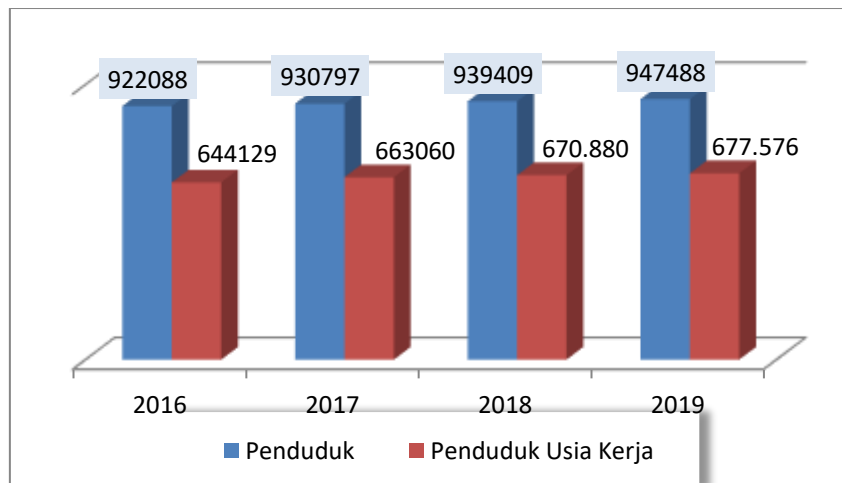
Tabel 2. 33 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2019

Uraian Indikator kinerja	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Persentase PMKS Skala Kabupaten yg memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar	47,38	40,00	28,27	40,37

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah, 2020

1.3.1.7 Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, maka pemerintah daerah perlu memperluas kesempatan kerja untuk menyerap tambahan penduduk usia kerja. Jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 sebanyak 677.576 orang dari total jumlah penduduk 947.488 orang.



Gambar 2. 26 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Penduduk Usia Kerja Tahun 2016-2019 (jiwa)

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Tabel 2. 34 Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Sektor di Kabupaten Lombok Tengah

Sektor	2016	2017	2018	2019
Formal	18,39	17,26	21,32	19,17
Informal	81,61	82,74	78,68	80,83

Sumber : BPS Lombok Tengah, 2019

Menurut BPS (2019), tenaga kerja di Kabupaten Lombok Tengah masih didominasi oleh tenaga kerja di sektor informal. Sampai dengan tahun 2019, tenaga kerja informal menyerap 80,83% tenaga kerja yang ada dan hanya 19,17% saja yang terserap oleh sektor formal. Angka ini juga menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor informal jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Besarnya kesenjangan jumlah tenaga kerja yang tidak dapat diserap oleh sektor formal menunjukkan besarnya tantangan Pemerintah Daerah ke depan agar sumberdaya tenaga kerja di Kabupaten Lombok Tengah dapat terserap lebih banyak di sektor formal.

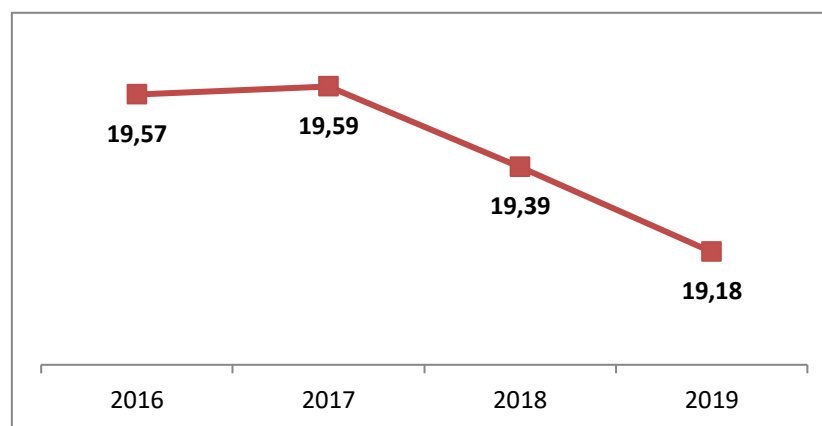
Guna menyiapkan sumberdaya tenaga kerja terlatih, pelatihan keterampilan bekerja dilaksanakan melalui penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal maupun informal. Selain itu Pemerintah Daerah juga memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi pencari kerja bersertifikat di BLK dengan jenis pelatihan yang cukup beragam. Dari tahun 2016 hingga 2019 sudah dilangsungkan 17 jenis pelatihan dengan

jumlah peserta mencapai 1.104 orang. Jenis pelatihan dengan peserta terbanyak antara lain pelatihan perbengkelan sepeda motor, menjahit dan tata rias.

1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sampai dengan tahun 2019, tercatat ada 6 lembaga informal yang terbentuk sebagai respon terhadap isu perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah lembaga ini bertahan dari tahun 2016 yaitu LPA, PEKKA, KPI, JARPUK, GAGAS, dan SANTAI. Lembaga tersebut telah berdiri dari tahun 2008 dan masih aktif melangsungkan pendampingan dan advokasi terkait perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah.

Perkembangan usia kawin pertama perempuan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan angka rata-rata usia perempuan di kabupaten ini yang semakin dini melangsungkan pernikahan pertama. Di tahun 2016 rata-rata usia kawin pertama adalah 19,57 tahun namun di tahun 2019 menjadi 19,18 tahun. Turunnya usia kawin pertama perempuan ini menunjukkan tingkat kerawanan yang diakibatkan oleh belianya usia perkawinan perempuan semakin besar. Selain kerawanan dari sisi kesehatan perempuan, pernikahan dini juga berhubungan dengan kerawanan secara sosial budaya terutama terkait mutu dan kualitas perempuan baik dari sisi pendidikan dan keterampilan yang akan berdampak pada ketangguhan keluarga yang dibangunnya.



Gambar 2. 27 Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019

Sumber : DP3A2KB Kab. Lombok Tengah, 2020

Khusus mengenai perlindungan terhadap anak, Pemerintah kabupaten Lombok Tengah bersama DPRD telah menetapkan regulasi lokal yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.

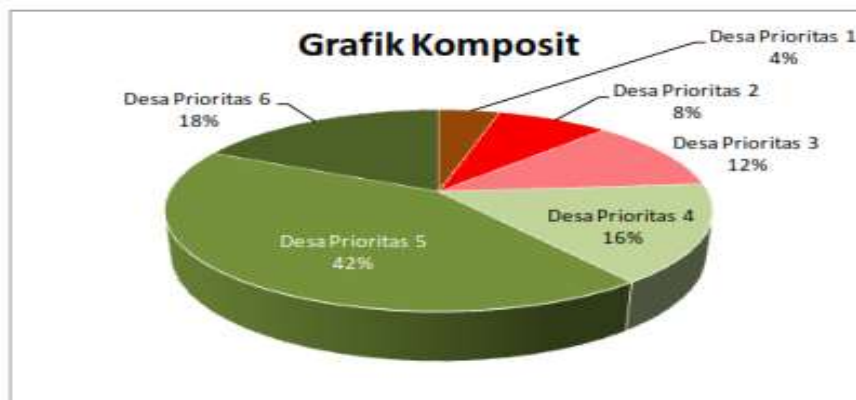
Tabel 2. 35 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Tertangani Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani
2016	72	72	80	80
2017	53	53	59	59
2018	84	84	41	41
2019	55	55	33	33
2020	43	43	44	44

Sumber : DP3AP2KB Kab. Lombok Tengah, 2021

1.3.1.9 Pangan

Konsepsi ketahanan pangan dibangun atas tiga pilar yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan analisis tiga pilar ketahanan pangan tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 menunjukkan bahwa ketahanan pangan berkinerja baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya desa di Kabupaten Lombok Tengah yang berstatus rawan pangan. Gambaran ketahanan pangan komposit dapat dilihat pada grafik berikut.



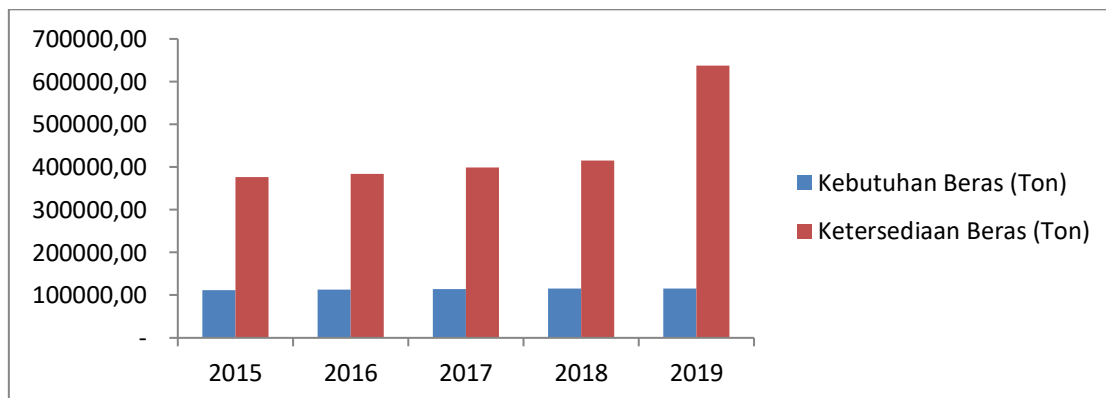
Gambar 2. 28 Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas Kerawanan dan Kerentanan Pangan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah, 2019

Grafik di atas menunjukkan terdapat 4% desa di Lombok Tengah yang tergolong desa rentan tinggi terhadap kerawanan pangan (prioritas 1). Desa yang berkategori rentan sedang terhadap kerawanan pangan (prioritas 2) sebesar 8% dan 12% desa lain berkategori rentan rendah terhadap kerawanan pangan (prioritas 3). Grafik di atas juga menunjukkan sebanyak 76% desa memiliki status aman terhadap kerawanan pangan (prioritas 4 -6).

Secara aktual dari aspek ketersediaan pangan, indikator ketahanan pangan berupa tersedianya pangan utama bagi masyarakat. Ketersediaan pangan utama tersebut harus terpenuhi dengan jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kinerja ketahanan

pangan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja baik yang diindikasikan dengan tercukupinya kebutuhan pangan pokok masyarakat. Bahkan produksi pangan mengalami surplus dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan utama (beras) dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 29 Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan (Beras) di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 - 2019

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah, 2020

Angka kecukupan konsumsi energi dan protein juga menunjukkan capaian yang baik, dimana tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat Lombok Tengah melebihi standar konsumsi energi protein dan energi yang telah ditetapkan. Pada aspek keragaman konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan kinerja yang baik pula dengan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Perkembangan konsumsi energi, konsumsi protein dan skor PPH dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 36
Perkembangan Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No	Komponen	Target/Standar	Capaian Skor PPH Kabupaten Lombok Tengah			
			2016	2017	2018	2019
1.	Konsumsi energi (Kkal/Kap/Hai)	2.000	2.317,0	2.518,9	2.440,67	2.565,36
2	Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	52	96,6	128,3	71,19	76,92
3	Skor PPH	85	85,9	86,2	85,5	90,7

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2019

1.3.1.10 Pertanian

Kegiatan pengadaan tanah pada Tahun 2016-2019 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan usulan dari SKPD. Selain itu pengadaan tanah juga difokuskan pada partisipasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memfasilitasi pembangunan akses jalan Bandara Internasional Lombok (BIL). Pada tahun 2016, pemerintah daerah telah menyediakan tanah bagi pembangunan fasilitas dan atau penyelenggaraan kepentingan

umum seperti pembangunan prasarana kesehatan, prasarana pertanian, prasarana pendidikan dan jalan umum.

Tabel 2. 37 Pemanfaatan Tanah untuk Fasilitas Umum Kab. Lombok Tengah

Tahun 2019	Luas (Ha)	Tahun 2020	Luas (Ha)
Pendopo Bupati	0,02	Puskesmas Awang	0,04
Rusus Nelayan Bilelando	1	Puskesmas Bagu	
Rusus Nelayan Selong Belanak	1	Pengganti SD Toner dan SMP 15 Pujut	1,1
Jalan BIL-Mandalika*	100	Spam Mandalika	2,3
		Puskesmas Bagu	2,85
		Pengganti Lapangan Sengkol	1
Jumlah	102,02		7,29

Sumber: Dinas Perkim Kab. Lombok Tengah, 2020

Pada tahun 2017, pelaksanaan urusan pertanahan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan usulan dari SKPD terkait serta untuk memfasilitasi pembangunan akses jalan Bandara Internasional Lombok (BIL). Pada tahun 2018, pengadaan tanah dilaksanakan untuk pembangunan prasarana kesehatan, prasarana pertanian, prasarana pendidikan dan jalan umum. Pada tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pembangunan pendopo Bupati Lombok Tengah, rusus nelayan di Bilelando dan Selong Belanak dan jalan BIL – Mandalika. Tahun 2020, pengadaan tanah oleh Pemda berupa lahan puskesmas Awang, puskesmas Bagu, pengganti SD Toner dan SMP 15 Pujut, lahan SPAM Mandalika dan pengganti lapangan umum Sengkol.

1.3.1.11 Lingkungan Hidup

(a) Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil penilaian indeks kualitas lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK pada tahun 2020, Kabupaten Lombok Tengah memiliki Indeks Kualitas Udara sebesar 93,964 point dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,48 point. Adapun nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Lombok Tengah di tahun yang sama adalah sebesar 51,11 point.

Tabel 2. 38 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

IKA	IKU	IKTL
51,11 *	93,964	33,48

Sumber:Kementerian LHK, 2020

Pada tahun 2019, jumlah mata air berdasarkan hasil survey PDAM berjumlah 68 sumber mata air dengan debit air berjumlah 1.889 lt/detik. Adapun sumber mata air yang digunakan oleh PDAM dalam memerikan layanan air bersih berasal dari 6 sumber yakni

mata air Tibu lempanas, Benang stokel, Benang Kelambu, Aik Bone, Tibu Nangklok, WTP dengan Debit kapasitas terpasang sebesar 916 ltr/dtk, namun kapasitas produksi hanya sekitar 516 ltr/detik.

Tabel 2. 39 Kondisi Sumber Air Baku PDAM Lombok Tengah

No	Sumber Air Baku	Nama Sumber	Kap Terpasang (l/dtk)	Kap Produksi	Daerah Pelayanan	Keterangan
1	Aik Bone	Mata Air	70	60	Kecamatan Praya, Kopang	Baik
2	Tibu Nangklok	Mata Air	160	160	Kecamatan Jonggat, Praya	Baik
3	Benang Stokel	Mata Air	60	60	Kecamatan Batuliang, Pringgarata	Baik
4	Nyeredep	Mata Air	26	-	-	Tidak Berfungsi
5	Sesere	Mata Air	200	80	Kecamatan Janapria, Praya Timur, Batukliang	Baik
6	Lempanas	Mata Air	200	50	Kecamatan Praya Tengah, Pujut	Baik
7	WTP	Danau	200	160	Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, Pujut	Baik
	Sub Total		916	516		

Sumber : PDAM Lombok Tengah, 2020

Tabel 2. 40 Indikator Pelayanan PDAM Lombok Tengah

No	Keterangan	Satuan	Tahun		
			2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Administrasi	Jiwa	936.012	939.409	948.101
2	Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan	Jiwa	755.312	719.334	725.989
3	Jumlah Penduduk terlayani	Jiwa	331.83	328.066	310.332
4	Cakupan Pelayanan Teknis	%	35,45%	34,92%	32,73%
5	Cakupan Pelayanan Administrasi	%	43,93%	45,61%	42,75%
6	Jumlah Sambungan	SR	51.591	51.23	51.722
7	Kapasitas Terpasang	Liter/Detik	895	895	916
8	Kapasitas Produksi	Liter/Detik	488	517	546
9	Kapasitas Distribusi	Liter/Detik	488	509	456
10	Konsumsi Air	M ³	16,80	18,48	18,25
11	Jumlah Air terjual	M ³	11.114.023	12.043.255	11.920.043
12	Kehilangan Air	%	26,80%	23,93%	15,96%
13	Idle Capacity	Liter/Detik	407	386	460

Sumber : PDAM Lombok Tengah, 2020

PDAM Kabupaten Lombok Tengah memiliki pelanggan sebesar 51.722 SR dimana cakupan pelayanan administrasi baru sebesar 42,75 % dan cakupan pelayanan teknis sebesar 32,73%. Kegiatan Perlindungan Mata Air (PerMata) berhasil menyelamatkan mata air sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 176 titik meningkat dari tahun 2010 yang hanya berjumlah 95 titik. Pada Tahun 2019, Jumlah Mata Air berdasarkan hasil survey PDAM berjumlah 68 sumber mata air dengan debit air berjumlah 1.889 lt/detik. Adapun sumber mata air yang digunakan oleh PDAM dalam memerikan layanan air bersih berasal dari 6 sumber yakni mata air Tibu lempanas, Benang stokel, Benang Kelambu, Aik Bone, Tibu Nangklok,

Nyeredep dengan Debit sekitar 550 ltr/detik. Jumlah debit tersebut bisa melayani pelanggan sebesar 51.354 pelanggan .

Pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup yaitu tindak lanjut laporan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Di Bidang Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, telah dilakukan pemantauan, inventarisasi dan indentifikasi terhadap perusahaan atau kegiatan industri yang berpotensi menghasilkan limbah dan telah mengolah air limbah serta membuang air limbah ke media lingkungan.

Disamping melaksanakan upaya-upaya di atas, pemerintah daerah juga telah melaksanakan kegiatan pemulihan lahan kritis dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2015 Luas lahan kritis yang dipulihkan sampai dengan Tahun 2015 seluas 2.000 Ha dan dilakukan secara bertahap selama 5 Tahun atau tiap tahun 400 Ha Lahan yang dikonservasi dengan cara penanaman pohon, sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait.

(b) Persampahan

Volume timbunan sampah perhari di Kabupaten Lombok Tengah dengan asumsi kontribusi sampah per orang per hari sebesar 2 liter/org/hr adalah sebesar 1.716 m³/hari dan dalam satu tahun sebesar 625.513 m³/tahun, dimana penyumbang sampah terbesar terdapat di Kecamatan Praya sebesar 83%. Kemampuan armada untuk pengangkutan sampah pada tahun 2018 sebesar 22% dan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 25%. Adapun sampah yang terangkut masih di ibu kota Kecamatan.

Tabel 2. 41 Analisis Produksi Sampah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

No	Ibukota Kecamatan	Total Produksi Sampah		Sawah Terangkut								
				2018			2019			2020		
		m3/hari	m3/tahun	m3/hari	m3/tahun	%	m3/hari	m3/tahun	%	m3/hari	m3/tahun	%
1	Praya	203	74,083	168	61,320	83	168	61,320	83	174	63,510	86
2	Batunyala	121	44,137	47	17,155	39	47	17,155	39	47	17,155	39
3	Ubung	177	64,525	37	13,505	21	37	13,505	21	37	13,505	21
4	Mujur	130	47,324	29	10,585	22	29	10,585	22	29	10,585	22
5	Kopang Rembiga	154	56,159	37	13,505	24	37	13,505	24	37	13,505	24
6	Sengkol	193	70,300	56	20,440	29	56	20,440	29	56	20,440	29
7	Penujak	138	50,241			0	25	9,125	18	25	9,125	18
8	Darek	103	37,673			0			0	4	1,460	4
9	Janapria	138	50,244			0	4	1,460	3	4	1,460	3
10	Pringgarata	121	44,254			0			0			0
11	Mantang	145	52,778			0	5	1,825	3	10	3,650	7
12	Teratak	93	33,795			0			0	4	1,460	4
	Jumlah	1,716	625,513	374	136,510	22	408	148,920	24	427	155,855	25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah, 2019

Kondisi sarana persampahan masih terbatas dimana jumlah truk sampah sebesar 10 unit dan hanya 5 unit saja dalam kondisi baik. Begitu juga dengan peralatan lainnya seperti *arm roll*, *pick up*, alat berat maupun roda tiga yang masih sangat terbatas. Hal ini menjadi kendala dalam melayani persampahan di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. 42 Jumlah dan Kondisi Sarana Persampahan Kab. Lombok Tengah

No	Jenis Sarana	Kondisi			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Truck sampah	5	4	1	10
2	Arm roll	4	4	-	8
3	Truck biasa	1	-	-	1
4	Pick Up	4	-	-	4
5	Alat berat	3	1	-	4
6	Roda tiga	21	5	1	27
7	Container sampah	19	5	3	27
8	TPA	1	-	-	1

Sumber: Dinas LH Kabupaten Lombok Tengah, 2020

Jumlah petugas kebersihan adalah 221 orang yang terdiri dari pengawas kebersihan, petugas retribusi, tukang sapu sampai petugas jaga malam TPA. Adapun untuk tukang sapu berjumlah 108 orang, dimana ASN berjumlah 5 orang dan Honorer berjumlah 103 orang. Hal ini tentu saja masih sangat terbatas sehingga layanan yang sanggup diberikan masih terbatas berupa pembersihan ruas jalan di dalam kawasan Kota Praya.

Tabel 2. 43 Jumlah Petugas Kebersihan Tahun 2020

No	Jenis Petugas	Jumlah (Orang)		
		PNS	Honorer	Jumlah
1	Pengawas Kebersihan	11	-	11
2	Petugas Retribusi	7	-	7
3	Tukang Sapu	5	103	108
4	Pengangkut Sampah	11	33	44
5	Sopir Dump Truck	6	12	18
6	Operator Alat Berat	-	3	3
7	Operator Roda Tiga	1	14	15
8	Pencatat Volume Sampah TPA	-	1	1
9	Petugas Jaga Malam TPA	-	2	2
10	Petugas PDU	-	12	12
	Jumlah	41	180	221

Sumber: Dinas LH Kabupaten Lombok Tengah, 2020

1.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa pelayanan pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu tanda penduduk. Pada kurun waktu 2016-2019 Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melayani pembuatan kartu penduduk sebanyak 681.774 orang atau 91,15% dari 747.929 penduduk wajib KTP. Perkembangan pelayanan administrasi kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 44 Kepemilikan KTP di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Yang sudah punya KTP	Persentase yang punya KTP
2016	1.029.170	752.808	534.223	70,96
2017	1.033.619	746.396	574.193	76,93
2018	1.041.664	751.772	659.432	89,52
2019	1.043.759	747.929	681.774	91,15

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lombok Tengah, 2020

Disamping pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Pada tahun 2016, jumlah penduduk yang membuat Kartu Keluarga sebanyak 217.516 keluarga atau sebanyak 71,21% dari jumlah kepala keluarga. Kepemilikan kartu keluarga meningkat sebanyak 20,87% pada tahun 2017 menjadi 262.916 KK atau 78,10% dari jumlah kepala keluarga. Sedangkan yang membuat Akta Kelahiran pada tahun 2017 berjumlah 758.730 jiwa, meningkat sebanyak 15,74% dibandingkan tahun 2016. Data kepemilikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 45 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No.	Kecamatan	Tahun 2016		Tahun 2017		2018		2019	
		Keluarga Sudah Cetak KK	% Keluarga Sudah Cetak KK	Keluarga Sudah Cetak KK	% Keluarga Sudah Cetak KK	Keluarga Sudah Cetak KK	% Keluarga Sudah Cetak KK	Keluarga Sudah Cetak KK	% Keluarga Sudah Cetak KK
1	Praya	30.299	90,31	33.052	84,19	30.526	79,73	37.775	93,61
2	Jonggat	24.219	84,31	26.834	83,67	26.892	78,97	33.629	95,87
3	Batukliang	18.059	78,78	22.443	81,64	21.040	7,66	27.384	95,84
4	Pujut	26.132	81,82	33.424	92,72	27.165	77,02	35.240	96,13
5	Praya Barat	16.441	66,53	18.132	67,93	15.785	62,88	21.859	83,93
6	Praya Timur	15.432	65,92	21.373	85,69	14.350	6,08	19.434	79,99
7	Janapria	17.164	63,72	20.052	68,21	18.616	69,51	24.835	89,73
8	Pringgarata	15.945	67,08	21.034	83,73	14.503	61,20	19.042	78,20
9	Kopang	16.386	56,46	21.431	69,34	18.011	63,09	24.057	81,64
10	Praya Tengah	15.576	68,21	20.147	83,48	13.194	57,38	17.872	75,70
11	Praya Barat Daya	11.279	62,88	12.442	63,87	10.247	56,30	14.853	78,60
12	Batukliang Utara	10.584	53,86	12.552	59,54	11.874	62,59	16.275	82,94
	TOTAL	217.516	71,21	262.916	78,10	222.203	68,80	292.255	87,63

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Tengah, 2019

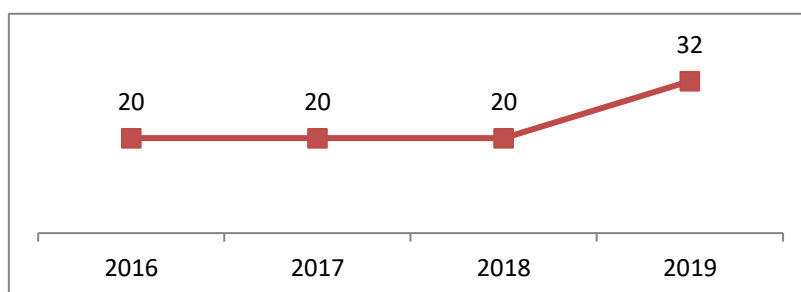
Tabel 2. 46 Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No.	Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Perentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Perentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Perentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Perentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran
1	Praya	118.315	71.064	60,06	121.871	80.201	65,81	127.081	88.864	78,18	126.502	101.1	79,92
2	Jonggat	95.975	60.769	63,32	97.104	69.812	71,89	107.924	75.917	84,39	107.464	85.373	79,44
3	Batukliang	78.37	54.759	69,87	83.46	64.976	77,85	87.926	70.206	77,75	88.945	78.176	87,89
4	Pujut	112.665	57.906	51,40	116.212	69.502	59,81	116.115	78.218	80,31	116.988	86.234	73,71
5	Praya Barat	84.896	52.519	61,86	84.094	64.423	76,61	81.473	67.185	82,27	82.516	69.848	84,65
6	Praya Timur	75.79	47.367	62,50	74.868	55.599	74,26	73.63	58.125	73,89	73.902	61.302	82,95
7	Janapria	87.342	55.629	63,69	87.121	63.953	73,41	83.912	69.795	80,07	84.795	73.919	87,17
8	Pringg arata	78.37	54.759	69,87	76.968	61.713	80,18	76.422	65.034	78,45	76.53	70.075	91,57
9	Kopang	96.839	58.872	60,79	95.153	66.537	69,93	92.958	71.464	78,05	92.935	77.397	83,28
10	Praya Tengah	76.129	52.684	69,20	74.289	58.785	79,13	73.695	64.153	83,98	73.99	68.232	92,22
11	Praya Barat Daya	58.845	40.683	69,14	58.143	46.763	80,43	57.615	49.616	64,67	57.888	48.855	84,40
12	Batukliang Utara	64.893	46.038	70,94	64.336	56.466	87,77	60.803	59.392	81,06	61.304	53.153	86,70
	Total	1.029.170	655.548	63,70	1.033.619	758.73	73,41	1.040.594	817.879	78,60	1.043.759	873.664	83,70

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Tengah, 2018

1.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam kurun waktu 2016-2019, jumlah kerjasama desa terus meningkat dari semula 20 buah kerjasama menjadi 32 kerjasama di tahun 2019. Peningkatan jumlah kerjasama antar desa ini menunjukkan pemberdayaan desa di Kabupaten Lombok Tengah cukup berhasil mendorong pemerintah desa untuk berinovasi dengan menyelenggarakan kerjasama untuk kepentingan pembangunan daerah.

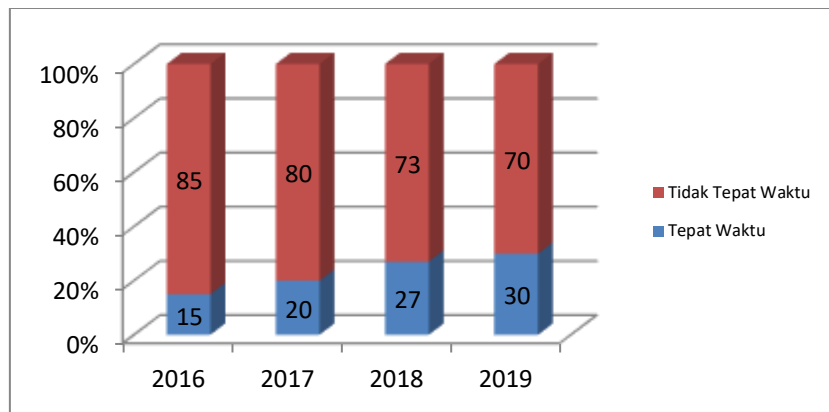


Gambar 2. 30 Jumlah Kerjasama antar Desa di Kabupaten Lombok Tengah

Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah, 2020

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Secara yuridis APBDES merupakan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, dimana merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Secara substansi APBDES merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Peraturan desa tentang APBDES tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

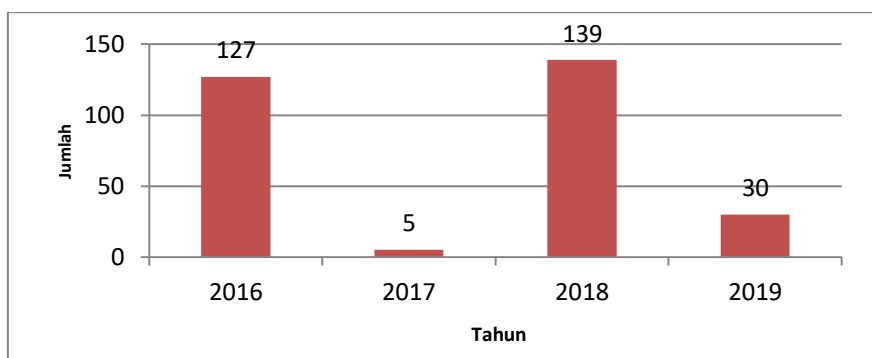
Salah satu parameter atau ukuran untuk menentukan sejauhmana APBDES dinilai baik atau berkualitas adalah ketepatan waktu dalam penetapan APBDES. Persentase jumlah desa di Kabupaten Lombok Tengah dengan APBDES tepat waktu dari tahun 2016 terus meningkat dari semula 15% menjadi 30%. Data ini menunjukkan sampai dengan tahun 2019, sebagian besar desa di Kabupaten Lombok Tengah masih terlambat menetapkan APBDES-nya.



Gambar 2. 31 Persentase Desa Berdasarkan Ketepatan Waktu Penetapan APBDes 2016-2019

Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah, 2020

Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa terus diupayakan oleh pemerintah daerah. Meskipun jumlah lembaga yang dibina sangat fluktuatif, upaya pembinaan ini terus dilaksanakan sebagai salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat desa. Di tahun 2016 terdapat 127 lembaga kemasyarakatan desa yang tersebar di 127 desa yang ada sedangkan pada tahun 2017 hanya ada 5 lembaga yang dibina karena keterbatasan anggaran yang dikelola. Pada tahun 2018 terdapat 139 lembaga kemasyarakatan yang dibina dan turun kembali di tahun 2019 sebanyak 30 lembaga.



Gambar 2. 32 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Dibina 2016-2019

Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah, 2020

Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah desa telah dilakukan peningkatan pada aspek SDM, kelembagaan dan system. Untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur telah dilaksanakan berbagai jenis pelatihan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 47 Jenis dan Peserta Pelatihan Perangkat Desa Tahun 2016-2019

2016		2017		2018		2019	
Jenis	Jumlah Peserta	Jenis	Jumlah Peserta	Jenis	Jumlah Peserta	Jenis	Jumlah Peserta
Bintek Kepala Desa	127 orang	Pelatihan Kepala Desa	15 orang	Bintek penyusunan laporan administrasi desa	127 orang	Diklatsar kepala desa	97 orang
Bintek camat dan	36 orang	Bintek administrasi	127 orang	Bintek anggota	681 orang	Pelatihan peningkatan	127

2016		2017		2018		2019	
perangkat kecamatan		desa		BPD		kapasitas aparatur pemdes	orang
Bintek sekretaris desa	127 orang	-	-	Bintek Kepala Dusun	321 orang	Pelatihan pengelolaan keuangan desa	127 orang

Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah, 2020

Untuk peningkatan kapasitas keuangan pemerintah desa telah dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Lainnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 48 Jumlah ADD, DD dan Bantuan Keuangan Lainnya untuk Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	ADD dan DD	BANTUAN KEUANGAN LAINNYA	TOTAL
1	2016	200.704.825.700	3.359.800.000	204.064.625.700
2	2017	224.955.767.464	4.987.000.000	229.942.767.464
3	2018	261.938.694.400	1.692.000.000	263.630.694.400
4	2019	303.772.9700.20 0	2.363.200.000	306.136.170.200
5	2020	322.044.237.700	5.456.400.000	327.500.637.700

Sumber: DPMD Kabupaten Lombok Tengah, 2020

Untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan daerah tentang pemerintahan desa yakni:

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa
2. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes yang ditetapkan setiap tahun.
3. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan setiap tahun.
4. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan ADD yang ditetapkan setiap tahun
5. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa
6. Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Adat di setiap desa
7. Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
8. Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Masyarakat Desa
9. Peraturan Bupati tentang Pilkades Serentak
10. Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Ekowisata
11. Rancangan Peraturan Bupati tentang Bumdes

12. Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa
13. Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa
14. Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Pemdes dan BPD
15. Peraturan Bupati tentang BPD.

1.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perbandingan antara jumlah akseptor aktif dan pasangan usia subur di Kabupaten Lombok Tengah berfluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada tahun 2018, persentase akseptor aktif terhadap PUS mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya namun kembali meningkat tajam di tahun 2019. Tingkat partisipasi akseptor ditunjukkan juga oleh angka drop-out KB dan angka unmet need KB yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2016-2019. Peningkatan ini berakibat pada makin rendahnya partisipasi aktif penduduk pasangan usia subur menjadi akseptor KB. Perkembangan pasangan usiasubur dan akseptor aktif tahun 2016-2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 49 Tingkat Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

Tahun	Pasangan Usia Subur	Akseptor Aktif	% Akseptor Aktif Terhadap PUS	Drop-out KB	Unmet need
2016	234.065	166.967	71,44	13.76 5	31.650
2017	234.065	166.967	71,44	18.94 4	33.250
2018	217.775	146.114	67,09	24.19 9	32.906
2019	161.073	139.642	86,7	24.97 6	36.333

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2020; DP3A2KB Kab. Lombok Tengah, 2019

1.3.1.15 Perhubungan

Sampai dengan tahun 2020 jumlah rambu jalan yang dimiliki sebanyak 2.316 buah. Pagar pengaman jalan telah terpasang di 532 m dan patok tikungan sebanyak 560 buah. Hal tersebut diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Tabel 2. 50 Fasilitas Keselamatan LLAJ (Rambu / RPPJ) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

No	Fasilitas	Satuan	Jumlah Terpasang	Jumlah
----	-----------	--------	------------------	--------

			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Traffic Light	Unit	11	-	-	-	-	11
2	Warning Light	Unit	1	-	-	-	-	1
3	RPPJ	Buah	15	12	10	-	-	37
4	Marka Jalan	m2	4.075	1.531	1	-	-	6.606
5	Pagar Pengaman Jalan	M	472	-	60	-	-	532
6	Rambu Jalan	Buah	2.001	105	110	100	-	2.316
7	Patok Tikungan	Buah	390	40	100	30	-	560
9	Traffic Cone, Rambu Pengalih Arus, Road Barrier	Buah	-	42	140	40	-	222

Sumber : Dishub Kab. Lombok Tengah, 2020

Capaian kinerja di bidang perhubungan adalah tersedianya fasilitas keselamatan jalan yang memadai dan tersedianya layanan moda transportasi, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 51 Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019

Indikator	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Persentase jalan kabupaten yang memiliki fasilitas keselamatan jalan	%	50	100	65	65
Jumlah terminal yang berfungsi	Terminal	0	0	1	1
Cakupan layanan trayek angkutan kawasan strategis yang terlayani	Trayek	8	10	10	10

Sumber : Laporan Capaian RPJMD 2016-2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terdapat peningkatan fasilitas keselamatan jalan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 namun karena adanya penambahan panjang jalan kabupaten dan minimnya pemeliharaan terhadap fasilitas tersebut maka trennya menurun hingga di tahun 2019. Sampai tahun 2020 sudah tersedia 11 *traffic light* yang terpasang di tempat-tempat yang termasuk strategis meskipun beberapa diantaranya ada yang tidak bisa difungsikan karena rusak.

Dari 4 (empat) unit terminal yang ada hanya 1 unit yang berfungsi yaitu Terminal Mujur. Terminal Renteng sudah menjadi kewenangan provinsi dan Terminal Kopang sudah beralih fungsi menjadi pusat pertokoan. Terminal Sengkol juga telah berubah menjadi puskesmas dan belum ada terminal baru sebagai penggantinya. Realisasi cakupan layanan trayek sebanyak 80% hingga tahun 2019.

Cakupan layanan angkutan jalan yaitu jaringan angkutan jalan Dinas Perhubungan telah memiliki moda transportasi perdesaan sebanyak 8 unit untuk melayani wilayah strategis termasuk KSPN Mandalika. Di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor,

Dinas Perhubungan telah memiliki UPT PKB. Sedangkan cakupan layanan di bidang prasarana angkutan jalan telah memiliki sarpras jalan dan keselamatan jalan namun belum berfungsi baik.

Selain itu untuk mendukung kelancaran sarana transportasi untuk masyarakat terdapat 8 (delapan) jalur perintis yang tersebar di beberapa kecamatan baik di wilayah selatan, tengah maupun utara. Pembukaan trayek perintis ini diharapkan mampu mendukung aktifitas ekonomi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan.

Tabel 2. 52 Trayek dan Trayek Perintis

No	Trayek Lama	Trayek Perintis
1	Renteng- Mantang – Aik Bukak	Mantang – Aik Bukak-Setiling
2	Renteng- Mantang – Pancor Dao	Mantang – Pancor Dao- Tratak
3	Renteng- Kopang – Mt. Gamang- Janapria-Ganti	Renteng –Darek-Batujangkih
4	Renteng-Kopang-Wajegeseng	Renteng-Pemepek-Rarung
5	Renteng- Mujur – Awang	Selong Blanak-Kuta –Awang
6	Renteng- Mujur – Janapria	Renteng- Sengkol-Kuta Gerupuk
7	Renteng- Mujur – Kruak	Sengkol-Teruwai-Awang
8	Renteng-Batunyale-Sengkol- Kuta	Puyung-KODIM-KPPRD-Pendopo-Banjar- Biao-Jontlak-RSUD-Rabitah-Toyang- Tengari-Tebero-Renteng-Puyung. (Bus angkot dalam Kota/angkutan Pelajar)
9	Renteng-Penujak-Sengkol- Kuta	
10	Renteng-Penujak-Mangkung- Selong Blanak	
11	Renteng-Darek- Pelambik	
12	Renteng- Puyung- Bunjeruk	

Sumber: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Lombok Tengah Tahun 2019

Dari 14 jalur trayek sesuai dengan SK Bupati Nomor 1075 Tahun 2001 tentang Jalur Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, semuanya sudah tidak beroperasi lagi. Hasil survey membuktikan rata-rata para pengemudi angkutan perdesaan adalah pemilik langsung dari armada yang dikemudikannya tersebut. Mereka mencari penumpang dengan karakter perjalanan dari pintu ke pintu (*door to door service*) tanpa melewati rute yang telah ditetapkan. Dengan kondisi lapangan tersebut, pelayanan angkutan perdesaan Kabupaten Lombok Tengah dapat dikatakan menyimpang dari trayek yang telah ditetapkan. Saat ini angkutan perdesaan Kabupaten Lombok Tengah hanya melayani 3 lintasan yaitu lintasan utara (LU), lintasan timur (LT), dan lintasan selatan (LS). Pada lintasan inilah terdapat ruas-ruas jalan yang sering dilalui oleh angkutan umum untuk melayani masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

Meningkatnya populasi kendaraan pribadi yang dimiliki masyarakat membuat layanan angkutan umum semakin terpinggirkan. Di sisi lain, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor juga berimplikasi pada keharusan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur jalan yang memadai termasuk penyediaan kantong-kantong parker demi kenyamanan dan ketertiban masyarakat dalam berkendara. Sampai dengan tahun 2020, baru terdapat 66 titik parkir yang berijin. Ini menunjukkan masih banyak lokasi potensial parkir yang belum tersentuh dan ditangani oleh pemerintah daerah. Besarnya potensi nilai retribusi yang dapat ditarik pemerintah melalui lahan parker perlu menjadi perhatian sehingga membawa manfaat yang lebih bagi daerah.

Tabel 2. 53 Lokasi Parkir yang Berijin

No.	Lokasi	Keterangan	No	Lokasi	Keterangan
1	Toko Unggul Jaya	Roda 2 dan 4	34	Chiken Puyung	Roda 2 dan 4
2	BNI Sinar Terang	Roda 2 dan 4	35	Alfamart Puyung	Roda 2 dan 4
3	Prima Dona	Roda 2 dan 4	36	Pasar Puyung	Roda 2 dan 4
4	Toko Orint dan Bata	Roda 2 dan 4	37	Timur Pasar Bunjeruk	Roda 2 dan 4
5	Tk.Garuda	Roda 2 dan 4	38	Barat Pasar Bunjeruk	Roda 2 dan 4
6	Tk.Saparua	Roda 2 dan 4	39	Alpamart Ubung	Roda 2 dan 4
7	Tk.Matahari	Roda 2 dan 4	40	Pasar Sengkol	Roda 2 dan 4
8	Tk.Utama-Alisamanhudi	Roda 2 dan 4	41	Bg. Rende	Roda 2 dan 4
9	Rumah Makan Ria	Roda 2 dan 4	42	Salon Sejahtera/planet jaya	Roda 2 dan 4
10	JE Seluler	Roda 2 dan 4	43	Pertokoan Soping	Roda 2 dan 4
11	BPJS Renteng	Roda 2 dan 4	44	FIF	Roda 2 dan 4
12	Toko Mas Intan	Roda 2 dan 4	45	BRI Sariah	Roda 2 dan 4
13	Toko Mas Dayu	Roda 2 dan 4	46	Jogja	Roda 2 dan 4
14	Toko Segi Tiga	Roda 2 dan 4	47	Alfamart Perum	Roda 2 dan 4
15	Indomart Renteng	Roda 2 dan 4	48	Barat Pertamina Biao	Roda 2 dan 4
16	BRI unit Renteng	Roda 2 dan 4	49	Warung Murah	Roda 2 dan 4
17	Toko Mahajaya Renteng	Roda 2 dan 4	50	Shelter Janapria	Roda 2 dan 4
18	Bank NTB Kopang	Roda 2 dan 4	51	Tk. Mas Berlian Mujur	Roda 2 dan 4
19	Alfamart Pengkores	Roda 2 dan 4	52	Tk.BigBox	Roda 2 dan 4
20	Bakso Melia	Roda 2 dan 4	53	Alfamart Mujur	Roda 2 dan 4

No.	Lokasi	Keterangan	No	Lokasi	Keterangan
21	Bakso Perempatan	Roda 2 dan 4	54	Alfamart Ganti	Roda 2 dan 4
22	Depan pertokoan	Roda 2 dan 4	55	Belakang Tk.Orient	Roda 2 dan 4
23	BRI Pengadang	Roda 2 dan 4	56	Bakso Selatan M.	Roda 2 dan 4
24	Meksi Pengadang	Roda 2 dan 4	57	Alfamart & Bank Md.Renteng	Roda 2 dan 4
25	Pasar Peringgarata	Roda 2 dan 4	58	Alfamart Puyung	Roda 2 dan 4
26	Depan Becingah (bg. Selatan)	Roda 2 dan 4	59	Puskesmas Pringgarata	Roda 2 dan 4
27	Depan Becingah (bg. Utara)	Roda 2 dan 4	60	Alfamart Pemeppek	Roda 2 dan 4
28	Ex Pol PP	Roda 2 dan 4	61	Tk.Toni	Roda 2 dan 4
29	RM. Pawon Sasak	Roda 2 dan 4	62	Depan BRI Mantang	Roda 2 dan 4
30	Klinik Winerk	Roda 2 dan 4	63	Tk.Jaya Abadi	Roda 2 dan 4
31	BRI Puyung	Roda 2 dan 4	64	Depan Pasar Mantang	Roda 2 dan 4
32	Pegadaian Puyung	Roda 2 dan 4	65	Pegadaian Mantang	Roda 2 dan 4
33	Mini Market Puyung	Roda 2 dan 4	66	Samping Pasar Mantang	Roda 2 dan 4

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah, 2020

Jumlah armada yang masih aktif kondisi bulan Oktober 2020 adalah sebanyak 76 buah armada dengan jumlah kecelakaan tercatat di angka 201. Angka kecelakaan menunjukkan ada peningkatan dibandingkan tahun 2017.

Tabel 2. 54 Angka Kecelakaan Kab. Lombok Tengah 2017 - 2019

Indikator	2017	2018	2019
Angka Kecelakaan	160	210	201

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah, 2020

1.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah berinvestai infrastruktur jaringan pada semua OPD dan Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu untuk komunikasi data dan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah membangun situs resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yakni www.lomboktengahkab.go.id dengan rata-rata kunjungan pada tahun 2019 sejumlah 38.395 pengunjung atau meningkat 150% dari tahun 2018 sejumlah 15.375 pengunjung. dan terus mengembangkannya mengikuti teknologi informasi yang terus berkembang.

Di bidang pengelolaan *e-government* telah dimanfaatkan beberapa sistem informasi yang mendukung pelaksanaan urusan umum pemerintahan diantaranya SIPD-SIMDA Penganggaran, e-MONEV, SIMTASKIN, SIMPBB, SIMPEG, SIMKESDA, e-AUDIT, SIAK, e-PROUCEMENT, SIM pengadaan barang dan jasa, dalam proses pelaksanaan SIMDA Perencanaan dan 32 website OPD yang lokasi penyimpanan datanya sudah di server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Website untuk pelayanan publik yang sudah ada di Kabupaten Lombok Tengah antara lain :

- a. Website Korona untuk informasi covid -19 : <https://corona.lomboktengahkab.go.id/>,
- b. Website GIS Menara : <https://gis-menara.lomboktengahkab.go.id>
- c. Website Lombok Tengah : <https://lomboktengahkab.go.id/domain>
- d. Website Satu Data : <https://satudata.lomboktengahkab.go.id>
- e. Website PPID : <https://ppid.lomboktengahkab.go.id>

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik di Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan PPID akan menjadi media pelayanan publik agar masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi secara online. Kabupaten Lombok Tengah memiliki sistem informasi yang bisa mememanajemen permintaan informasi ke semua OPD secara online untuk selanjutnya disampaikan ke publik. Dalam upaya menciptakan dan menjamin kelancaran pelayanan informasi publik di Kabupaten Lombok Tengah telah disusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

PPID utama Kabupaten Lombok Tengah telah mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai Badan Publik Menuju Informatif Katagori kabupaten/kota Provinsi NTB pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik "informatif".

Pengembangan sistem informasi di Kabupaten Lombok Tengah masih membutuhkan dukungan penambahan server fisik dan virtual, penambahan infrastruktur jaringan, server aplikasi, dan peningkatan Storage server untuk menampung aplikasi dan *bandwidth dedicated*. Selain itu diperlukan komitmen semua OPD untuk menjalankan dan mengupdate informasi pada website masing-masing, dan peningkatan HDD server yang masih kurang untuk menampung semua aplikasi pelayanan publik.

Perkembangan hasil penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi di Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2016-2019 secara umumnya menunjukkan peningkatan seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 55 Perkembangan Hasil Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informasi Kab.Lombok Tengah

No	Indikator	Tahun				Keterangan
		2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah OPD Yang Terkoneksi dan terintegrasi di Jaringan Intra Pemerintah atau akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfo	1	1	1	1	BPKAD
2	Jumlah Layanan Publik Yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (Sesuai PM Kominfo No. 5/2015)	-	6	6	6	Dukcapil, Perijinan, LPSE, TKI, Kesbangpol, PPID
3	Jumlah pengunjung Website Pemerintah Lombok Tengah	-	-	15.375	38.395	
4	Jumlah OPD yang memiliki PPID	43	44	44	44	
5	Jumlah OPD yang memiliki portal dan situs Web yang sesuai Standar	3	11	20	32	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Lombok Tengah, 2020

1.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan khususnya terhadap UMKM kategori usaha mikro. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Bupati Lombok Tengah untuk menciptakan 10.000 wirausaha baru melalui berbagai kegiatan pelatihan serta bantuan sarana usaha bagi para wirausaha baru.

**Tabel 2. 56
Jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019**

Tahun	Kategori Usaha			Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	
2017	20.053	394	9	20.456
2018	20.011	397	10	20.418
2019	20.511	400	12	20.923

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kab. Lombok Tengah, 2020

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja UMKM, melakukan fasilitasi kemitraan permodalan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Capaian realisasi fasilitasi permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat baik dari jumlah UMKM penerima KUR maupun dari jumlah dana yang terserap. Pada tahun 2020 perkembangan KUR mencapai peningkatan sebesar 121,6% dibandingkan dengan realisasi penyerapan KUR tahun 2017. Nilai aktual realisasi KUR 2020 sebesar Rp. 440.561.000.000,-.

Tabel 2. 57
Rekap Penyerapan KUR oleh UMKM
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2020

Tahun	UMKM Penerima KUR	Realisasi (Rp.)
2017	10.943	198.791.700.000
2018	7.845	170.506.620.405
2019	9.351	231.910.000.000
2020	13.450	440.561.000.000
Total	41.589	1.041.769.320.405

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kab. Lombok Tengah, 2020

Sampai dengan tahun 2019, jumlah koperasi aktif yang tercatat di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebanyak 219 unit. Jumlah koperasi aktif terbanyak berada di Kecamatan Praya yaitu sebanyak 60 unit dan paling sedikit di Kecamatan Kopang sebanyak 7 unit. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah koperasi aktif di tahun 2019 mengalami penurunan dari semua 239 unit di tahun 2018 menjadi 219 unit di tahun 2019. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah terjadi penyusutan jumlah koperasi aktif mencapai 20 unit.

Tabel 2. 58
Jumlah Koperasi Aktif menurut Kecamatan
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018-2019

Kecamatan	2018	2019
Praya Barat	12	15
Praya Barat Daya	7	9
Pujut	41	38
Praya Timur	23	15
Janapria	14	10
Kopang	11	7
Praya	64	60
Praya Tengah	10	9
Jonggat	19	15
Pringgarata	15	18
Batukliang	13	13
Batukliang Utara	10	10
Jumlah	239	219

Sumber : BPS Lombok Tengah, 2021

1.3.1.18 Penanaman Modal

Capaian kinerja urusan penanaman modal daerah selama kurun waktu 2016-2019 secara umum mengalami perkembangan yang signifikan. Kondisi ini antara lain didukung oleh pengembangan perizinan dan penanaman modal secara regional dan nasional serta adanya berbagai perbaikan dari sistem pelayanan dan proses penerbitan ijin investasi. Capaian ini juga didukung oleh pengembangan sistem informasi penanaman modal, *quick respon* pengaduan masyarakat terkait perijinan serta peningkatan kapasitas aparatur

pelayanan perijinan. Hal tersebut berdampak positif terhadap jumlah ijin investasi yang diterbitkan serta terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. 59 Target & Realisasi investasi Kab. Lombok Tengah 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016		2017		2018		2019	
			Target	Realisasi (Akumulasi)	Target	Realisasi (Akumulasi)	Target	Realisasi (Akumulasi)	Target	Realisasi (Akumulasi)
1	Nilai Investasi PMDN	Juta Rupiah	785096	281807 (970.851)	896000	71004 (1.041.854,91)	1021044	130275,9 (1.172.131)	1164044	118809 (1.290.940)
2	Nilai Investasi PMA	Ribu US Dolar	1239072	135350,68 (1.338.960,68)	1276091	67151,02 (1.406.111,70)	1315022	69804,5 (1.475.916)	1354067	69927,34 (1.545.844)

Sumber : DPMPTSP Kab. Lombok Tengah, 2020

Dari aspek regulasi telah ditetapkan pula Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan. Selain itu ditertibkan pula Peraturan Bupati tentang Insentif dan Disinsentif Penanaman Modal serta Peraturan Bupati tentang Perijinan Online.

1.3.1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka pembinaan kepemudaan dan olahraga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pembinaan melalui organisasi-organisasi induk, seperti Pramuka, KNPI, Karang Taruna, OSIS dan KONI dalam bidang keolahragaan. Pembinaan yang dilakukan berupa pemberian dana hibah dan pelaksanaan kompetisi-kompetisi untuk meningkatkan prestasi dalam kedua bidang tersebut.

Dalam kurun lima tahun terakhir bidang kepemudaan Kabupaten Lombok Tengah sering kali mengirimkan duta-dutanya dalam ajang pemuda pelopor dan karang taruna teladan tingkat nasional yang berhasil meraih juara I, II dan III.

Dalam bidang olahraga untuk kalangan pelajar pembinaan dan penjangkaran bibit-bibit atlet potensial pada tingkat SD, SMP, SMA dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Selanjutnya untuk olahraga prestasi

pembinaan dilaksanakan melalui KONI Kabupaten dengan tolok ukur kegiatan melalui pekan olahraga berjenjang yaitu Pekan Olahraga Kabupaten, Pekan Olahraga Provinsi dan Pekan Olahraga Nasional.

Dalam rangka menunjang pola-pola pembinaan keolahragaan tersebut, untuk kalangan pelajar di masing-masing sekolah telah disediakan fasilitas olahraga minimal. Sedangkan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Pemerintah Daerah telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Gedung olahraga sebanyak 2 unit di Kelurahan Praya dan Desa Puyung;
2. Lapangan dan fasilitas olahraga skala Kabupaten untuk cabang-cabang olahraga sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, bola basket, bola volly, sepak takraw dan panjat tebing;
3. Lapangan olahraga skala kecamatan sebanyak 12 unit di 12 Kecamatan.

Dengan pembinaan yang didukung oleh sarana prasarana yang dimiliki, prestasi yang diraih oleh atlet-atlet Kabupaten Lombok Tengah secara perorangan maupun beregu dari beberapa cabang olahraga pada setiap multi event olahraga mengalami peningkatan, baik di level daerah, nasional dan internasional. Perkembangan prestasi olahraga di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 60 Jumlah Atlit Berprestasi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No	Tahun	Cabang Olahraga	Prestasi		
			Daerah (PORPROV/Kejur Prov)	Nasional (PON/Kejurnas)	Internasional
1	2016	Tarung Derajat	0	1	0
		Panjat Tebing	0	1	0
		Pencak Silat	0	0	1
2	2017	Panjat tebing	0	1	1
		Taekwondo	8	1	13
		Karate	0	13	0
		Kempo	0	6	0
		Atletik	1	1	0
		IMI Motor	0	1	0
		Bola Voli	0	2	0
		Renang	2	0	0
		Bulu tangkis	2	0	0
		Bridge beregu	1	0	0
3	2018	Atletik	4	1	0
		Billiard	4	0	0

No	Tahun	Cabang Olahraga	Prestasi		
			Daerah (PORPROV/Kejur Prov)	Nasional (PON/Kejurnas)	Internasional
		Karate	14	0	0
		Kempo	13	0	0
		Panahan	2	0	0
		Panjat Tebing	10	1	0
		Futsal	1	0	0
		Taekwondo	10	0	0
		Tarung derajat	13	0	0
		IMI Motor	4	0	0
		Balap sepeda	4	0	0
		Bridge	6	0	0
		Renang	15	0	0
		Tenis meja	5	0	0
		Bola voli	1	0	0
		Muathai	5	0	0
		Sepak takraw	1	0	0
		Pencak silat	2	0	0
		Tenis lapangan	1	0	0
		Tinju	3	0	0
		Sepakbola	1	0	0
4	2019	Karate	1	9	2
		Sepak bola	1	0	0
		Voli pantai	1	0	0
		Tarung derajat	3	0	0
		Taekwondo	2	0	0
		Atletik	1	0	0
		Panjat tebing	1	0	0
		Kempo	1	0	0
		Futsal	5	0	0

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lombok Tengah, 2020

Prestasi pemuda di Kabupaten Lombok Tengah dapat ditunjukkan dengan prestasi pemuda di bidang-bidang tertentu. Dari tahun 2016 hingga 2019, Lombok Tengah selalu mengutus duta paskibraka di tingkat Nasional bahkan di tahun 2017 sebanyak jumlah pemuda yang diutus sebagai paskibraka mencapai 3 orang. Data prestasi pemuda ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2. 61 Jumlah Pemuda Berprestasi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No	Bidang	Tahun			
		2016	2017	2018	2019

No	Bidang	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Paskibraka	0	3	1	2
2	Pemuda pelopor	1	0	1	0
3	JPI	0	1	1	1
4	PPAN dan KPN	0	0	1	1
5	Kirab pemuda	0	2	1	0
6	Pemuda peduli lingkungan bersih dan sehat (Pepilisngsih)	0	1	1	0
7	Wirausaha muda	1	1		1
	Jumlah	2	8	6	5

Sumber : Dinas Kepemudaan & Olahraga Kab. Lombok Tengah, 2020

1.3.1.20 Statistik

Dalam rangka penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan berbagai program dan kerjasama penyediaan data dan informasi pembangunan daerah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 62 Jenis Kegiatan Urusan Statistik di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kegiatan	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kerjasama Penyusunan Lombok Tengah Dalam Angka/ Statistik dan Spasial kabupaten Lombok Tengah	√	√	√	√	√	√
2	Kerjasama penyusunan analisa PDRB Kab. Lombok Tengah	√	√	√	√	-	-
3	Kerjasama Penyusunan Kecamatan Dalam Angka/Statistik dan Spasial Kecamatan	√	√	√	√	√	√
4	Kerjasama Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah	√	√	√	√	-	-
5	Koordinasi, Konsolidasi, dan Validasi Data	√	√	√	√	√	√
6	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Lombok Tengah	√	√	√	√	-	-
7	Koordinasi dan Konsolidasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	√	√	√	√	-	-
8	Penyusunan Statistik Sektor (Profil Pendidikan, Kesehatan, Bencana, Infrastruktur, Statistik Lingkungan Hidup Daerah, Ketersediaan Pangan)	√	√	√	√	-	-
9	Inisiasi Forum Data Daerah	-	√	-	√	-	-

Sumber: Diskominfo Kab. Lombok Tengah, 2020

Dalam rangka menunjang layanan data di Kabupaten Lombok Tengah telah diperkenalkan aplikasi Satu Data berbasis web (<https://satudata.lomboktengahkab.go.id>), sehingga masyarakat diharapkan dapat mengakses data yang cepat tanpa alur birokrasi yang panjang. Bagi Pemerintah, aplikasi satu data ini mempermudah perangkat pemerintah daerah dalam mengakses data-data statistik sektoral. Beberapa permasalahan dalam pengembangan Satu Data Lombok Tengah adalah pengelolaan data sektoral belum optimal, kapasitas SDM teknis belum memadai, koordinasi antara OPD/ instansi/ lembaga terkait masih lemah.

Gambaran perkembangan hasil penyelenggaraan urusan Statistik Kabupaten Lombok Tengah seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 63 Perkembangan Hasil Penyelenggaraan
Urusan Statistik Kabupaten Lombok Tengah 2018-2019**

No	Uraian	Tahun		Keterangan
		2018	2019	
1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	Bappeda dan Bag. APU
2	Jumlah survey statistik sektoral yang telah dilakukan	32 OPD dan 12 Instansi Vertikal/Instansi lainnya	32 OPD dan 12 Instansi Vertikal dan Instansi lainnya	
3	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi statistic	32 OPD dan 12 Instansi Vertikal/Instansi lainnya	32 OPD dan 12 Instansi Vertikal dan Instansi lainnya	
4	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	1	
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS	-	1	

Sumber: Diskominfo Kab. Lombok Tengah, 2020

1.3.1.21 Persandian

Dalam rangka percepatan penyampaian informasi kebijakan kepala daerah telah dibangun *SMS gateway* sebagai media informasi dan komunikasi internal kepala daerah dengan para pemangku kepentingan dan media komunikasi eksternal kepala daerah dengan masyarakat.

Pengamanan informasi daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak ada permasalahan yang berarti, karena selama ini pengamanan informasi daerah mencapai 100% atau tidak ada kebocoran informasi, tetapi ketersediaan sumber Daya Manusia Persandian perlu dipersiapkan karena tenaga yang ada saat ini terbatas dan akan segera purna tugas.

1.3.1.22 Kebudayaan

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mendefinisikan kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Kabupaten Lombok Tengah memiliki ragam budaya dan adat istiadat yang kaya ragam, corak dan bernilai adi luhung. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 64 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah
1.	Manuskrip	13
2.	Tradisi Lisan	3
3.	Adat Istiadat	5
4.	Ritus	11
5.	Pengetahuan Tradisional	9
6.	Teknologi Tradisional	48
7.	Seni	24
8.	Bahasa	1
9.	Permainan Rakyat	12
10.	Olah Raga Tradisional	5
11.	Cagar Budaya	43

Sumber : Dinas Budpar Kab. Lombok Tengah, 2020

Untuk meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan terhadap OPK. Capaian pemajuan objek kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 65 Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Lombok Tengah

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan atraksi budaya yang memadukan keanekaragaman	5	5	7	10	12
2	Pelestarian benda situs dan kawasan cagar budaya	16	16	16	16	16
3	Pembinaan sanggar seni yang aktif	11	14	17	21	27

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, 2020

1.3.1.23 Perpustakaan

Dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca, Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki satu unit Perpustakaan Daerah dan dilengkapi dengan dua unit perpustakaan keliling. Disamping itu pembinaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat (masjid dan desa) terus dilakukan secara intensif. Untuk mengetahui tingkat

kunjungan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 66 Jumlah Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 - 2019

No	Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)	Jumlah Koleksi Buku (Eksemplar)
1	2016	22.169	74.567
2	2017	22.950	79.841
3	2018	24.706	32.234
4	2019	33.758	56.147

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah, 2020

Tabel 2. 67 Jumlah Perpustakaan yang Dibina di Kabupaten Lombok Tengah

Jenis Perpustakaan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Perpustakaan desa	Na	Na	83	83
Perpustakaan sekolah	25	29	60	60
Perpustakaan rumah ibadah	16	18	23	23

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah, 2020

1.3.1.24 Kearsipan

Untuk meningkatkan kualitas kearsipan di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan data yang ada jumlah tenaga arsiparis di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 stagnan, dimana jumlah tenaga arsiparis hanya 2 (dua) orang.

Tabel 2. 68 Jumlah Arsiparis dan Arsip Inaktif Yang dipilah

No	Tahun	Jumlah Arsiparis	Arsip Inaktif Dipilah
1	2016	2	na
2	2017	2	135
3	2018	2	140
4	2019	2	216

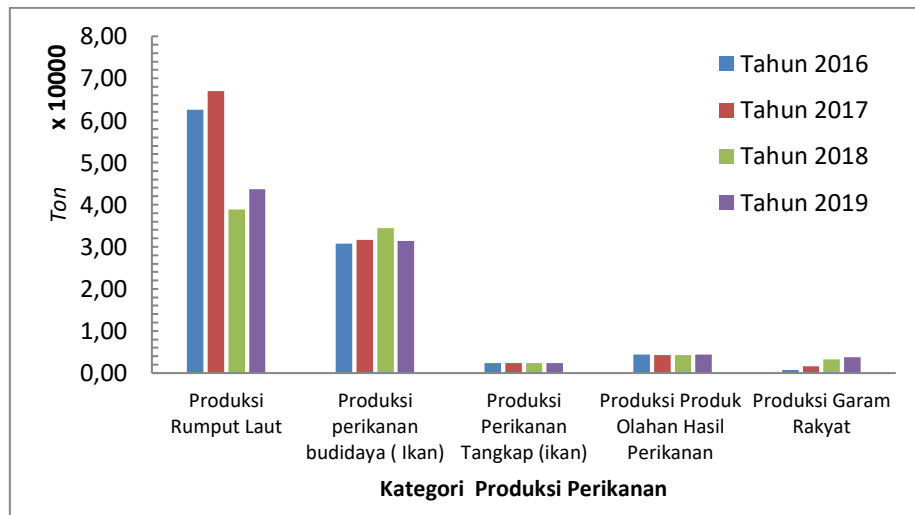
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah, 2018

Pengelolaan arsip yang baik menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam penemuan kembali arsip saat diperlukan. Semakin cepat penemuan kembali arsip menunjukkan semakin baik pengelolaan arsip yang ada. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah (2019), nilai rata-rata kecepatan pencarian dan penemuan arsip di Lombok Tengah masih tergolong cepat yaitu antara 2-3 jam/arsip. Hal ini menunjukkan sampai tahun 2019, secara rata-rata penemuan arsip tidak sampai melebihi 3 jam.

1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1.3.2.1 Perikanan

Produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Lombok Tengah bersumber dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap meliputi penangkapan dilaut dan penangkapan di perairan umum daratan (PUD), sedangkan perikanan budidaya yang dikembangkan yaitu budidaya ikan di air tawar, air payau dan budidaya laut serta pengembangan rumput laut. Perkembangan produksi perikanan dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 33 Perkembangan Produksi Perikanan 2016 - 2019

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Tengah, 2020

Produksi perikanan khususnya produksi ikan didominasi dari hasil produksi perikanan budidaya. Produksi ikan dalam periode empat tahun terakhir rata – rata sebanyak 34.415 ton/tahun dimana kontribusi perikanan budidaya sebesar 93% dan hanya 7% dari perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya (ikan) mengalami kecenderungan meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pada tahun 2016 produksi sebanyak 30.723,81 ton menjadi 31.333,62 ton di tahun 2019. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan produksi olahan hasil perikanan cenderung konstan pada empat tahun terakhir. Produksi rumput laut cenderung menurun dari tahun ke tahun karenesemakin sempitnya ruang untuk budidaya rumput laut, sedangkan produksi garam cenderung meningkat secara signifikan dari 712,18 ton pada tahun 2016 menjadi 3.708,98 ton pada tahun 2019 atau meningkat sekitar 420%.

1.3.2.2 Pariwisata

(a) Kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi Wilayah

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir tahun 2009- 2019, pariwisata dunia terus mengalami peningkatan. Wisatawan internasional (*intemational tourist*) meningkat dari 892 juta orang pada saat masa krisis tahun 2009 menjadi 1.461 juta orang pada tahun 2019. Indikator kinerja lain menunjukkan nilai strategis dari pariwisata dunia tahun

2019 antara lain: pertumbuhan 4%; satu dari sepuluh lapangan kerja di dunia diisi pekerja dari sektor pariwisata; berkontribusi 7% dari ekspor global.

Berdasar laporan *World Travel and Tourism Council (WTTC)* pada tahun 2017 sumbangan pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia mencapai 10 persen. Sementara penerimaan dari kunjungan wisatawan internasional menyumbang tujuh persen dari total ekspor barang dan jasa dunia atau 30 persen dari total ekspor jasa dunia. Dilihat dari penciptaan lapangan kerja, satu dari 10 tenaga kerja diciptakan karena adanya kegiatan pariwisata (UNWTO, 2018).

Peranan pariwisata dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaan (sisi demand) dapat diidentifikasi melalui: (1) porsi konsumsi rumah tangga untuk kegiatan wisata dalam negeri dan pengeluaran wisatawan Indonesia ke luar negeri sebelum meninggalkan dan setelah tiba di Indonesia; (2) porsi pengeluaran konsumsi pemerintah, untuk berbagai kegiatan terkait pariwisata; (3) porsi ekspor yang mencakup pengeluaran wisatawan mancanegara selama mereka berada di Indonesia; (4) porsi impor yang mencakup pengeluaran wisatawan Indonesia selama mereka berada di luar negeri; dan (5) porsi investasi untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata.

Tabel 2. 69 Peranan Pariwisata terhadap PDB Indonesia dari Sisi Neraca Pengeluaran Tahun 2017 (triliun rupiah)

Komponen	Konsumsi rumah tangga	Konsumsi pemerintah	Investasi	Ekspor	Impor
Pariwisata	261,5	13,6	160	198,9	110,9
PDB Nasional	7.627,00	1.236,90	4.370,60	2.768,10	2.604,40
Share pariwisata (%)	3,43	1,1	3,66	7,19	4,26

Sumber : BPS, 2019

Sementara itu kontribusi pariwisata (hotel dan restoran) di Provinsi NTB terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 2,03 % (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019) sedangkan kontribusi sektor pariwisata (pajak hotel dan restoran) di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 terhadap PAD sebesar 10 %.

Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) pada bulan Maret 2020 mengumumkan bahwa dampak wabah Covid-19 akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata dengan jutaan mata pencaharian diseluruh dunia terkena dampak Covid-19. Dalam merespon wabah Covid-19, UNWTO telah merevisi prospek pertumbuhan wisatawan internasional negatif 1% hingga 3%.

(b) Potensi Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah

Salah satu potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Tengah, pengunjung dapat memiliki pengalaman akan banyaknya atraksi wisatawan, banyaknya karakteristik pariwisata, atau bahkan banyaknya aktivitas pariwisata di dalam satu Kabupaten. Hal ini menjadi sebuah pengalaman pariwisata yang lengkap dalam satu

kabupaten. Oleh karena itu, hal tersebut akan menjadi potensi yang besar untuk menangkap seluruh segmen pasar dan dapat menjadi diferensiasi dari destinasi lainnya di Indonesia maupun di Asia Tenggara.



Gambar 2. 34 Skema Konsep *Complete Tourism Experience*
Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019

(c) Jumlah Wisatawan

Wisatawan nusantara atau *domestic tourists* adalah seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial dan atau menginap di akomodasi komersial dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. Berdasarkan tabel berikut kunjungan wisatawan nusantara ke Lombok Tengah dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan dari 59.148 orang menjadi 113.959 orang, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 70.539 orang sebagai dampak bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok di tahun tersebut. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan turun drastis menjadi 44.559 orang sebagai dampak pandemi Covid19.

Tabel 2. 70 Jumlah Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal Tahun 2016-2020

Tahun	JumlahWisatawanKategori <i>Overnight Visitor</i> (Orang)		Total	Rata -Rata Lama Tinggal (Hari)
	Asing	Domestik		
2016	49.769	59.148	108.917	3,25
2017	86.524	113.959	200.483	3,50
2018	83.176	70.539	153.715	3.00
2019	74.875	61.700	136.575	3,00
2020	17.849	26.710	44.559	3,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah, 2021

(d) Asal Wisatawan Asing

Sesuai dengan *International Recommendations Tourism Statistics* (IRTS) 2008 yang diterbitkan *United Nations Statistics Division* (UNSD) dan *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), definisi wisatawan mancanegara (wisman) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari

satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi.

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lombok Tengah melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 berdasarkan tabel di bawah didominasi oleh wisatawan dari Malaysia, Australia, China, Inggris, Jerman, Singapura, dan Perancis.

Tabel 2. 71 Kedatangan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Menurut Kebangsaan Melalui Bandara Internasional Lombok 2016 S/D 2019

No.	Negara Asal/ Kebangsaan	2016	2017	2018	2019
1	Brunei Darussalam	134	142	85	46
2	Malaysia	49 456	54 710	36 765	13 023
3	Filipina/Phillippines	287	400	204	212
4	Singapura/Singapore	5 838	5 364	3 251	2 410
5	Thailand	395	1 077	1 031	309
6	Vietnam	105	279	189	150
7	Myanmar	19	74	54	27
8	Asean Lainnya/Other Asean	3 784	17 237	6 424	1 613
	TOTAL ASEAN	60 018	79 283	48 003	17 790
9	Hongkong	261	397	332	108
10	India	887	867	828	815
11	Jepang/Japan	868	1 079	891	877
12	Korea Selatan/Korea Rep.	2 375	4 492	1 640	752
13	Pakistan	1	3	16	34
14	Bangladesh	53	78	117	92
15	Sri Lanka	40	37	30	55
16	Taiwan	291	511	626	268
17	Tionghoa/China	4 088	8 154	7 778	6 115
18	Timor Leste			-	-
19	Asia Lainnya/Other Asia	133	259	271	130
	TOTAL ASIA (Excl.ASEAN)	8 997	15 877	12 529	9 246
20	Saudi Arabia	74	88	98	40
21	Bahrain	3	1	1	2
22	Kuwait	3	6	2	-
23	Mesir/Egypt	26	45	41	14
24	Uni Emirat Arab/U.Arab Emirates	3	16	1	1
25	Yaman/Yemen	10	19	20	7
26	Qatar	0	2	-	-
27	Timur Tengah Lainnya	58	86	55	64
	TOTAL MIDDLE EAST	177	263	218	128
28	Austria	285	487	279	255
29	Belgia/Belgium	452	416	248	289
30	Denmark	472	377	286	272
31	Perancis/France	2 353	2 757	1 937	1 824
32	Jerman/Germany	2 824	3 958	2 506	2 768
33	Italia/Italy	708	797	533	512
34	Belanda/Nederlands	1 230	1 705	1 000	897
35	Spanyo/Spain	503	1 357	492	577
36	Portugal*)	108	174	119	139
37	Swedia/Sweden	497	637	523	488
38	Swiss/Switzerland	832	1 053	917	759
39	Inggris/United Kingdom	3 873	4 937	3 297	3 573
40	Finlandia/Finland	359	276	193	180
41	Norwegia/Norway	217	248	248	282
No.	Negara Asal/ Kebangsaan	2016	2017	2018	2019
42	Eropa Barat Lainnya/Other West Europe	282	323	235	276
43	Rusia/Russia	398	554	457	317
44	Eropa Timur Lainnya/Other East Europe	1 086	1 553	1 064	1 109

No.	Negara Asal/ Kebangsaan	2016	2017	2018	2019
	TOTAL EUROPE	16 479	21 609	14 334	14 517
45	Amerika Serikat/USA	1 664	2 133	1 574	1 195
46	Kanada/Canada	454	722	432	513
47	Amerika Tengah/Central America	14	10	15	6
48	Amerika Selatan/South America	220	478	437	339
49	Amerika Lainnya/Other America*)	48	55	42	44
	TOTAL AMERICA	2 400	3 398	2 500	2 097
50	Australia	2 526	2 211	1 594	12 857
51	Selandia Baru/New Zealand	258	410	277	774
52	Papua New Guinea			-	-
53	Oceania Lainnya/Other Oceania	1	0	1	3
	TOTAL OCEANIA	2 785	2 621	1 872	13 634
54	Afrika Selatan/South Africa	136	181	156	234
55	Afrika Lainnya/Other Africa	110	156	195	117
	TOTAL AFRICA	246	337	351	351
	GRAND TOTAL	91 102	123 388	79 807	57 763

Sumber : PT. Angkasa Pura II (Persero), 2019

(e) Key Destination Area Wisata

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Lombok Tengah, telah ditentukan beberapa lokasi kunci sebagai tujuan wisata yang terapat di Kecamatan Pujut dan Praya Barat. Key destination area di Kecamatan Pujut antara lain Pantai Mawun, sekitar Mandalika, Desa Sade-Ende, dan Teluk Awang. Sedangkan di Kecamatan Praya Barat antara lain Pantai Selong Belanak.

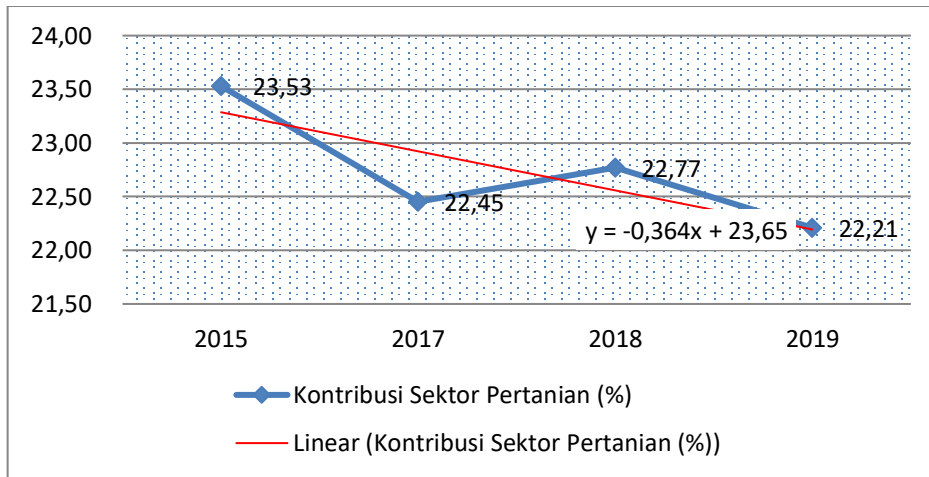


Gambar 2. 35 Tema dan Rencana Aksi Prioritas

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah, 2019

1.3.2.3 Pertanian

Pertanian masih menjadi penggerak utama perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah. Peran sektor pertanian tergambarkan dari kontribusinya terhadap PDRB. Pada periode tahun 2016-2020 sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi terhadap PDRB, meskipun tren kontribusinya menurun. Share pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada grafik berikut. 26,80 di tahun 2020.

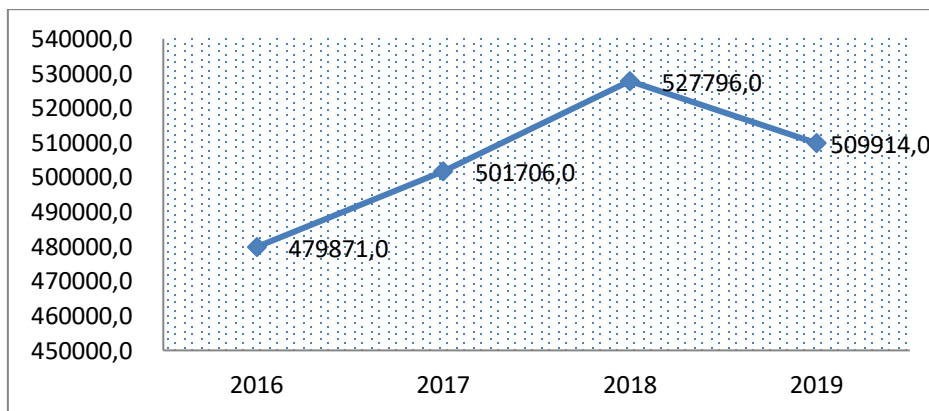


Gambar 2. 36 Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Sumber : Bappeda Lombok Tengah, 2020

Adapun perkembangan produksi pertanian unggulan daerah adalah sebagai berikut:

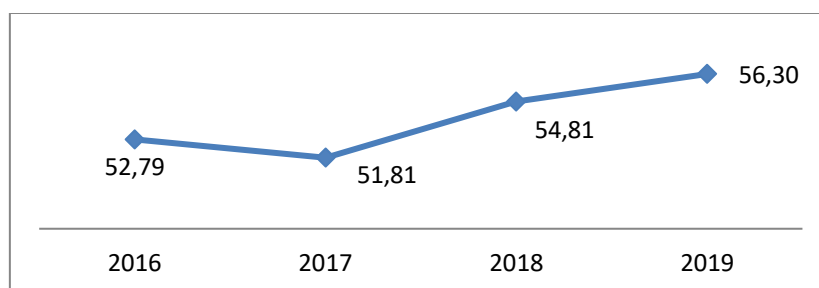
(a) Padi

Produksi padi di Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat dalam tiga tahun terakhir meskipun terjadi penurunan kembali di tahun 2019. Produksi padi di tahun 2019 sebanyak 509.914ton turun dari capaian tahun 2018 sebesar 527.796 ton. Turunnya produksi padi di tahun 2019 paralel dengan penyusutan luas lahan sawah dari 54.355 ha di tahun 2017 menjadi 49.253 ha di tahun 2018. Perkembangan produksi padi dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 37 Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

Indikator provitas tanaman padi menunjukkan kecenderungan yang meningkat, pada tahun 2016 provitas sebesar 52, 79 ton/ha menjadi 56,43 ton per hektar pada tahun 2019. Perkembangan provitas dapat dilihat grafik berikut.

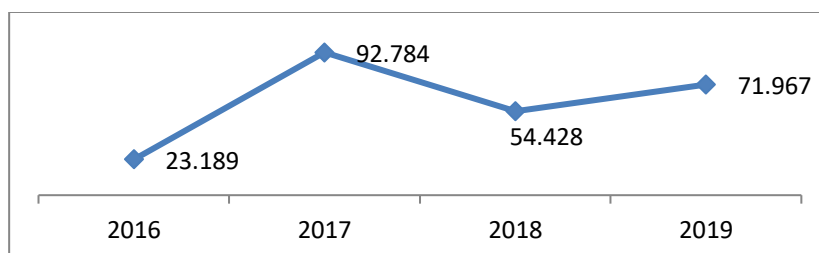


Gambar 2. 38 Provitas Padi di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019
 Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

Perbandingan provitas padi di Kabupaten Lombok Tengah relatif baik bila dibandingkan dengan provitas tanaman padi di Provinsi NTB. Pada tahun 2018 provitas padi NTB berkisar pada angka 50,70 ton ha, sedangkan di Kabupaten Lombok Tengah provitas sudah mencapai angka 56,66 ton.ha atau 11,7% diatas provitas rata – rata tanaman padi di Provinsi NTB.

(b) Jagung

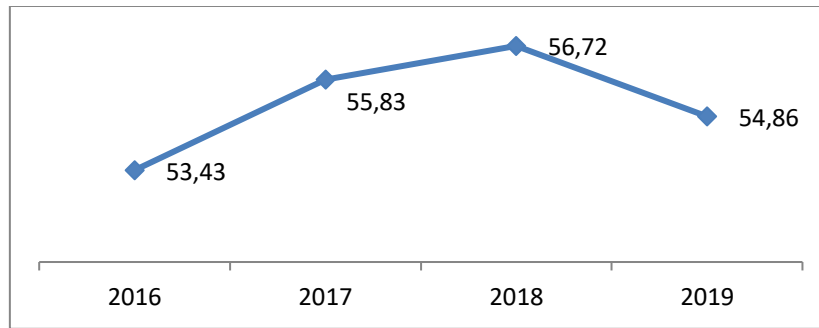
Jagung merupakan komoditi yang potensial dikembangkan menjadi bahan pangan pokok karena kandungannya yang kaya akan serat komponen fungsional. Lombok Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki produksi komoditas jagung potensial. Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB (2014), hasil evaluasi lahan secara fisik menunjukkan bahwa kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang tergolong sangat sesuai (S1) seluas 7.973 ha (6,99%), cukup sesuai (S2) seluas 64.226 ha(56,33%) dan sesuai marginal (S3) seluas 36.032 ha (31,60%).



Gambar 2. 39 Produksi Jagung Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019
 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2019

Produksi jagung dalam periode lima tahun berfluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh intervensi program dari pemerintah dan peningkatan preferensi masyarakat terhadap komoditas jagung. Semakin besar intervensi program maka akan meningkatkan produksi jagung. Perkembangan produksi jagung dapat dilihat grafik di atas.

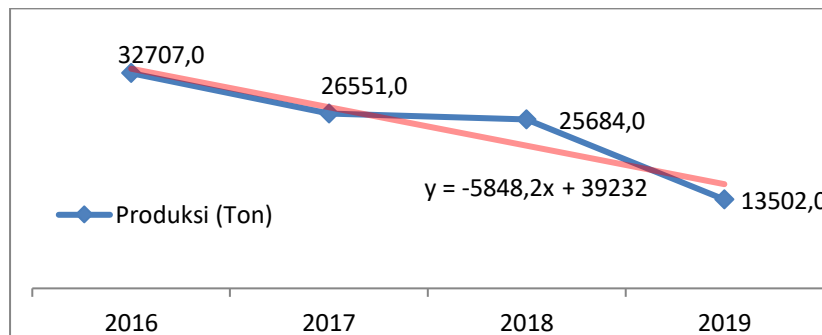
Indikator provitas jagung berfluktuatif dalam lima tahun terakhir, provitas pada tahun 2019 54,86 kw/ha atau meningkat sebesar 6,4% dibandingkan provitas tahun 2016. Dibandingkan dengan provitas jagung rata – rata nasional tahun 2018 sebesar 52,41, maka provitas jagung Lombok tengah Lebih tinggi.



Gambar 2. 40 Provititas Jagung di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

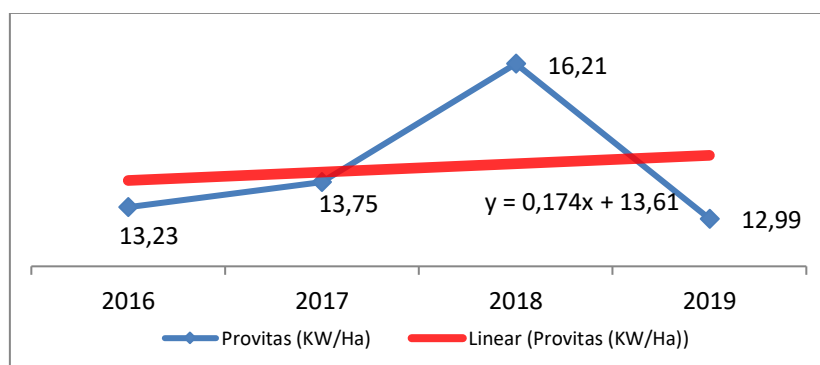
(c) Kedelai

Produksi kedelai menurun dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2016 produksi kedelai sebesar 32.708 ton dan pada tahun 2019 produksinya hanya mencapai 13.502 ton atau menurun hingga mencapai 59 persen. Penurunan produksi disebabkan berkurangnya luasan areal tanam akibat menurunnya preferensi petani terhadap komoditas kedelai dan produktivitas tanaman kedelai yang stagnan setiap tahunnya. Perkembangan produksi kedelai sebagai berikut.



Gambar 2. 41 Produksi Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016– 2019
Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

Indikator produktivitas tanaman kedelai berfluktuatif dalam lima tahun terakhir, namun demikian masih memiliki tren positif. Provititas pada tahun 2016 sebesar 13,23 kw/ha terus meningkat dan provititas tertinggi pada tahun 2018 dengan provititas sebesar 16,21 ton/ha. Jika dibandingkan dengan provititas kedelai rata-rata nasional sebesar 14,44 kw/ha, provititas kedelai Lombok Tengah masih lebih tinggi. Perkembangan provititas tanaman kedelai dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 42 Provititas Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016– 2019

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

(d) Ternak Besar

Perkembangan peternakan khususnya ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) menunjukkan kinerja yang positif dalam periode tahun 2016-2019. Perkembangan populasi ternak besar dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2. 72
Populasi Ternak Sapi, Kerbau dan Kuda
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)			
		2017	2018	2019	2020
1	Sapi	168.220	173.266	176.982	179.189
2	Kerbau	20.457	21.132	21.545	21.772
3	Kuda	1.260	1.748	1.845	1.567

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

Populasi ternak besar meningkat jumlahnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Perkembangan jumlah populasi khususnya sapi merupakan dampak dari intervensi program dalam bidang peternakan. Upaya peningkatan jumlah ternak sapi dilaksanakan dengan meningkatkan jumlah indukan dan optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) serta peningkatan layanan keswan.

1.3.2.4 Perkebunan

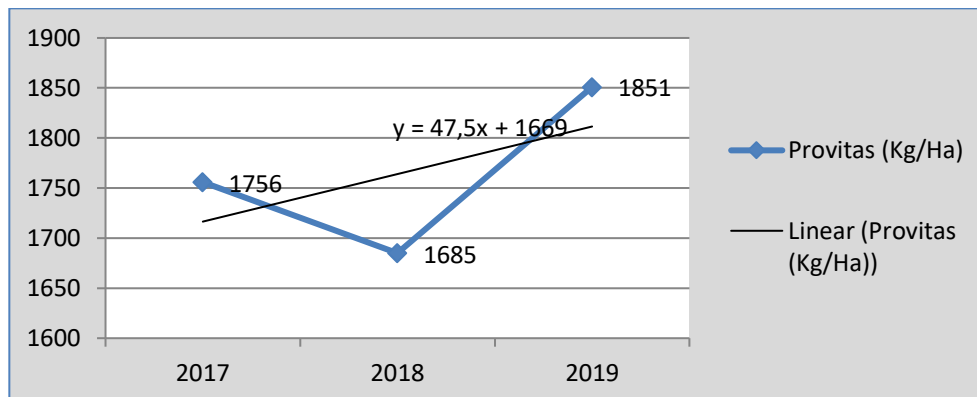
Pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan komoditas tanaman bernilai ekonomi. Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi untuk pengembangan komoditas tanaman perkebunan baik tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Komoditas tembakau khususnya tembakau virginia, pengembangan komoditas ini telah dilaksanakan secara baik yang menerapkan konsep agribisnis yang ditandai dengan adanya pola kemitraan antara *private sector* dan petani sehingga komoditas tembakau virginia telah berkembang menjadi unggulan daerah dan berkontribusi secara nasional. Perkembangan produksi tanaman unggulan perkebunan dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2. 73
Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

No	Tanaman	Jumlah Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tembakau Virginia	12.577	18.641	14.946	19.896	20.224
2.	Tembakau Rajangan/Rakyat	1.275	1.006	686	924	707

Sumber : BPS, 2020

Perkembangan provitas tembakau virginia berfluktuatif namun masih menunjukkan tren positif. Pada tahun 2017 provitas tembakau virginia sebesar 1.756 kg/ha sedangkan pada tahun 2019 mencapai 1.851 Kg/ha.



Gambar 2. 43 Perkembangan Provitas Tembakau Virginia Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

1.3.2.5 Perdagangan

Peran sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah sangat strategis yang dapat dilihat dari kontribusinya/share terhadap PDRB. Data BPS menunjukkan adanya peningkatan *share* sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, perdagangan menyumbang 10,83% terhadap PDRB, tahun 2017 sebesar 11,09%, tahun 2018 sebesar 11,47% dan di tahun 2019 berkontribusi sebesar 11,84%.

Salah satu yang mendukung peningkatan *share* perdagangan terhadap PDRB adalah meningkatnya jumlah sarana distribusi perdagangan baik pasar, toko maupun kios. Ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang berkualitas khususnya pasar sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian daerah, untuk itu rehabilitasi dan revitalisasi pasar menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing pasar. Jumlah sarana perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 74
Jumlah Prasarana Pasar dan Toko Modern di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

Tahun	Pasar	Toko Modern
2019	45	115

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lombok Tengah, 2020

1.3.2.6 Industri

Industri yang banyak berkembang di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh industri kecil yang terkonsentrasi pada olahan pangan dan kerajinan. Industri kecil khususnya kerajinan merupakan unggulan daerah, dengan produk unggulannya

diantaranya tenun dan songket, anyaman bambu dan roket, perak dan gerabah. Perkembangan industri kecil dan serapan tenaga kerja dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2. 75
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2019

No	Cabang Industri	2017			2018			2019		
		Unit usaha (unit)	tenaga kerja (orang)	nilai produksi (rp. 000)	unit usaha (unit)	tenaga kerja (orang)	nilai produksi (rp. 000)	unit usaha (unit)	tenaga kerja (orang)	nilai produksi (rp. 000)
1	Industri Agro	6,304	17,637	177,685,300	6,245	17,623	267,605,700	6,272	17,655	267,849,700
2	Industri Sandang	8,034	8,377	18,061,160	8,034	8,377	18,061,160	8,141	8,484	18,061,160
3	Industri Kimia & Bahan Bangunan	1,503	3,927	131,717,548	1,503	3,927	131,717,548	1,503	3,927	131,717,548
4	Industri Kerajinan	18,789	26,113	93,576,563	18,855	26,247	103,680,963	19,267	26,751	103,772,043
5	Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka	726	1,714	29,584,550	734	1,714	29,584,550	759	1,732	30,784,550
	JUMLAH	35,356	57,768	450,625,120	35,371	57,888	550,649,920	35,942	58,549	552,185,000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

Perkembangan IKM dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang membaik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah unit usaha, jumlah tenaga terserap dan nilai produksi. Jumlah unit usaha tahun 2017 sebanyak 35.356 unit terus bertambah setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 mencapai 35.942 unit usaha. Demikian halnya jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha IKM meningkat dari 57.768 orang pada tahun 2017 menjadi 58.549 orang pada tahun 2019.

Nilai produksi IKM pada tahun 2019 meningkat sebesar 22,53% dari nilai produksi tahun 2017. Nilai produksi aktual tahun 2019 sebesar Rp. 552.185.000.000,-

1.3.2.7 Transmigrasi

Dalam rangka penataan persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan RWPT dan RTSP di rencana Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) Desa Plambik dan Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya termasuk Kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi seluas 300 Ha dengan jumlah sasaran 300 KK. Sampai dengan tahun 2019, jumlah transmigran yang dibina sebanyak 5 KK.

Tabel 2. 76 Jumlah Trasmigran yang Dibina di Kabupaten Lombok Tengah

2016	2017	2018	2019
5 KK	5 KK	20 KK	5 KK

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Lombok Tengah, 2020

Sedangkan untuk kawasan transmigrasi yang sudah ada yakni Desa Batu Jangkih dan Mekar Sari masih diarahkan pada pemberdayaan keluarga transmigran dengan rumah tangga sasaran sejumlah 270 KK dengan luas kawasan 270 ha.

1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitasi wilayah atau infrastruktur, iklim dan sumberdaya manusia.

1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

1.4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta/dihasilkan disuatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.

PDRB Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai 17,88 triliun rupiah, meningkat sebesar 6,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan terjadinya peningkatan volume produksi sekaligus perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 12,40 triliun rupiah, meningkat 4,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 77 PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Tahun 2017-2019 (juta rupiah)

Tahun	Berlaku	Konstan 2010
(1)	(2)	(3)
2017	15.779.244,25	11.553.464,76
2018*	16.714.305,14	11.918.687,94
2019**	17.881.009,13	12.403.664,83

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2019

Ket : *angka sementara **angka sangat sementara

Untuk mengetahui dominasi dan melihat ada tidaknya transformasi struktur ekonomi, tujuh belas kategori lapangan usaha dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: Sektor Primer, Sektor Sekunder dan Sektor Tersier.



Gambar 2. 44 Struktur Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah menurut Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2017-2019 (persen)

Sumber: BPS 2020

Dari ketiga kelompok sektor tersebut, sektor tersier mendominasi perekonomian Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2019. Nilai tambah yang diciptakan sektor ini meningkat setiap tahunnya, dari 8,63 triliun rupiah di tahun 2017 menjadi 9,35 triliun rupiah atau berkontribusi 52,30 persen terhadap total PDRB Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019. Keberadaan Lombok Internasional Airport mendorong peningkatan nilai tambah yang tercipta dari sektor Tersier. Sektor Primer yang didalamnya termasuk kategori Pertanian, hanya menyumbang hampir sepertiga perekonomian Lombok Tengah. Sektor ini menghasilkan nilai tambah sebesar 5,23 triliun rupiah. Bertambahnya produktivitas sektor primer masih didominasi oleh kinerja kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sedangkan sektor Sekunder penyumbang terendah bagi perekonomian Lombok Tengah, hanya 3,29 triliun rupiah atau sekitar 18,42 persen dari perekonomian Lombok Tengah. Hal ini karena peningkatan kategori yang masuk dalam sektor ini tidak sebanyak kategori yang tercakup dalam sektor Tersier maupun Primer.

1.4.1.2 Kemampuan Fiskal Daerah / Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program – program pembangunan menunjukkan peningkatan, pada tahun 2016 APBD Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 1.930.329.082.305,70 menjadi Rp. 2.155.687.126.109,00 pada tahun 2019 atau meningkat menjadi 11,67% dalam lima tahun terakhir. Indeks kemandirian fiskal di Kabupaten Lombok Tengah masih pada kategori belum mandiri (Rasio PAD terhadap APBD masih dibawah 25%). Berdasarkan capaian RPJMD sebelumnya, di tahun 2019 tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah baru 9,65%. Meskipun

menunjukkan trend realisasi PAD meningkat, rendahnya kemandirian fiskal ini menjadi tantangan di masa depan.

Tabel 2. 78 Target dan Realisasi APBD Tahun 2016 s/d 2018

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	1.923.943.135.886,31	1.930.329.082.305,70	100,33
2	2017	1.939.411.562.943,73	1.917.035.737.682,65	98,85
3	2018	2.000.817.203.189,17	1.976.693.763.598,60	98,79
4	2019	2.152.687.126.109,00	2.155.687.126.109,00	100,14

Sumber : BPKAD Kab. Lombok Tengah, 2019

Tabel 2. 79 Target dan Realisasi PAD Tahun 2016 s/d 2019

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	157.674.326.963,00	166.443.247.023,43	105,56
2	2017	280.671.302.747,73	286.691.384.414,65	102,14
3	2018	194.640.639.337,17	187.324.721.970,60	96,24
4	2019	199.768.850.000,00	204.512.599.142,12	102,37

Sumber : BPKAD Kab. Lombok Tengah, 2019

1.4.2 Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

RTRW sebagai salah satu rencana tata ruang merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan penataan ruang yang berisi rencana struktur dan pola ruang serta penetapan kawasan strategis yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan polaruang wilayah daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis. Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki RTRW melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 2011- 2031.

Dari tahun 2016 hingga 2019 tidak terjadi perubahan realisasi luasan kawasan lindung di Kabupaten Lombok Tengah yaitu seluas 18.188,45 hektar. Luasan ini telah mendekati rencana peruntukan kawasan lindung dalam RTRW sebesar 18.198,45 hektar dengan rasio realisasi mencapai 99 persen.

Tabel 2.23

Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016-2019 di Kabupaten Lombok Tengah

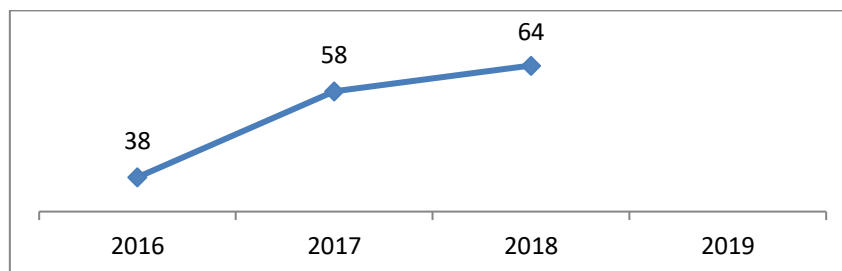
No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Realisasi RTRW (Kawasan Lindung)	16.982,45	16.982,45	16.982,45	16.982,45
2	Rencana Peruntukan Ruang (Kawasan Lindung)	16.992,45	16.992,45	16.992,45	16.992,45
3	Rasio (1/2)	0,99941	0,99941	0,99941	0,99941

Sumber: Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2019

1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kejahatan yang dilaporkan yang dalam kurun waktu 2016 hingga 2019 mengalami penurunan dari 1.024 kasus dilaporkan pada tahun 2016 menjadi 439 kasus di tahun 2019. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.31, selama kurun waktu 2016-2019 jenis kejahatan terbanyak adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang jumlahnya tetap tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi tantangan terbesar dalam upaya menciptakan keamanan wilayah demi terwujudnya iklim berinvestasi yang kondusif. Berdasarkan capaian RPJMD 2016-2021 sampai dengan tahun 2019 dengan target indikator kinerja daerah sebanyak 275 kasus, realisasi masih lebih besar dari target yaitu sebanyak 295 kasus angka kriminalitas. Data yang disampaikan Satpol PP ini juga memperkuat anggapan bahwa persoalan keamanan masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Lombok Tengah.

Terkait ketertiban umum dan masyarakat, dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik, jumlah demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dalam tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 tercatat 38 kasus demonstrasi dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 58 kasus dan bertambah lagi di tahun 2018 dengan 64 kasus demonstrasi.



Gambar 2. 45 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2019
Sumber : BPS NTB, 2019

1.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD

1.5.1 Realisasi RKPD Tahun 2020

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dilakukan dengan menganalisis capaian pelaksanaan program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap perangkat daerah yang meliputi realisasi kinerja maupun realisasi keuangan. Realisasi keuangan dihitung dengan menggunakan satuan persen (%) yang dilakukan melalui pembagian besaran realisasi keuangan terhadap total anggaran dikali seratus. Nilai persentase realisasi keuangan kemudian diberikan predikat berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 pada tabel T-E.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 80 Skala Nilai Peringkat Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PREDIKAT NILAI REALISASI KINERJA
91%≤100%	Sangat Tinggi
76%≤90%	Tinggi
66%≤76%	Sedang
51%≤66%	Rendah
≤50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, skala nilai peringkat kinerja dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil rendah dan sangat rendah

Gradasi ini menunjukkan realisasi kinerja belum memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan capaian kinerja yang diraih oleh perangkat daerah dalam memenuhi target indikator di tahun 2020, sampai dengan triwulan IV dari 44 perangkat daerah seluruhnya memperoleh predikat Sangat Tinggi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 81 Predikat Kinerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Capaian			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
1	Dinas Pendidikan	97.35%	SANGAT TINGGI	106.34%	SANGAT TINGGI
2	Dinas Kesehatan	140.65%	SANGAT TINGGI	89.10%	SANGAT TINGGI
3	Rumah Sakit Umum Daerah	110.98%	SANGAT TINGGI	90.22%	SANGAT TINGGI
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	107.22%	SANGAT TINGGI	95.38%	SANGAT TINGGI
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	98.35%	SANGAT TINGGI	96.15%	SANGAT TINGGI
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92.65%	SANGAT TINGGI	97.08%	SANGAT TINGGI
7	Satuan Polisi Pamong Praja	178.52%	SANGAT TINGGI	99.27%	SANGAT TINGGI
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	107.01%	SANGAT TINGGI	97.19%	SANGAT TINGGI
9	Dinas Sosial	60.91%	TINGGI	96.88%	SANGAT TINGGI
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	90.84%	SANGAT TINGGI	92.13%	SANGAT TINGGI
11	Dinas Pemberdayaan	70.44%	SANGAT	90.22%	SANGAT

No	Perangkat Daerah	Capaian			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
	Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		TINGGI		TINGGI
12	Dinas Ketahanan Pangan	104.77%	SANGAT TINGGI	97.68%	SANGAT TINGGI
13	Dinas Lingkungan Hidup	108.96%	SANGAT TINGGI	99.03%	SANGAT TINGGI
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	SANGAT TINGGI	95%	SANGAT TINGGI
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86.11%	SANGAT TINGGI	98.29%	SANGAT TINGGI
16	Dinas Perhubungan	98.84%	SANGAT TINGGI	97.20%	SANGAT TINGGI
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	227.00%	SANGAT TINGGI	97.93%	SANGAT TINGGI
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	399.00%	SANGAT TINGGI	99.06%	SANGAT TINGGI
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	113.72%	SANGAT TINGGI	91.37%	SANGAT TINGGI
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	113.00%	SANGAT TINGGI	96.54%	SANGAT TINGGI
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	64.39%	TINGGI	99.24%	SANGAT TINGGI
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	90.65%	SANGAT TINGGI	96.21%	SANGAT TINGGI
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	42.14%	RENDAH	86.61%	SANGAT TINGGI
24	Dinas Pertanian	172.53%	SANGAT TINGGI	94.66%	SANGAT TINGGI
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100%	SANGAT TINGGI	96%	SANGAT TINGGI
26	Sekretariat Daerah	83.99%	SANGAT TINGGI	93.49%	SANGAT TINGGI
27	Sekretariat DPRD	117.72%	SANGAT TINGGI	97.35%	SANGAT TINGGI
28	Kantor Camat Praya	63.06%	TINGGI	97.46%	SANGAT TINGGI
29	Kantor Camat Praya Tengah	95.97%	SANGAT TINGGI	99.57%	SANGAT TINGGI
30	Kantor Camat Praya Barat	37.23%	RENDAH	95.92%	SANGAT TINGGI
31	Kantor Camat Praya Barat Daya	659.08%	SANGAT TINGGI	98.58%	SANGAT TINGGI
32	Kantor Camat Praya Timur	4.02%	SANGAT RENDAH	99.05%	SANGAT TINGGI
33	Kantor Camat Pujut	89.61%	SANGAT TINGGI	98.42%	SANGAT TINGGI
34	Kantor Camat Janapria	34.25%	SANGAT RENDAH	99.61%	SANGAT TINGGI
35	Kantor Camat Kopang	81.09%	SANGAT TINGGI	97.82%	SANGAT TINGGI
36	Kantor Camat Batukliang	77.57%	SANGAT TINGGI	98.52%	SANGAT TINGGI
37	Kantor Camat Batukliang Utara	72.41%	SANGAT TINGGI	98.48%	SANGAT TINGGI
38	Kantor Camat	198.94%	SANGAT	99.00%	SANGAT

No	Perangkat Daerah	Capaian			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
	Pringgarata		TINGGI		TINGGI
39	Kantor Camat Jonggat	70.18%	SANGAT TINGGI	96.20%	SANGAT TINGGI
40	Inspektorat Daerah	105.01%	SANGAT TINGGI	99.47%	SANGAT TINGGI
41	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	SANGAT TINGGI	97.64%	SANGAT TINGGI
42	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	93.59%	SANGAT TINGGI	95.97%	SANGAT TINGGI
43	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	80.45%	SANGAT TINGGI	96.62%	SANGAT TINGGI
44	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	72.60%	SANGAT TINGGI	96.77%	SANGAT TINGGI

1.5.2 Realisasi RPJMD

Dalam Perubahan RPJMD 2016-2021, struktur RPJMD terdiri dari 5 (lima) tujuan, 13 (tiga belas) sasaran, 13 (tiga belas) indikator kinerja utama (IKU) dan 130 indikator kinerja daerah. Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 telah memperhatikan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada setiap periode pelaksanaan RPJMD dapat dicapai.

Rincian rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Daerah lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 82 Capaian Kinerja RPJMD 2016-2021 di Tahun 2020

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2016	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target Akhir 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)
I	Misi 1 : Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai nilai agama dan kearifan lokal									
	1.1	T-1	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	Indeks Toleransi	Poin	#N/A	3,56	3,72	3,45	103
	1.1.1	S-1	Terpeliharanya Stabilitas Sosial	Tingkat kriminalitas	Kasus/100.000 penduduk	99,01	39,37	48,36	81,63	152
	1.1.2	S-2	Terpeliharanya kerukunan umat beragama	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	0	0	0	0	100
II	Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender									
	2.1	T-2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	IPM	Poin	63,22	66,36	66,43	67,87	98
					Angka Kemiskinan	%	15,80	13,63	13,44	13,86

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2016	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target Akhir 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,90	2,44	3,74	2,83	114
	2.1.1	S-3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,6	5,96	6,28	6,88	86.63
				Harapan lama sekolah	Tahun	12,83	13,50	13,67	14,15	95.19
				PAUD terakreditasi A	%	0,31	0	1,11	1,53	0
				SD terakreditasi A	%	3,01	13,6	5,79	6,86	198.25
				SMP terakreditasi A	%	1,68	10,2	9,5	13,97	73.01
	2.1.2	S-4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,01	65,59	66,21	66,06	99.29
	2.1.3	S-5	Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja	Angka PMKS	Orang	9.319	214.146	68.752	1.092	-6096
				tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71,81	71,13	75,04	74,65	95

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2016	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target Akhir 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)
				Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Rp (000/tahun)	9.079	9.796	9.952	10.252	96
III	Misi 3 : Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas									
	3.1	T-3	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,67	4,07	-6.08	6,61	62
				Indeks Gini	Poin	0,352	0,312*	0.312*	0,332	87
	3.1.1	S-6	Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	3,21	3,52	-3.05	4,68	75.21
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	9,54	2,60	-20.43	8,81	29.51

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2016	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target Akhir 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
	3.1.2	S-7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	104,36	107,13	109.22	105,69	101.36
				Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85,00	90,70	93.8	86,00	105.47
IV			Misi 4 : Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infra struktur yang memadai							
	4.1	T-4	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan	Indeks Wiliamson	Poin	0,42	0,36	0.36*	0,39	107.69
	4.1.1	S-8	Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	60,62	70,62		79,11	89.27
	4.1.2	S-9	Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	45,17	66,25	66,25	53,5	95.5
				Ketaatan terhadap RTRW	%	77,32	#N/A	81,40	86,71	

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2016	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target Akhir 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)
	4.1.3	S-10	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	110	58,15	14,86	11,65	-299
				Spot kawasan kumuh dan rawan bencana	Spot	13	#n/a	6	1	
	4.1.4	S-11	Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	15	27	33	35	77
V	Misi 5 : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas									
	5.1	T-5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai EKPPD	Poin	31,269	30,479	3,0479*	31,545	96,62
	5.1.1	S-12	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	CC*	B	66,57
				Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	WTP	WTP	WTP*	WTP	100

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2016	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target Akhir 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)
	5.1.2	S-13	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	8,6	9,65	9,64*	9,35	103.21

Sumber : Evaluasi RPJMD 2016-2021 Tahun 2020

Tabel 2. 83
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020
Terhadap Target Akhir RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

KO DE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIS ASI 2019	REALISASI 2020		Tingk at Capai an RPJMD 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
				Target	Realisasi		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
A	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.07	6.56	-6.68	- 101.8 3	6.61
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	3.52	4.47	-3.05	- 68.23	4.68
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	2.6	8.24	-20.43	- 247.9 4	8.81
	Angka Kemiskinan	%	13.63	14.17	13.44	94.85	13.86
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.44	2.84	1.74	61.27	2.83
	Indeks Gini	Poin	0.312*	0.336	0.312*	#VAL UE!	0.332
	Indeks Wiliamson	Poin	0.36	0.4	0.36*s	#VAL UE!	0.39
B	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL						
	IPM	Poin	66.36	67.19	66.43	98.87	67.87
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	5.96	6.74	6.28	93.18	6.88
	Harapan lama sekolah	Tahun	13.5	13.93	13.67	98.13	14.15
	Persentase melek huruf usia 15-55 tahun	%	89.87	90.3	89.91	99.57	92.8
	PAUD terakreditasi A	%	0	1.53	1.11	72.55	1.53
	SD terakreditasi A	%	13.6	6.02	5.79	96.18	6.86
	SMP terakreditasi A	%	10.2	11.73	9.5	80.99	13.97
	Usia Harapan Hidup	Tahun	65.59	65.91	66.21	100.4 6	66.06
	Angka PMKS	Orang	68.752	1.901	68.752*	#VAL UE!	1.092
C	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA						
	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan	%	10	5	12	240.0 0	5
	Jumlah atlet berprestasi (Provinsi, nasional dan internasional)	Orang	27	19	0	0.00	20
ASPEK PELAYANAN UMUM							
I	URUSAN WAJIB						
A	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR						
1	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN						
	APK PAUD	%	68.86	80.04	67.21	83.97	81.99
	APK SD/MI	%	112.5	107.99	111.17	102.9 4	106.99
	APK SMP/MTs	%	103.35	100	110.57	110.5 7	100
	APM SD/MI	%	98.61	99.91	98.22	98.31	100
	APM SMP/MTs	%	77.42	99.25	87.11	87.77	100

KO DE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIS ASI 2019	REALISASI 2020		Tingk at Capai an RPJM D 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
				Target	Realisasi		
	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusif	%	79.42	85.5	80.14	93.73	85.5
	% PTK PAUD bersertifikasi	%	41	92.21	96.6	104.76	92.86
	% PTK SD bersertifikasi	%	42.1	95.71	90.51	94.57	97.57
	% PTK SMP bersertifikasi	%	36.4	92.85	90.32	97.28	95.01
2	BIDANG URUSAN KESEHATAN						
	Indeks Kepuasan layanan kesehatan dasar	Poin	76.8	68.21	77.8	114.06	70.71
	Angka morbiditas	%	3.15	14	4.75	33.93	12
	Indeks Kepuasan layanan kesehatan rujukan	Poin	86.62	66.68	74	110.98	68.02
3	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	70.62	77.64	67.55	87.00	79.11
	Cakupan Layanan jaringan Irigasi	Ha	49.517	49.517	49.517	100.00	49.517
	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	%	90.3	93.04	85.68	92.09	96
	Persentase jalan yang dibangun terhadap rencana induk pengembangan jalan	%	67.68	81.42	67.55	82.96	83
4	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	58.15	23.77	14.86	137.48	11.65
	Spot kawasan kumuh dan rawan bencana	Spot	#N/A	2	6	- 100.00	1
	Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Unit	1739	1000	705	70.50	5.986
	Persentase kawasan permukiman yang PSU permukimannya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, pju)	%	32.38	42.18	53.23	126.20	54.1
5	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	Indeks Toleransi	Poin	3.56	3.44	3.72	108.14	3.45
	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	0	0	0	#DIV/0!	0
	Angka kejadian konflik antar etnis	Kejadian	0	0	0	#DIV/0!	0
	Angka partisipasi pemilih pada pilpres, pileg dan pilkada	%	76.87	0	72.37	#DIV/0!	70
	Konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100	100	100.00	100
	Penyakit masyarakat	Kasus	30	36	10	172.22	36

KO DE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIS ASI 2019	REALISASI 2020		Tingk at Capai an RPJM D 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
				Target	Realisasi		
	Angka pelanggaran Perda dan Perkada	Kasus	208	270	41	184.81	270
	Desa tangguh bencana	Desa	20	19	23	121.05	23
	Persentase korban bencana yang tertangani	%	100	100	100	100.00	100
	Rata-rata Kecepatan dan ketepatan waktu penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	100.00	15
6	BIDANG URUSAN SOSIAL						
	Penanganan PMKS	%	40.37	38.91			42.56
	Lembaga sosial yang aktif	%	52.77	48.62			50.2
B	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA						
	Pencari kerja terdaftar yang terserap	%	95.24	95.17	86.45	90.84	95.31
	Sengketa ketenagakerjaan	Kasus	12	14	41	-92.86	14
2	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100.00	100
3	BIDANG URUSAN PANGAN						
	Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	76.92	81	79.63	98.31	81
	Konsumsi Energi	Kilokalori/kapita/hari	2565.36	2327.2	2588.63	111.23	2.3
4	BIDANG URUSAN PERTANAHAN						
	Cakupan fasilitasi pembuatan sertifikat tanah	%	#N/A	100	87.78	87.78	100
5	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	51.11	53	66.25	125.00	53.5
	Sumber mata air yang debit airnya terjaga	Titik	8	10	8	80.00	12
	Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani	M3/hari	24	20.51	25	78.11	20.82
6	BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	Tingkat kepemilikan KTP elektronik	%	91.15	91.93	96.85	105.35	96.93
	Tingkat kepemilikan akta kelahiran	%	83.7	88.41	87.07	98.48	93.41
	tingkat kepemilikan kartu keluarga	%	87.63	93.23	91.88	98.55	97.23
7	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN						

KO DE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIS ASI 2019	REALISASI 2020		Tingk at Capai an RPJM D 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
				Target	Realisasi		
	MASYARAKAT DAN DESA						
	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	27	29	33	113.79	35
	Rata-rata unit usaha BUMDes	Unit	1.26	2	2.5	125.00	2,30
	Jumlah desa wisata	Desa	22	4	39	975.00	21
	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa aktif	Lembaga	26	30	30	100.00	45
	Jumlah lembaga adat aktif	Lembaga	16	30	30	100.00	45
	Penetapan APBDes Tepat waktu	%	30	22.05	16.54	75.01	26.77
	Rata-rata Realisasi APBDes	%	95.02	96.68	92	95.16	97.9
8	BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	Rasio peserta KB dengan Pasangan Usia Subur	%	67.6	69.4	68.37	98.52	69.7
	Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif	%	48.2	62.5	65.31	104.50	68
9	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN						
	Angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	201	130	158	78.46	110
	Rasio kendaraan per jumlah penumpang	Ratio	0:36	1:40	1:40	100.00	1:40
10	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	%	90	36	100	277.78	36.36
11	BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
	Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	%	#N/A	0.33	2.36	715.15	0.33
	Koperasi berkualifikasi berkualitas dan sangat berkualitas	Buah	#N/A	160	133	83.13	171
12	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL						
	Nilai investasi PMA	US \$ 000	1545844	1354067	1617440	119.45	1395031
	Nilai investasi PMDN	Rp (juta)	1290940	1164044	1446171	124.24	1327046
13	BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	5	5	6	120.00	23
	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	9	5	11	220.00	5
14	BIDANG URUSAN STATISTIK						
	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	%	100	100	100	100.00	100

KO DE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIS ASI 2019	REALISASI 2020		Tingk at Capai an RPJM D 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
				Target	Realisasi		
15	BIDANG URUSAN PERSANDIAN						
	Persentase pengamanan informasi daerah	%	100	100	100	100.0 0	100
16	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN						
	Persentase situs budaya yang dilestarikan	%	16	10	16	160.0 0	10
17	BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN						
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Orang/Tahun	24706	28964	8083	27.91	29964
18	BIDANG URUSAN KEARSIPAN						
	Indeks Kecepatan layanan permintaan kebutuhan arsip	Poin	3	3	3	100.0 0	3
	Persentase dokumen arsip yang terselamatkan	%	100	100	100	100.0 0	100
II	URUSAN PILIHAN						
1	BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	Produksi Perikanan Budidaya – Ikan	ton/tahun	31334.62	35163	22646.35	64.40	35515
	Produksi Perikanan Budidaya - Rumput Laut	ton/tahun	43740.91	39652	39506.96	99.63	40.049
	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	2950.8	2477	2704.9	109.2 0	2482
	Produksi Olahan Hasil Perikanan	ton/tahun	4404.36	4420.68	3537.65	80.03	4509.09
	Produksi garam rakyat	ton/tahun	3708.98	3373	3372.84	100.0 0	3407
2	BIDANG URUSAN PARIWISATA						
	Angka kunjungan wisatawan asing	Orang/Tahun	74875	109006	17849	16.37	119907
	Angka kunjungan wisatawan domestik	Orang/tahun	61700	76165	26710	35.07	83782
	Rata-rata lama tinggal	hari	3	4	3	75.00	4.25
3	BIDANG URUSAN PERTANIAN						
	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan						
	- Padi	Ton/tahun	502639	504147	499071	98.99	511597
	- Jagung	Ton/tahun	70450	42562	63914	150.1 7	43396
	- Kedelai	Ton/tahun	16321	45879	2053	4.47	48337
	Produksi Hasil Perkebunan Unggulan						
	- Tembakau virginia	Ton/tahun	20798	19625	20224	103.0 5	20712
	- Tembakau rajangan	Kw/tahun	924.38	1050	707	67.33	1176
	- Melon	Kw/tahun	26374	12388	15320	123.6 7	12631
	- Kopi	Ton/tahun	539.97	394.9	476	120.5 4	408
	Populasi ternak sapi	Ekor	176992	170809	181143	106.0 5	172521

KO DE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIS ASI 2019	REALISASI 2020		Tingk at Capai an RPJM D 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
				Target	Realisasi		
4	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN						
	Nilai omset perdagangan/nilai transaksi	Rupiah	##### ###	1145022 2	1416815 6	123.7 4	116792 27
	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang menempati ruang sesuai peruntukannya	%	16.1	16.9	16.9	100.0 0	17.8
5	BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN						
	Nilai Produksi IKM	Rupiah	##### ###	5216549 1	5533298 0	106.0 7	547737 65
6	URUSAN TRANSMIGRASI						
	Jumlah keluarga transmigrasi yang difasilitasi	KK	284	234	234	100.0 0	39
III	URUSAN FUNGSI PENUNJANG						
1	PERENCANAAN						
	persentase kesesuaian program dan kegiatan RKPD dengan APBD	%	100	100	100	100.0 0	100
2	KEUANGAN						
	Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	2	2	2*	2	2,00
	Ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	Poin	4	4	4	100.0 0	4
	Indeks rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan	Poin	3	3	2	66.67	3
	Validitas data aset daerah	%	82.91	87.8	96	109.3 4	90
	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	9.65	9.32	9.64	103.4 3	9.35
	Target Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	##### ###	2.04496E +11	2.03927E +11	99.72	2.0934E +11
3	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	Persentase PNS yang kompeten	%	61.69	64	64	100.0 0	66
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	%	79.51	68.21	79.51	116.5 7	70.71
4	PENGAWASAN						
	Persentase tindaklanjut hasil temuan pengawasan	%	95.33	90	94	104.4 4	90
	Kapabilitas APIP	level	2	3	2*	#VAL UE!	3
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	Hasil penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan	%	100	100	100	100.0 0	100
6	PEMERINTAHAN UMUM						
	Nilai EKPPD	Poin	30,479	31488	3,0479**	#VAL UE!	31,545
	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	CC*	#VAL UE!	B
	Persentase rumah ibadah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	17	14	17	121.4 3	19

KO DE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIS ASI 2019	REALISASI 2020		Tingk at Capai an RPJM D 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
				Target	Realisasi		
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100.00	100
	Tercukupinya kebutuhan kedinasan KDH	%	100	100	100	100.00	100
	Perda yang ditetapkan	%	98.22	56	96.13	171.66	57
	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100.00	100
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
A	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH						
	Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp (ribu)/tahun	10196	10030	9952	99.22	10252
	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	107.13	105.48	109.22	103.55	105.69
	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	90.7	85.8	93.8	109.32	86
B	FOKUS FASILITAS WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR						
	Persentase jalan yang kondisinya baik (mantap)	%	67.68	74.32	65.03	87.50	75.79
	Pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR	%	25	29.17	55	188.55	33.33
	Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	%	77.28	80	80	100.00	82
C	FOKUS IKLIM INVESTASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA						
	Tingkat Kriminalitas	Kasus/100.000 penduduk	39.37	85.3	48.36	143.3	81.63
	Ketaatan terhadap RTRW	%	#N/A	84.36	81.4	96.49	86.71
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan	poin	75	79	77	97.47	80
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71.13	74.23	71.13*	#VAL UE!	74.65

Sumber : Evaluasi RPJMD, 2020

1.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

1.6.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1.6.1.1 Urusan Pendidikan

Masih rendahnya pendidikan di Lombok Tengah ditandai dengan capaian rata-rata lama sekolah yang hanya sebatas tamat SD (6,28 tahun). Jika dibandingkan dengan capaian provinsi 7,31 tahun, hal ini menunjukkan capaian Lombok Tengah ini masih rendah. Berikut ini permasalahan yang dihadapi terkait dengan rata-rata lama sekolah :

1. APM SMP/MTs di Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 77,42. Jika dibandingkan dengan APM SMP/MTs Provinsi NTB di tahun 2019 sebesar 83,92, APM SMP/MTs Lombok Tengah berada 6,5 poin lebih rendah di bawah Provinsi NTB.
2. Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan masih rendah dibandingkan laki-laki ditandai dengan angka melek huruf perempuan sebesar 78,36 persen dibandingkan laki-laki sebesar 89,53 persen di tahun 2019.
3. Dari aspek tenaga pendidik, kualitas tenaga pendidik masih relatif rendah. Hal ini ditandai dengan persentase guru yang tersertifikasi di pendidikan dasar masih di bawah 50 persen.

1.6.1.2 Urusan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat secara umum dapat dilihat dari angka morbiditas. Tahun 2019 angka morbiditas 31,67 persen sementara provinsi NTB 22,69 persen. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat masih rendah dengan tingginya angka keluhan terkena penyakit tertentu.

Beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor kesehatan antara lain :

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak masih belum optimal yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan anak. Angka kematian ibu pada tahun 2019 sebesar 153,2 kasus dari 100.000 kelahiran hidup jika dibandingkan provinsi 93,92 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi sebesar 10,5 per 1.000 kelahiran hidup jika dibandingkan provinsi 7,91 per 1.000 kelahiran hidup.
2. Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2019 belum bisa terbebas dari gizi buruk. Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2019 mencapai 31 kasus.
3. Walaupun terjadi penurunan angka stunting dari tahun 2018 sebesar 31,05 persen menjadi 27,79 persen di tahun 2020, stunting masih merupakan masalah yang harus diperhatikan.
4. Prevalensi penyakit menular menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. HIV/AIDS dari tahun 2017 sebesar 21,81 persen meningkat menjadi 26,8 persen di tahun 2019, TB dari 0,26 di tahun 2017 meningkat menjadi 1,17 di tahun 2019. Pandemi COVID yang terjadi juga berdampak kepada menurunnya derajat kesehatan masyarakat.
5. Prevalensi penyakit tidak menular masih didominasi hipertensi dan diabetes masing-masing 10,79 persen dan 4,17 persen di tahun 2019. Sedangkan penyakit tidak menular lainnya rata-rata kurang dari 2,5 persen.
6. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan masih dibawah SPM antara lain rasio puskesmas dengan jumlah penduduk baru mencapai 1:33.000 dan jumlah puskesmas PONEB baru mencapai 39 persen.

1.6.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi Tantangan bidang kebinamargaan adalah mempertahankan umur teknis jalan agar tetap dalam kondisi mantap dan memenuhi target kondisi mantap 100 persen untuk lima tahun kedepan.

1. Masih adanya ruas jalan kabupaten dengan kondisi tidak mantap sebesar 32,32 persen;
2. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan masih perlu ditingkatkan agar umur jalan sesuai dengan umur teknis
3. Cakupan layanan air minum masih 77,28 persen di tahun 2020
4. Total kebutuhan air (DA) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 1.491.455.968 m³/tahun dengan potensi Sumber Daya Air (SA) sebesar 133.887.613 m³/tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah mengalami defisit terhadap daya dukung air.
5. Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar 56,1 masih di bawah standar sebesar 60.
6. Masih terdapat 18,4 persen rumah tangga yang tidak menggunakan/tidak punya fasilitas BAB.
7. Belum semua kawasan strategis kabupaten memiliki Perda Rencana Detil Tata Ruang.

1.6.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Masih terdapat 28.967 unit rumah tidak layak huni yang belum tertangani
2. Terdapat kawasan kumuh seluas 815,37 ha di tahun 2020
3. Persentase sampah yang tertangani baru 25%
4. Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau.

1.6.1.5 Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Angka kriminalitas yang dilaporkan mengalami penurunan dari 987 kasus di tahun 2017 menjadi 439 kasus di tahun 2019, namun masih perlu ditekan untuk mendukung stabilitas pembangunan terutama di kawasan-kawasan strategis;
2. Pelanggaran Peraturan Daerah relatif masih tinggi

b .Bencana

1. Kualitas mitigasi dan penanganan kebencanaan belum optimal;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan kebencanaan terbatas;
3. Kuantitas dan kualitas tenaga kebencanaan perlu ditingkatkan;
4. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum optimal ;

1.6.1.6 Sosial

1. Cakupan layanan PMKS baru mencapai 40,37%;
2. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pencegahan dan penanganan PMKS belum optimal;
3. Pembinaan dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial (SKS) dalam pencegahan dan penanganan PMKS belum optimal;
4. Penanganan pasca bencana alam dan sosial belum optimal

1.6.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1.6.2.1 Tenaga Kerja

1. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja sektor formal baru 19,17 persen
2. Kompetensi angkatan kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja;
3. Kesempatan/pekerjaan terbatas;
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dan pekerja migran;
5. Pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan BLK masih belum optimal;
6. Database ketenagakerjaan belum tersedia.

1.6.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Rata-rata usia kawin pertama perempuan mengalami penurunan dari 19,57 tahun menjadi 19,18 tahun dan masih lebih rendah dari provinsi sebesar 20,27 tahun.
2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 43 kasus di tahun 2020 dan kekerasan terhadap anak sebesar 44 kasus.
3. Pembinaan dan peran lembaga formal dan informal dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak perlu diingkatkan
4. Implementasi regulasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak belum optimal;
5. Belum optimalnya upaya pengarusutamaan gender (PUG) dilihat dari persentase keterwakilan perempuan dalam penentuan jabatan eselon baru sebesar 22,42 %

1.6.2.3 Pangan

1. Masih terdapat 24% desa yang tergolong rawan pangan dengan kategori rentan tinggi (4%), rentan sedang (8%) dan rentan rendah (12%)

1.6.2.4 Lingkungan Hidup

1. Kualitas Daya Dukung Lingkungan masih perlu ditingkatkan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Tahun 2019 sebesar 59,52 sedangkan Nasional sebesar 66,55.

1.6.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Belum semua wajib KTP yang memiliki KTP yaitu dari 747.929 orang wajib KTP di tahun 2019 baru 681.774 orang (91,5%) yang sudah memiliki KTP
2. Persentase penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran sebesar 16,3 %
3. Belum semua data kependudukan belum bisa di akses secara luas oleh masyarakat.

1.6.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu baru mencapai 30%
2. Kapasitas aparatur (Sumber Daya Manusia) penyelenggara pemerintahan desa perlu ditingkatkan;
3. Pengelolaan keuangan dan penataan aset desa belum optimal;
4. Penguatan lembaga kemasyarakatan desa belum optimal. Jumlah BUMDes sebanyak 127 lembaga yang aktif sebanyak 114 lembaga (89,76%)
5. Kuantitas dan kualitas infrastruktur desa perlu ditingkatkan.

1.6.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,80% jika dibandingkan laju pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 1,03%.
2. Cakupan layanan Keluarga Berencana belum optimal. Dari 161.073 pasangan usia subur baru 86,7 % yang menjadi akseptor KB aktif. Angka dropout KB juga masih tinggi yaitu sebanyak 24.976 PUS. Jumlah pasangan usia subur unmeet need masih tinggi yaitu 36.333 PUS.

1.6.2.8 Perhubungan

1. Persentase jalan kabupaten yang memiliki fasilitas keselamatan jalan masih 65%

1.6.2.9 Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik. Hingga saat ini jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (sesuai PM Kominfo No. 5/2015) baru mencapai 6 layanan.

1.6.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Masih lambannya perkembangan UMKM Skala Kecil dan Menengah. Pada tahun 2017 jumlah UMKM Skala Kecil adalah 394 unit dan bertambah menjadi 400 unit di tahun 2019;
2. Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan dari 239 unit di tahun 2018 menjadi 219 unit di tahun 2019.
3. Persentase koperasi sehat tahun 2020 2 koperasi dari 635

1.6.2.11 Penanaman Modal

1. Realisasi investasi PMA cenderung mengalami penurunan. Di tahun 2016 realisasi PMA sebesar US\$ 135.350,68 Ribu menjadi US\$ 69.927,34 Ribu di tahun 2019;
2. Rata-rata pertumbuhan investasi di Lombok Tengah terhadap pertumbuhan realisasi investasi Provinsi NTB 2016-2020

1.6.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina masih terbatas. Dari 93 lembaga organisasi kepemudaan yang di di Lombok Tengah tahun 2020, yang dibina baru sebanyak 11 lembaga (11,83%).
2. Jumlah atlet berprestasi sampai dengan tahun 2019 masih terbatas yaitu 29 orang.

1.6.2.13 Statistik

Belum optimal penyediaan data sektoral yang valid dan berkualitas

1.6.2.14 Persandian

Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.

1.6.2.15 Kebudayaan

1. Jumlah tradisi dan situs yang lestari masih terbatas
2. Jumlah/frekwensi event budaya perlu ditingkatkan
3. Kurangnya implementasi UU Nomor 5 Tahun 2017

1.6.2.16 Perpustakaan

1. Minat baca masyarakat masih rendah

1.6.2.17 Kearsipan

1. Pengelolaan arsip belum optimal.

1.6.3 Urusan Pemerintah Pilihan

1.6.3.1 Kelautan dan Perikanan

1. Peningkatan produksi perikanan cenderung stagnan.

1.6.3.2 Pariwisata

1. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan berjumlah 200.483 orang, turun menjadi 44.559 orang pada tahun 2020.
2. Rata-rata lama tinggal wisatawan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Rata-rata lama tinggal sebesar 3,5 hari, turun menjadi 3,00 hari pada tahun 2020.

1.6.3.3 Pertanian

1. Rata-rata produktivitas padi masih 71,4% dari potensi varietas benih
2. Skala usaha peternakan ternak besar mayoritas berskala kecil.

1.6.3.4 Perdagangan

1. Persentase pasar baik masih rendah dibandingkan jumlah pasar
2. Penataan pedagang kaki lima belum optimal.

1.6.3.5 Perindustrian

Perkembangan unit usaha IKM tumbuh lambat dari 35.356 unit di tahun 2017 menjadi 35.942 unit di tahun 2019 atau tumbuh 1,7%.

1.6.3.6 Transmigrasi

-

1.6.4 Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan

1.6.4.1 Sekretariat Daerah

Permasalahan pada urusan ini adalah penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) masih perlu ditingkatkan. Nilai SAKIP masih CC.

1.6.4.2 Sekretariat DPRD

-

1.6.4.3 Perencanaan

Permasalahan pada urusan ini adalah kualitas perencanaan dan sinergitas antar dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan.

1.6.4.4 Keuangan

1. Tingkat kemandirian fiskal masih rendah tahun 2019 baru mencapai 9,3 persen
2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah. Validasi aset belum mencapai 100%.

1.6.4.5 Kepegawaian

1. Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian;

1.6.4.6 Pendidikan dan Pelatihan

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

1.6.4.7 Penelitian dan Pengembangan

1. Belum optimalnya pengelolaan kelitbangan sebagai salah satu rujukan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah.

1.6.5 Unsur Pengawas

1.6.5.1 Inspektorat Daerah

1. Tindak lanjut pemeriksaan masih perlu ditingkatkan.

1.6.6 Unsur Kewilayahan

1.6.6.1 Kecamatan

-

1.6.7 Unsur Pemerintahan Umum

1.6.7.1 Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

1. Kurangnya pemahaman dan penyelenggaraan serta pembinaan organisasi kemasyarakatan tentang wawasan kebangsaan.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH



3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian Tahun 2022. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Lombok Tengah serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 disusun secara teknokratis dengan pendekatan kajian internal dan eksternal daerah. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah disusun dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2020 dan pencapaian kinerja perekonomian daerah tahun 2020. Untuk menjamin keserasian perencanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah, arah kebijakan ekonomi harus mengacu dan sejalan dengan RKP dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Tujuan dari internalitas dan eksternalitas ini adalah agar terjalin sinergitas antar dokumen perencanaan, serta menjaga kesinambungan perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2022

a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020

Beberapa hal yang terkait dengan kondisi ekonomi tahun 2020 adalah pengembangan kondisi perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya maupun variabel yang melingkupinya yang diuraikan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto

Nilai PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 16,67 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 1,18 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 17,85 triliun rupiah. Menurunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha sebagai akibat dari terjadinya pandemi covid-19 dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 12,4 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 11,57 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2020 mengalami kontraksi sekitar 6,68 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010
Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

Tahun (1)	Berlaku (2)	Konstan 2010 (3)
2016	14.423.751,17	10.854.980,04
2017	15.779.240,00	11.551.693,67
2018	16.702.140,00	11.916.530,00
2019*	17.853.810,00	12.400.270.,00
2020**	16.670.400,00	11.571.990,00

* angka sementara

** angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah mengalami kontraksi sebesar 6,68 persen.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2016-2020 (persen)

Kategori (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019* (5)	2020**
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,86	6,37	2,24	1,55	-0,42
B Pertambangan dan Penggalan	9,36	7,12	6,53	9,36	1,08
C Industri Pengolahan	3,19	4,69	1,55	3,6	-3,05
D Pengadaan Listrik dan Gas	9,85	5,39	1,14	9,59	9,72
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,72	3,95	0,32	-0,43	-1,78
F Konstruksi	8,68	7,03	5,49	3,04	8,68
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,12	7,93	5,73	6,33	-5,57
H Transportasi dan Pergudangan	5,74	6,23	-1	-5,6	-45,02
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,54	7,01	1,86	1,78	-20,43
J Informasi dan Komunikasi	8,62	8,02	5,34	4,24	12,92
K Jasa Keuangan dan Asuransi	11,11	10,48	6,87	1,49	14,2
L Real Estat	6,54	6,81	4,94	4,98	1,42
M,N Jasa Perusahaan	6,72	5,34	5,08	5,16	-2,87
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	2,56	0,76	3,43	2,96
P Jasa Pendidikan	6,01	5,62	5,53	6,96	1,6
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,78	6,02	7,54	6,18	0,72
R,S,T,U Jasa lainnya	6,25	6,81	5,06	5,36	-5,41
PDRB	5,65	6,42	3,17	4,07	-6,68

* angka sementara

** angka sangat sementara

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu kategori terhadap total perekonomian Kabupaten Lombok Tengah adalah sumber pertumbuhan (source of growth). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.3
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016-2019 (persen)

Kategori		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,76	1,66	0,58	0,43	(0,001)
B	Pertambangan dan Penggalan	0,39	0,31	0,21	0,57	0,001
C	Industri Pengolahan	0,19	0,26	0,08	0,20	(0,002)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,000
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,00	0,00	(0,000)
F	Konstruksi	1,07	0,90	0,62	1,95	0,004
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,87	0,87	0,62	0,72	(0,006)
H	Transportasi dan Pergudangan	0,99	1,06	(0,02)	(0,92)	(0,067)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	0,08	0,02	0,03	(0,002)
J	Informasi dan Komunikasi	0,15	0,14	0,09	0,08	0,002
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,21	0,21	0,14	0,03	0,003
L	Real Estat	0,22	0,23	0,17	0,17	0,001
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	(0,000)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,12	0,13	0,09	0,17	0,001
P	Jasa Pendidikan	0,26	0,25	0,23	0,32	0,001
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,15	0,20	0,17	0,000
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,14	0,16	0,12	0,13	(0,001)
PDRB		5,65	6,42	3,17	4,01	(6,68)

* angka sementara

** angka sangat sementara

Pada tabel 3.3 di atas dapat dilihat sumber pertumbuhan terbesar ekonomi Lombok Tengah yang tidak mengalami kontraksi yaitu kategori konstruksi sebesar 0,004 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,003 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 0,002.

2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan positif pada kurun waktu 2016-2019 dari Rp. 11.772.000 pada tahun 2016 menjadi Rp 13.087.000 pada tahun 2019. Namun di tahun 2020, Pendapatan per kapita mengalami penurunan menjadi Rp. 12.112.000. Adapun perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010
2016	15.642.000	11.772.000
2017	16.952.000	12.412.000
2018	17.779.000	12.685.000
2019*	18.843.000	13.087.000
2020**	17.448.000	12.112.000

Keterangan: *)Data Sementara, **) Data Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021

3. Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan pada kurun waktu 2016-2020 baik secara absolut maupun relatif. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2011-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2016	145.370	15,80
2017	142.142	15,31
2018	130.002	13,87
2019	128.822	13,63
2020	128.100	13,44

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021

B. Perkiraan Ekonomi Daerah Tahun 2022

Berdasarkan kondisi perekonomian domestik dan regional dan kondisi wabah covid-19 di tahun 2020 dan diperkirakan akan ada pemulihan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah diharapkan akan membaik di tahun 2022. Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 2,6 – 3,10%
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran, 13,20 – 13,03%
3. Gini ratio pada kisaran 0,328 – 0,329
4. Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 3,26 – 3,04%
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 66,67 – 66,88

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi regional daerah yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai peluang yang harus diraih dengan aksi nyata. Beberapa peluang tersebut antara lain:

- a) Sektor-sektor yang mampu memberikan sumber pertumbuhan positif terhadap perekonomian Lombok Tengah seperti konstruksi, dan komunikasi dan telekomunikasi yang mampu bertahan dalam masa pandemi Covid-19 di tahun 2021, perlu terus didorong untuk tumbuh di tahun 2022 sebagai upaya menjaga pertumbuhan stabilitas struktur perekonomian daerah.
- b) Diperkirakan pembatasan sosial telah dibuka dan dikurangi di tahun 2022 sehingga konsumsi dan investasi akan meningkat seiring ketersediaan vaksin yang efektif dan aman bagi sebagian besar penduduk.

Disamping peluang-peluang tersebut, di tahun 2022 Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain sebagai berikut:

- a) Vaksinasi covid-19 harus dilakukan secara menyeluruh menuju pemulihan yang aman dan cepat agar aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan normal.
- b) Kecepatan pemulihan ekonomi tidak merata di semua sektor. Sektor-sektor yang terdampak covid-19 membutuhkan inovasi baru dalam rangka meningkatkan kinerja sektoral sebagai bentuk adaptasi terhadap dampak pandemi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah pada umumnya menjadi arah utama Kebijakan pengembangan keuangan daerah yang dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Namun demikian, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah sepenuhnya masih bergantung dana transfer dari pusat meskipun pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : (a) Kebijakan pemerintah, (b) Pendapatan masyarakat, (c) Fluktuasi harga komoditas andalan, dan (d) Kondisi daerah yang cukup aman.

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi pendapatan terhadap kebutuhan belanja daerah masih tertata dengan baik dan untuk tahun-tahun ke depan diupayakan akan semakin baik.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan mengenai pendapatan daerah diharapkan dapat mendukung pembiayaan belanja daerah.

- Pendapatan Asli Daerah.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai berikut :
 - (1) Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi.
 - (2) Ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi khususnya perkembangan hotel baru baik yang dibangun di dalam KEK maupun di luar kawasan sekitar KEK.
- Pendapatan Transfer.
Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan bagi hasil pendapatan (revenue sharing policy). Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Strategi, arah dan kebijakan terhadap Dana Perimbangan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mengoptimalkan target dan capaian realisasinya yaitu melakukan upaya peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga perolehan pendapatan yang diterima dapat

memenuhi kebutuhan berdasarkan alokasi yang direncanakan. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan transfer pemerintah pusat khususnya yang bersumber dari Dana Insentif Daerah adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta upaya melakukan perbaikan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan yang meliputi peningkatan Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas Pelayanan dasar publik bidang Pendidikan, peningkatan pelayanan dasar publik bidang kesehatan, peningkatan pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, penurunan kemiskinan dan perbaikan indeks pembangunan manusia, perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perbaikan kualitas perencanaan daerah, inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan meningkatkan kemudahan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
 - (1) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi guna meningkatkan penerimaan sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Tabel 3.6
Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2022

Kode	Uraian	APBD 2021	PROYEKSI RKPD 2022
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	232.385.801.437	251.806.714.622
4.1.01	Pajak Daerah	76.630.219.700	91.630.219.700
4.1.02	Retribusi Daerah	29.180.781.800	33.601.694.985
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.507.005.000	11.507.005.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.067.794.937	115.067.794.937
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.855.601.719.525	1.853.178.483.525
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.764.348.082.000	1.761.924.846.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.253.637.525	91.253.637.525
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109.471.988.000	101.025.800.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	18.923.188.000	10.477.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	90.548.800.000	90.548.800.000
	Jumlah Pendapatan	2.197.459.508.962	2.206.010.998.147

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2021

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJPD periode ketiga pada tahun 2022 dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada periode-periode sebelumnya.

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Strategi, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2022 adalah :

- 1) Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja gaji/tunjangan dan belanja pembayaran pokok utang pinjaman
- 2) Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB dalam kerangka otonomi daerah Negara kesatuan Republik Indonesia
- 3) Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah
- 4) Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 3.7
Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2022

Kode	Uraian	APBD 2021	PROYEKSI RKPD 2022
5	BELANJA		
5,1	BELANJA OPERASI	1.591.668.309.325	1.594.524.854.836
5,2	BELANJA MODAL	248.192.156.087	227.449.714.092
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.648.691.000	4.000.000.000
5,4	BELANJA TRANSFER	338.485.202.100	360.036.429.219
	Jumlah Belanja	2.199.994.358.512	2.186.010.998.147
	Total Surplus/(Defisit)	(2.534.849.550)	20.000.000.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2021

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2022 adalah Alokasi pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang.

Adapun Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 -2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
 Anggaran dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
 Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2022

Kode	Uraian	APBD 2021	PROYEKSI RKPD 2022
6	PEMBIAYAAN		
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.534.849.550	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.534.849.550	0
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	22.534.849.550	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	22.534.849.550	-
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	20.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000	20.000.000.000
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	20.000.000.000	20.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	20.000.000.000
	Pembiayaan Netto	2.534.849.550	(20.000.000.000)

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2021

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2022



4.1 Tema Pembangunan Daerah

Tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2022 dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2022 mengacu dan memperhatikan Konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tema pembangunan dalam RKPD tahun 2022 adalah: **“Pemulihan Ekonomi Daerah Didukung SDM Berkualitas dan Unggul serta Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan”** pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar” yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan
- 2) Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul
- 3) Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja
- 4) Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 5) Pengembangan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan
- 6) Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat

Penetapan tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD 2022 adalah sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun Kabupaten. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2022.

4.2 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 merupakan tahun transisi sehubungan dengan belum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan visi dan misi calon kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Oleh karena itu, sesuai ketentuan yang berlaku, maka RKPD tahun 2022 mengacu pada sasaran pokok dan arahan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Lombok Tengah. RKPD tahun 2022 merupakan pelaksanaan Tahun Ketiga RPJPD, dengan Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2016 – 2021 yaitu : **“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, DAN MAJU BERDAYA SAING”**.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna :

1. RELIGIUS adalah gambaran umum situasi dan kondisi kehidupan spiritual warga masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang mampu menghayati dan mengamalkan

nilai-nilai serta ketaatan menjalankan ajaran agama yang dianut dan diyakini dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga bangsa dan warga masyarakat. Sikap menghayati dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama ini tercermin dari sikap dan tingkah laku yang sesuai ajaran agama, yaitu saling menghormati diantara sesama pemeluk agama, antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain serta antara pemeluk agama dengan pemerintah. Sikap religius juga diungkapkan sebagai perwujudan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa kepada pemerintah dan warga masyarakat Lombok Tengah.

2. SEJAHTERA adalah tujuan yang ingin dicapai oleh segenap komponen masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, hal ini sejalan dengan cita – cita dan tujuan terbentuknya Negara Republik Indonesia sebagai mana termaktub dalam Mukadimah Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social. Sejahtera disini berarti terpenuhinya kebutuhan lahir maupun bathin sehingga memungkinkan pemerintah dan masyarakat Lombok Tengah untuk dapat berpartisipasi dalam mewujudkan cita – cita bangsa.
3. MAJU BERDAYA SAING adalah suatu situasi dan kondisi dimana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Lombok Tengah yang mampu mensejajarkan diri dengan warga masyarakat di daerah lainnya dan memiliki keunggulan daya saing. Hal ini ditandai dengan tercapainya indikator-indikator pembangunan daerah yang tinggi di Kabupaten Lombok Tengah, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas SDM yang meningkat, dan terbinaanya potensi dan faktor-faktor keunggulan daerah. Makna maju berdaya saing juga berarti bahwa pada masa mendatang kehidupan pemerintah dan warga masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah benar – benar menjadi pemerintah dan warga yang mandiri, yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam naungan dan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai pengejawantahan dari pernyataan visi Kabupaten Lombok Tengah tersebut di atas, maka di rumuskan misi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, agar rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan tujuan pembangunan dapat terwujud. Untuk itu misi Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Religius, Menjunjung Tinggi Hukum dan Berbudaya Luhur

Yaitu masyarakat Lombok Tengah yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta ajaran agama yang dianutnya, menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta nilai-nilai budaya yang merupakan warisan luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Sejahtera

Yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara material dan spiritual, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lapangan kerja yang mantap dan terkendali serta kebutuhan hidup lainnya.

3. Mewujudkan Pembangunan Yang Merata, Seimbang dan berkelanjutan

Yaitu pembangunan yang dilakukan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh

lapisan masyarakat dan antar wilayah. Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan hendaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekarang saja tetapi juga harus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan juga dimaksudkan agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk kelestarian lingkungan dan resiko kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

4. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah

Yaitu melalui pertumbuhan ekonomi dan penguatan struktur perekonomian daerah berbasis agrobisnis dan pengembangan pariwisata, mengedepankan pembangunan SDM yang berkualitas berbasis penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan sarana prasarana yang terpadu, dan terwujudnya pemerintahan yang menerapkan prinsip "good governance", serta penguatan partisipasi masyarakat, pengembangan kerja sama antar skala wilayah, swasta dan masyarakat.

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi sampai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tahun ketiga (2021-2025) RPJPD Kabupaten Lombok Tengah dijabarkan kedalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Penjabaran Misi dalam RPJPD Kab. Lombok Tengah 2011-2031

VISI: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, DAN MAJU BERDAYA SAING"		
MISI	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Religius, Menjunjung Tinggi Hukum dan Berbudaya Luhur	Terwujudnya kerukunan umat beragama	Peningkatan kesadaran, pemahaman, pendalaman dan pengamalan nilai – nilai serta ajaran agama
		Penguatan kapasitas lembaga keagamaan, lembaga adat dan kemasyarakatan
	Terwujudnya kondisi kamtibmas yang kondusif	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
		Penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Sejahtera	Terwujudnya SDM yang berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya.
		Penurunan angka pengangguran, penyediaan dan peningkatan jumlah serta jenis lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
		Penataan kelembagaan ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya peningkatan jaringan kerja dan perangkat hukum bagi perlindungan dan keselamatan serta kesehatan kerja.
Mewujudkan Pembangunan Yang Merata, Seimbang dan Berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan Daerah yang berkelanjutan berbasis Sumberdaya Lokal dan berwawasan lingkungan	Pelaksanaan pembangunan yang merata antar wilayah pembangunan
		Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.

VISI: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, DAN MAJU BERDAYA SAING"		
MISI	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		Peningkatan pemeliharaan seluruh sumber daya alam secara berkelanjutan
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kelestarian alam dan lingkungannya.
Mewujudkan Peningkatan Perkonomian dan Daya Saing Daerah	Terwujudnya penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian daerah.
		Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna
		Peningkatan fasilitasi sistem produksi, distribusi dan pemasaran
		Peningkatan kemitraan ekonomi antar wilayah
		Peningkatan peran serta kaum perempuan dalam pembangunan daerah.
	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Yg Baik	Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan publik.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam rangka mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional maka strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;
- b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (d) kontribusi PDB industri pengolahan, (e) nilai devisa pariwisata, (f) kontribusi PDB pariwisata, (g) penyediaan lapangan kerja, (h) pertumbuhan investasi, (i) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (j) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (k) rasio perpajakan terhadap PDB.

2. Prioritas Nasional 2

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

3. Prioritas Nasional 3

Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam

- program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;
- c. Terpenuhi layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) prevalensi stunting, (b) insiden tuberculosis, (c) angka kematian ibu, (d) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (e) persentase merokok usia 10-18 tahun, (f) meningkatkan nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (g) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, serta (h) harapan lama sekolah;
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 - e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
 - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.
4. Prioritas Nasional 4
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;
 - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
 - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
 - d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks kerukunan Umat Beragama;
 - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) media usia kawin pertama perempuan;
 - f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.
5. Prioritas Nasional 5
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif persen), (c) luas daerah irigasi premium yang di modernisasi (kumulatif persen), dan (d) mendorong penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010);
 - b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop);
 - c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);

- d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi dan (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita);
 - e. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).
6. Prioritas Nasional 6
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
 - c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK dan (b) peningkatan porsi bauran energi baru terbarukan dalam energi nasional.
7. Prioritas Nasional 7
- Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, dengan sasaran:
- a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
 - b. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
 - c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
 - d. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola dengan mendorong persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota);
 - e. Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

4.3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2022

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 merupakan perencanaan tahun keempat penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada pematangan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pembangunan dan pemulihan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta reformasi struktural sosial dan ekonomi yang mencakup antisipasi dan penanganan pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 yaitu :

1. Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, mendukung PN 6 dengan program unggulan adalah Desa Tangguh Bencana (DESTANA).

2. Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, mendukung PN 2 dan PN 5 dengan program unggulan adalah Air Bersih/Air Minum untuk Semua.
3. Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik, mendukung PN 7 dengan program unggulan adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Meningkatkan kualitas kesehatan, mendukung PN 3 dengan program unggulan adalah Revitalisasi Posyandu.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung PN 3 dengan program unggulan adalah PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)
6. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan, mendukung PN 6 dengan program unggulan adalah Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah.
7. Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi, mendukung PN 1 dengan unggulan antara lain: Pertanian Lestari/Modern/Integrated Farming System; BUMDES Maju/Maha Desa; Melawan Kemiskinan dari Desa/Penganggulangan Kemiskinan.
8. Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19, mendukung PN 1 dengan program prioritas unggulan adalah Penataan 99 Desa Wisata.
9. Industrialisasi produk unggulan, mendukung PN 1 dengan program unggulan antara lain: Industri Peralatan dan Permesinan, Industri Sepeda dan Motor Listrik; Industri Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Industri Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHK dan HHBK); Industri Peternakan/Pakan Ternak; Industri Perikanan Terintegrasi; dan UMKM/IKM Bersaing.
10. Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, mendukung PN 4 dengan program unggulan adalah Desa Bersinar.

Tabel 4. 2 Target Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2022

Indikator	Target Nasional	Target Nasional untuk NTB	Target Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 6,0	4,5 – 5,34	3,5 - 4,5
Inflasi (%)	-	-	3,0 - 4,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 – 6,2	3,04 - 3,77	3,19
Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	13,16	12,77
Rasio Gini (Indeks)	0,376 – 0,378	-	0,329
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44 – 73,48	-	69,39

Sumber : Rancangan RKP 2022 dan RPJMD Prov. NTB 2019-2023

Upaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Perumusan program prioritas tahun 2022 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna memastikan perubahan pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2022 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Untuk selanjutnya keselarasan tema, prioritas nasional dan daerah dijabarkan sebagaimana tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 3 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2022

Tema Nasional	Tema Provinsi
"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"	"Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul"
Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Provinsi
PN 1	PD 7
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir agribisnis dalam mendukung investasi
	PD 7
	Optimalisasi pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19
	PD 8
	Industrialisasi produk unggulan daerah
PN 2	PD 2
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
PN 3	PD 3
Meningkatkan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pendidikan
	PD 4
	Meningkatkan kualitas kesehatan
PN 4	PD 3
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan
PN 5	PD 2
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6	PD 1
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
	PD 6
	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan
PN 7	PD 9
Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik
	PD 10
	Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

4.3.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB, sasaran pokok dan arahan pembangunan tahun ketiga RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. prioritas pembangunan tahun 2022 adalah:

Tabel 4.4.
Penjabaran Prioritas Daerah dalam Sasaran Pokok
RPJPD Kab. Lombok Tengah 2011-2031

PRIORITAS	SASARAN POKOK		
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET
Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan	Terwujudnya kerukunan umat beragama	Konflik SARA	Nol
Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan	Terwujudnya kondisi kamtibmas yang kondusif	Angka kriminalitas tertangani	100%
Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul	Terwujudnya SDM yang berkualitas	Status IPM	Menengah Atas (80)
Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja	Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan	90%
Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Terwujudnya pembangunan Daerah yang berkelanjutan berbasis Sumberdaya Lokal dan berwawasan lingkungan	Nilai PDRB ADHK	Rp. 8,6 Triliun
		Status Lingkungan Hidup	Baik
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	Terwujudnya penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah	Persentase laju pertumbuhan ekonomi daerah	9%
		Gender Development Index	Medium (75)
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Yg Baik	Hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah	Baik

Prioritas pembangunan daerah yaitu tema/agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJPD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah yang berisi program atau gabungan program prioritas.

4.4 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Berikut disajikan arah kebijakan pada tujuh prioritas pembangunan tahun 2022:

Tabel 4.5.
Penjabaran Prioritas Daerah dalam Arah Kebijakan Pembangunan
RPJPD Kab. Lombok Tengah 2011-2031

VISI: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, DAN MAJU BERDAYA SAING"		
PRIORITAS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan	Terwujudnya kerukunan umat beragama	Peningkatan kesadaran, pemahaman, pendalaman dan pengamalan nilai – nilai serta ajaran agama
		Penguatan kapasitas lembaga keagamaan, lembaga adat dan kemasyarakatan
Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan	Terwujudnya kondisi kamtibmas yang kondusif	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
		Penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul	Terwujudnya SDM yang berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja	Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya.
		Penurunan angka pengangguran, penyediaan dan peningkatan jumlah serta jenis lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
		Penataan kelembagaan ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya peningkatan jaringan kerja dan perangkat hukum bagi perlindungan dan keselamatan serta kesehatan kerja.
Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Terwujudnya pembangunan Daerah yang berkelanjutan berbasis Sumberdaya Lokal dan berwawasan lingkungan	Pelaksanaan pembangunan yang merata antar wilayah pembangunan
		Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.
		Peningkatan pemeliharaan seluruh sumber daya alam secara berkelanjutan
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kelestarian alam dan lingkungannya.

VISI: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, DAN MAJU BERDAYA SAING"		
PRIORITAS	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	Terwujudnya penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian daerah.
		Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna
		Peningkatan fasilitasi sistem produksi, distribusi dan pemasaran
		Peningkatan kemitraan ekonomi antar wilayah
		Peningkatan peran serta kaum perempuan dalam pembangunan daerah.
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Yg Baik	Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung prioritas nasional dan provinsi guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi. Berikut disajikan keselarasan tema, prioritas nasional dan daerah dijabarkan sebagaimana tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.6 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN), Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2022

Tema Nasional	Tema Provinsi	Tema Daerah
"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"	"Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul"	"Pemulihan Ekonomi Daerah Didukung SDM Berkualitas dan Unggul serta Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan"
Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah (PD)
PN 1	PD 7	PD 5
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir agribisnis dalam mendukung investasi	Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan
	PD 7	
	Optimalisasi pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19	
	PD 8	
	Industrialisasi produk unggulan daerah	

Tema Nasional	Tema Provinsi	Tema Daerah
PN 2	PD 2	PD 4
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
		PD 3
		Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja
PN 3	PD 3	PD 2
Meningkatkan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul
	PD 4	
	Meningkatkan kualitas kesehatan	
PN 4	PD 3	PD 2
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul
PN 5	PD 2	PD 4
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6	PD 1	PD 4
Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
	PD 6	
	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	
PN 7	PD 9	PD 1
Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan
	PD 10	PD 6
	Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat

4.4 Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19

kinerja pembangunan ekonomi di Lombok Tengah di berbagai sektor sebagai akibat dari terjadinya Pandemi COVID-19. Penurunan kinerja diberbagai sektor tersebut mulai nampak di tahun 2020. Namun demikian, beberapa sektor seperti konstruksi, informasi

dan komunikasi serta jasa keuangan dan asuransi mampu bertahan dan tumbuh pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah terus digalakan oleh Pemerintah melalui beragam program pemulihan ekonomi dan terus menggalakkan penerapan protokol kesehatan dalam berbagai bidang usaha, terutama pada sektor-sektor yang mengharuskan tatap muka atau kontak langsung serta dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat dalam rangka mencegah meluasnya pandemi.

Pemulihan kesehatan dengan mewujudkan herd immunity diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan perekonomian Lombok Tengah baik dari sisi investasi maupun konsumsi. Disamping itu, Perlindungan Sosial dan stimulus bagi masyarakat terdampak Covid-19 perlu terus dikembangkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan demikian Tahun 2022 akan menjadi momen untuk pemulihan dan penguatan struktur perekonomian Lombok Tengah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



Sebagai implementasi prioritas dan arah penguatan program secara lebih terperinci, maka direncanakan beberapa program prioritas dan indikator kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 yang mengacu pada prioritas dan sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022

PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD	KEGIATAN PRIORITAS RKPD	PERANGKAT DAERAH
Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Disdik
Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah
Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpoldagri
Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPMD
Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP

PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD	KEGIATAN PRIORITAS RKPD	PERANGKAT DAERAH
Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Disdik
Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Disdik
Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Disdik
Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdik
Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Disdik
Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dispora
Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dispora
Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dikes
Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dikes & RSUD
Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dikes
Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB
Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	Dinsos

PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD	KEGIATAN PRIORITAS RKPD	PERANGKAT DAERAH
		Luar Panti Sosial	
Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnakertrans
Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disnakertrans
Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Disnakertrans
Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dikes
Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja	1.4.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.4.03.2.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perkim
Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas LH
Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian	Dinas PUPR

PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD	KEGIATAN PRIORITAS RKPD	PERANGKAT DAERAH
serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Dinas LH
Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dikes
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP3AP2KB
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperindag
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Diskop UKM
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Diskop UKM
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Diskop UKM
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Disperindag

PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD	KEGIATAN PRIORITAS RKPD	PERANGKAT DAERAH
unggulan		Kabupaten/Kota	
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.3.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dislutkan
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dislutkan
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	3.26.03 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.03.2.02.07 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disparbud
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
Meningkatkan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disparbud
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Dukcapil
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPMD
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	DPMPTSP

PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD	KEGIATAN PRIORITAS RKPD	PERANGKAT DAERAH
		menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas PUPR
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP

Tabel 5.2
Program dan Target Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
	URUSAN WAJIB				
A	TERKAIT PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN				
10.1.1.1.2	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Poin	64,88	68,34
		APK SD	Poin	110,7	107,24
		APK SMP/MTs	Poin	110,36	106,9
		PAUD Terakreditasi	Persen	34,6	37,6
		SD Terakreditasi A	Persen	13,6	17,6
		SMP Terakreditasi A	Persen	10,2	14,2
		Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	98,24	98,94
10.90.1.1.3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	45	50
		Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	5	20
10.90.1.1.4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi	Persen	89,63	92,63
		Persentase PTK SD tersertifikasi	Persen	70,46	75,46
		Persentase PTK SMP	Persen	70,18	75,18

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
		tersertifikasi			
10.90.1.1.5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin	1030	21
10.90.1.1.6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100
		Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
2	KESEHATAN				
7.2.1.2.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Stunting	Persen	27,79	26,29
		Angka Kematian Ibu	Kasus/100.000 KH	141	130
		Angka Kematian Bayi	Kasus/1.00 KH	10	9,3
		Indeks Kepuasan Layanan Rujukan	Poin	74	79
7.90.1.2.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Nakes yang kompeten di pelayanan dasar	Persen	80	100
		Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan kesehatan rujukan	Persen	80	90
7.1.1.2.4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase PIRT yang diterbitkan	Persen	70	80
7.3.1.2.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan posyandu keluarga aktif	Persen	14	60
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
		Nilai SAKIP OPD	Poin	C	B
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
4.4.1.3.2	Program	Rasio luas Daerah	Poin	45,72	69,19

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
	Pengelolaan SumberDaya Air	Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi			
6.3.1.3.3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	Persen	77,28	80,37
4.7.1.3.8	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah terbangun	Unit	2	1
4.7.1.3.9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	luasan bangunan dan lingkungan yang tertata	m2	0	15.000
4.8.1.3.1 0	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan mantap	Persen	65,03	73,17
4.7.1.3.1 1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih & bersertifikat	Persen	0	0,35
5.5.1.3.1 2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan	Jumlah	1	2
1.1.X.XX. 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
6.1.1.4.2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani	Persen	100	3,5
		Pengelolaan/pemeliharaan Perumahan (Rumah Susun Umum, Rumah Khusus dan Perumahan Komersil)	Unit	1	2
6.1.1.4.3	Program Kawasan Permukiman	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	Ha	815,37	10
6.2.1.4.4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang ditangani	Persen	24,37	28,47
6.2.1.4.5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase perumahan (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU	Persen	N/A	5,48
6.2.1.4.6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Prosentase pengembang perumahan yang sudah terfasilitasi	Persen	N/A	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
3.3.1.5.2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda yang ditegakkan	Persen	33,33	46
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	B	B
3.2.1.5.3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana	Persen	16,55	19,42446
3.2.1.5.4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Menit	15	15
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	C	B
6	SOSIAL				
11.2.1.6.2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang dibina	Persen	37,65	9,8
11.8.1.6.3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	Orang	768	200
11.1.1.6.4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	52,61	61,71
11.4.1.6.5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	Orang	230	280
3.2.1.6.6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Persen	100	100
11.90.1.6.7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Sarana dan Prasarana TMPNK yang dikelola	TMPNK	1	1
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	C	B
B	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR				
7	TENAGA KERJA				
4.2.2.7.2	Program	Dokumen database	Dokumen	N/A	1

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
	Perencanaan Tenaga Kerja	ketenagakerjaan			
4.2.2.7.3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenagakerja yang terlatih	Persen	87,36	88,36
4.2.2.7.4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja terdaftar terserap	Persen	86,45	95
4.2.2.7.5	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persen	100	100
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	C	B
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
11.5.2.8.2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	Persen	53,85	61,54
11.5.2.8.3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen	100	100
11.5.2.8.4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan pelaku industri rumahan yang dibina	Persen	32,41	56,71
11.5.2.8.5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	data gender dan anak	Dokumen	N/A	1
11.5.2.8.6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak	Predikat	Madya	Nindya
11.5.2.8.7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	100	100
9	PANGAN				
4.3.2.9.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Prosentase infrastruktur ketersediaan pangan yang aktif	Persen	N/A	66
4.3.2.9.3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi Energi	Kkal/Kap/Hari	2.588,63	2.568,63
		Konsumsi Protein	Gram/Kap/Hari	79,6	77,6
4.3.2.9.4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio Desa Rawan Pangan yang ditangani	Persen	0,3	0,48
4.3.2.9.5	Program	Prosentase akupan	Persen	100	100

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
	Pengawasan Keamanan Pangan	layanan pengawasan keamanan pangan (%)			
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	B	B
10	PERTANAHAN				
5.5.2.10.5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan	Persen	N/A	100
5.5.2.10.8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase permukiman baru yang terbangun	Persen	N/A	100
5.5.2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Dokumen penatagunaan tanah	Dok	N/A	1
11	LINGKUNGAN HIDUP				
5.1.2.11.2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	N/A	1
5.3.2.11.3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan	Persen	56,15	56,35
5.1.2.11.4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	luasan taman kehati (ha)	Ha	N/A	4
5.2.2.11.5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	persentase tingkat ketaatan pengelolaan limbah B3 (%)	Persen	100	100
5.2.2.11.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan	Persen	5	5
5.1.2.11.8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Tenaga Fungsional yang dilatih	Orang	N/A	4
5.1.2.11.10	Program Penanganan Pengaduan	Prosentase Pengaduan Kasus LH yg ditindak lanjuti	Persen	100	100

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
	Lingkungan Hidup	sampai tuntas (%)			
5.1.2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang ditangani	Persen	25,3	28,3
		Persentase pengurangan sampah	Persen	16	18
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1.3.2.12.2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP Elektronik	Persen	97,13	98,07
		Persentase penerbitan KIA	Persen	9,92	29,92
		Persentase penerbitan surat pindah	Persen	N/A	100
1.3.2.12.3	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	95,9	97
1.3.2.12.4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah melaksanakan kerjasama	Persen	4	8
1.3.2.12.5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	0	3
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1.6.2.13.2	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	7,87	12,6
1.6.2.13.3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melaksanakan kerja sama	Persen	73,94	76,06
1.6.2.13.4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen	19,69	27,56
1.6.2.13.5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga adat desa yang aktif	Persen	39,37	44,094
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	C	B
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
7.4.2.14.	Program	Total Fertility Rate	Persen	2,8	2,75

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
2	Pengendalian Penduduk	(TFR)			
7.4.2.14.3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS akseptor KB	Persen	58,5	60,5
7.4.2.14.4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	Persen	62,65	64,65
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	C	B
15	PERHUBUNGAN				
4.8.2.15.2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan	Persen	41,87	48
4.8.2.15.3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut		N/A	20
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
4.9.2.16.2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	Persen	72,73	78,18
4.9.2.16.3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online	Persen	60	80
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
4.1.2.17.2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam (unit)	Unit	245	20
4.1.2.17.3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang Patuh Perundang-undangan (%)	Persen	12,24	12,24
4.1.2.17.4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Laporan tingkat kesehatan KSP/USP (dokumen)	Dokumen	1	1
4.1.2.17.5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang dilatih (%)	Persen	60	90
4.1.2.17.6	Program Pemberdayaan dan	Pertumbuhan Omset Aset	Persen	0,19	3,7735849

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
	Perlindungan Koperasi	Koperasi			
4.1.2.17.7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan omset aset UMKM	Persen	0	28
4.1.2.17.8	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Unit	0	1
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	0	B
18	PENANAMAN MODAL				
4.90.2.18.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMDN (Rp.)	Rupiah	N/A	74.088.148.386,26
		Nilai investasi PMA (Rp.)	Rupiah	N/A	980.948.680.556,26
4.90.2.18.3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor baru (PMA/ PMDN)/ tahun	Investor	1	1
4.90.2.18.4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase permohonan perijinan yang dilayani	Persen	100	100
4.90.2.18.5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha (PMA/PMDN) yang melaporkan LKPM	Persen	N/A	100
4.90.2.18.6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	updating data investasi perizinan dan non perizinan	Database	1	1
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
10.10.2.19.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi	Orang	6	5
10.10.2.19.3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlit berprestasi	Orang	39	44
10.10.2.19.4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang dilatih	Persen	20	30
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	C	B
20	STATISTIK				
1.3.2.20.	Program	Jumlah Instansi	Instansi	55	58

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data			
21	PERSANDIAN				
4.9.2.21.2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase informasi daerah yang diamankan	Persen	100	100
22	KEBUDAYAAN				
10.11.2.2.2	Program Pengembangan Kebudayaan	jumlah event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	Event	23	38
10.11.2.2.3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni dan budaya tradisional aktif	Persen	100	100
10.11.2.2.5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah situs yang dilestarikan	Buah	10	10
23	PERPUSTAKAAN				
10.4.2.23.2	Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	-76,06	50
10.4.2.23.3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Naskah Kuno	0	3
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	C	B
24	KEARSIPAN				
1.90.2.24.2	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan pengelolaan kearsipan	Persen	70	75
1.90.2.24.3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pesentase arsip Terselamatkan	Persen	60	70
1.90.2.24.4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	Izin	0	3
C	PILIHAN				
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
4.3.3.25.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	3039,3	3395,6549
4.3.3.25.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Benih Ikan	Ekor		7.842.667
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	42409,9	46846,018
4.3.3.25.5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase pelanggaran usaha perikanan tangkap dan budidaya yang ditangani	Persen		100

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
4.3.3.25.6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Ton)	Ton	4405,45	4583,43
		Produksi Garam Rakyat (Ton)	Ton	3438,15	3507,2568
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	B	B
26	PARIWISATA				
8.1.3.26.2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	20	20
8.1.3.26.3	Program Pemasaran Pariwisata	Media promosi online yang aktif	Media	1	1
8.1.3.26.5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	240	100
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
27	PERTANIAN				
4.3.3.27.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Pertanian Unggulan :			
		- Padi	data produksi pertahun (GKG)	318322	323.733
		- Tembakau	data produksi pertahun	20224	21.041,05
		- Melon	data produksi pertahun	15320	13.010
		- Sapi	data produksi pertahun	179189	187.893,11
4.3.3.27.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	Poin	50	50
4.3.3.27.4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kenaikan Prosentase Peneratapan Biosecurity Budidaya Ternak	Persen	30	32
4.3.3.27.5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Tingkat Serangan Penyakit Hewan/Tanaman	Persen	30	30
4.3.3.27.6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi Izin	Rekomendasi	260	260

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
		Usaha Pertanian dan Peternakan			
4.3.3.27.7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Desiminasi teknologi pertanian spesifik lokasi	Persen	5	5
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
28	PERDAGANGAN				
4.1.3.30.2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	N/A	60
4.1.3.30.3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	nilai omset perdagangan (Rp.)	Juta Rupiah	114.502,22	114.702,22
4.1.3.30.4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Operasi Pasar	Kali	N/A	2
4.1.3.30.5	Program Pengembangan Ekspor	Nilai transaksi pameran	Rp	0	200.000.000
4.1.3.30.6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pasar tertib ukur	Pasar	0	5
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
29	PERINDUSTRIAN				
4.7.3.31.2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kesesuaian pembangunan industri terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten	Persen	100	100
30	TRANSMIGRASI				
11.90.3.3.2.3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang difasilitasi	Persen	100	100
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
31	SEKRETARIAT DAERAH				
1.1.4.1.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Persen	100	100
		Persentase kebijakan pada bidang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
		Persentase kebijakan bidang Hukum yang dilaksanakan	Persen	100	100
1.1.4.1.3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan pada bidang perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100	100
		Persentase kebijakan pada bidang pembangunan yang dilaksanakan	Persen	100	100
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	50	50
1.1.4.1.1	Program Administrasi Umum	Persentase kebijakan Administrasi umum dan Tata Usaha Pimpinan serta kerumahtanggaan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100
		Persentase kebijakan kelembagaan dan penataan organisasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	Persen	100	100
		Persentase kebijakan pelaksanaan acara Pemerintah Daerah yang dilaksanakan.	Persen	100	100
32	SEKRETARIAT DPRD				
1.1.4.2.1	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Keuangan dan Perencanaan	Dokumen	39	43
		Persentase layanan perkantoran	Persen	100	100
1.1.4.2.2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas	Persen	60	65
		Jumlah Berita yang dipublikasikan	Berita	733	750
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
33	PERENCANAAN				
1.3.5.1.2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100
1.3.5.1.3	Program	Peresentase	Persen	100	100

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Program RPJMD dengan RKPD Bidang SP2M			
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
34	KEUANGAN				
1.1.5.2.2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	Ketepatan	Tepat waktu	Tepat waktu
		Rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan	Hari kerja	2	2
1.1.5.2.3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Validasi data aset	Persen	96	97
		Dokumen satuan harga daerah	Dokumen	1	1
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
1.1.5.2.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	Rupiah	203.926.708.187,53	255,029,352,732
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
35	KEPEGAWAIAN				
1.3.5.3.2	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi	Persen	0	35
		Prosentase layanan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan tepat waktu	Persen	70	95
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	B	BB
36	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1.90.5.4.2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi	Persen	60	64
37	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1.4.5.5.2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100	100
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
38	INSPEKTORAT DAERAH				
1.90.6.1.2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan Pada Pemerintah Daerah	Persen	95	95
1.90.6.1.3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang menyusun manajemen risiko dengan kategori Maturitas terdefinisi, terkelola dan terukur	Persen	72,73	77,27
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
G	UNSUR KEWILAYAHAN				
39	KECAMATAN				
1.6.7.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	Persen	100	100
1.6.7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	Persen		15
1.6.7.1.4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	Persen		55
1.6.7.1.5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	Persen		100
1.6.7.1.6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	Persen		90
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	N/A	B
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
40	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1.1.8.1.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	Persen	100	100
1.1.8.1.3	Program Peningkatan Peran	Angka partisipasi pemilih dalam	Persen	74	0

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target2022
	Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	PEMILU			
		Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi	Persen	100	100
		Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	Persen	5	40
1.1.8.1.4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi	Persen	85	89
1.1.8.1.5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase desa yang mencanangkan "Desa Bebas Narkoba"	Persen	N/A	38,46
1.1.8.1.6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial	Persen	100	100
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Salah satu metode pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan melihat ketercapaian indikator kinerja utama daerah yang bertujuan memberi gambaran atas pencapaian visi misi kepala daerah selama periode masa jabatan. Indikator kinerja utama daerah menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada setiap periode pelaksanaan RPJMD dapat dicapai. Realisasi indikator kinerja utama daerah sampai dengan tahun 2020 serta target di tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama
Realisasi 2020 & Target Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Realisasi sampai 2020	Target kinerja 2022
1	Indeks Toleransi	Poin	3,72	3,79
2	IPM	Poin	66,43	66,88
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	BB
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-6,68	3,10
5	Angka Kemiskinan	%	13,44	13,03
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,74	3,04
7	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	NA	66,55
8	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	%	100	100

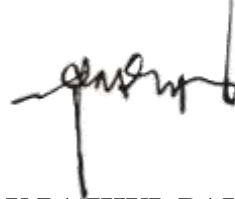
BAB VII PENUTUP

7

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas perencanaan juga sangat ditentukan oleh komitmen para pengelola program pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai implementasi tujuan di atas disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 yang merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2022 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2022 berdasarkan RKPD 2022.

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP